



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEKALAHAN *CAMBODIA PEOPLE'S PARTY* DI WILAYAH
URBAN KAMBOJA PADA PEMILU TAHUN 2013**

SKRIPSI

FARIZAN FAJARI WARDANA

1306460822

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

DEPOK

JUNI 2017



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEKALAHAN *CAMBODIA PEOPLE'S PARTY* DI WILAYAH
URBAN KAMBOJA PADA PEMILU TAHUN 2013**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu
Politik (S.IP)**

FARIZAN FAJARI WARDANA

1306460822

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

DEPOK

JUNI 2017

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

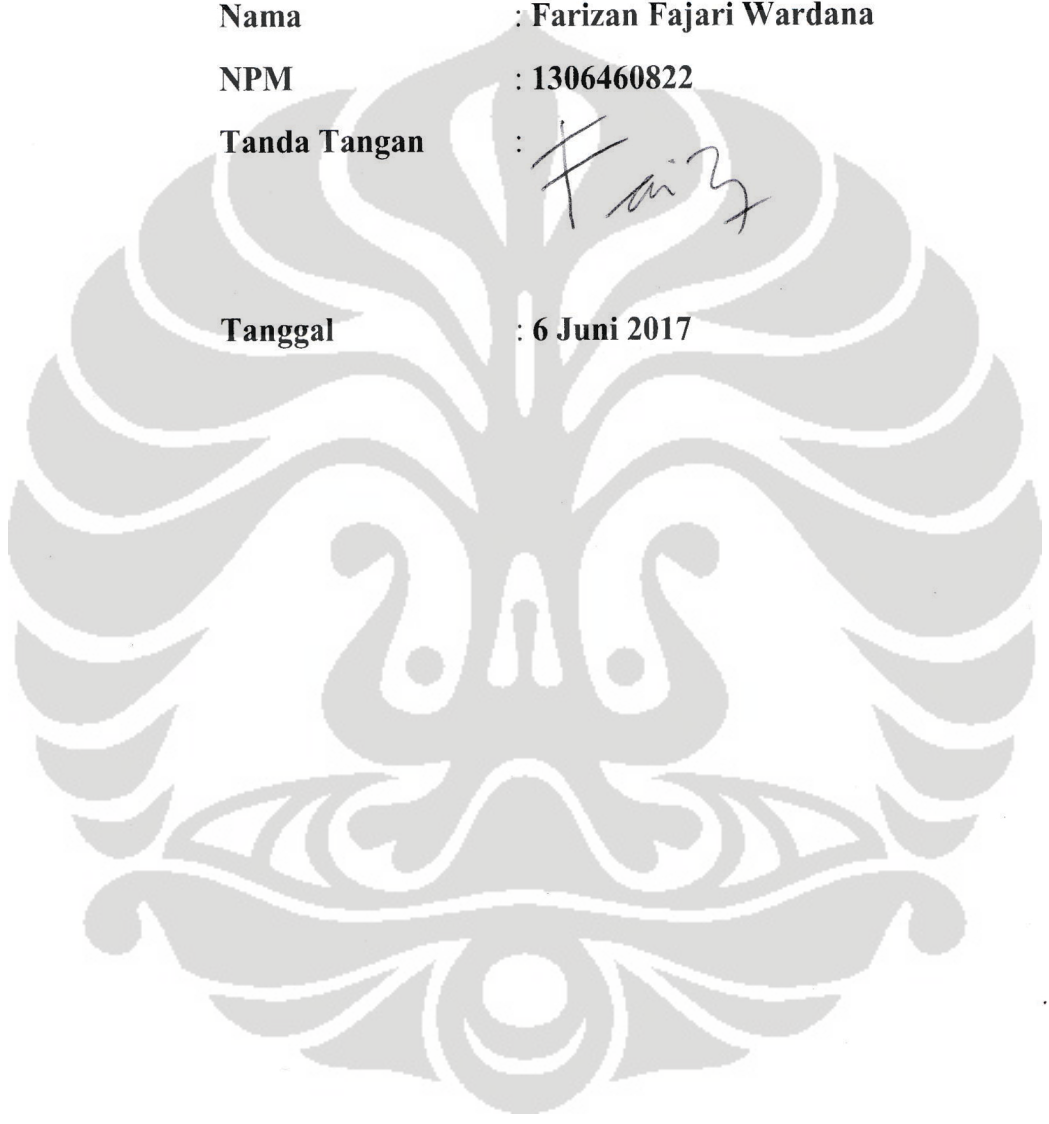
Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Farizan Fajari Wardana

NPM : 1306460822

Tanda Tangan : 

Tanggal : 6 Juni 2017



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Farizan Fajari Wardana
NPM : 1306460822
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Kekalahan *Cambodia People's Party* di Wilayah Urban Kamboja pada Pemilu Tahun 2013

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Syaiful Bahri, S.Sos., M.Si.
Penguji : Meidi Kosandi, S.IP., M.A., Ph.D.
Ketua Sidang : Cecep Hidayat, S.IP., IMRI.
Sekertaris Sidang : Nurul Nurhandjati, S.IP., M.Si.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Juni 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Kekalahan *Cambodia People's Party* di Wilayah Urban Kamboja pada Pemilu Tahun 2013”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan penulis kekuatan fisik, mental, serta bantuan lainnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini.
2. Kedua orangtua penulis, Kun Wardana Abyoto dan Ririn Nurmayanti yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan moral dan materil kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik penulis, Farahiyah Adzani, yang memiliki peran besar dalam membantu penulis menyusun skripsi ini. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Om Wahyu Purnawan (alm.) yang selalu memberikan kepercayaan dan semangat kepada penulis hingga akhirnya berhasil menyelesaikan skripsi ini.
3. Mas Syaiful Bahri, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing skripsi penulis atas kesabaran, waktu, dan bimbingannya selama ini. Terima kasih telah membimbing penulis dengan sabar hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih kepada Mas Ali Muhyidin, S.Sos., M.A. yang telah membimbing penulis sejak SPM dan memberikan akses narasumber kepada penulis ketika melakukan turun lapangan ke Kamboja. Terima kasih juga tidak lupa diberikan kepada Mba Evida Kartini, S.Sos., M.Si. yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis, sehingga memberikan masukan penting dalam penulisan skripsi ini.

4. Mas Meidi Kosandi, S.IP., M.A., Ph.D. sebagai penguji skripsi, Mas Cecep Hidayat, S.IP., IMRI. sebagai ketua sidang skripsi, dan Mba Nurul Nurhandjati, S.IP., M.Si. sebagai sekretaris sidang skripsi, yang telah memberikan masukan dan saran penting dalam skripsi ini, sehingga kualitas skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Sahabat dekat dan teman seperjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi, Diza, Nabil, Dhito, Robby, Chika, Nabila dan Deka, yang terus memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dekat penulis lainnya, Iqbal, Andra, Qorib, Teddy, Eja, Ferdi, Bagus, Endhe, Cisi, Gras, Greta, Vita, serta seluruh teman-teman Ilmu Politik UI 13 yang telah mewarnai kehidupan penulis di FISIP sejak semester satu hingga saat ini.
6. Narasumber utama penelitian ini, Dam Sophat, Meas Nee, Pich Sovann, Rithy, Thol Dina, dan Yong Kim Eng, yang telah bersedia menyediakan waktu dan memberikan informasi penting terkait skripsi ini.
7. Senior, mentor, sekaligus panutan bagi penulis, Asbak, yang telah sangat membantu penulis dalam melewati masa-masa sulit awal perkuliahan di Politik UI. Terima kasih juga tidak lupa diberikan kepada Kak Mimi, Kak Syifa, dan Kak Aul yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Teman-Teman Keilmuan HMIP 2014, Asbak, Kak Mimi, Besun, Ami, Fajar, dan Caca yang telah memberikan pengalaman berharga kepada penulis dalam berorganisasi di ruang lingkup kampus.

Akhir kata, Penulis berharap Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari tulisan ini tidak luput dari kesalahan dan ketidaksempurnaan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Depok, 6 Juni 2017

Farizan Fajari Wardana

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farizan Fajari Wardana

NPM : 1306460822

Program Studi : Ilmu Politik

Departemen : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis : Skripsi/Tesis/Disertasi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Kekalahan *Cambodia People’s Party* di Wilayah Urban Kamboja pada Pemilu Tahun 2013” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 6 Juni 2017

Yang menyatakan



(Farizan Fajari Wardana)

ABSTRAK

Nama : Farizan Fajari Wardana
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Kekalahan *Cambodia People's Party* di Wilayah Urban
Kamboja pada Pemilu Tahun 2013

Penelitian ini membahas mengenai fenomena kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013. Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa CPP mengalami kekalahan di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan teori *Dominant Party Authoritarian Regimes* dari Kenneth Greene dan konsep *International Election Observation* dari Thomas Carothers. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan analisis dan data sekunder dari kajian literatur. Hasil pembahasan dan analisis tulisan ini menemukan tiga kondisi yang melatarbelakangi kekalahan CPP di wilayah urban pada pemilu tahun 2013. *Pertama*, penurunan kinerja dan permasalahan dalam pemerintahan Hun Sen. *Kedua*, perbedaan isu dan strategi kampanye yang digunakan oleh CPP dan CNRP. *Ketiga*, penurunan praktik intimidasi politik oleh militer.

Kata Kunci: CPP, Hun Sen, CNRP, pemilu 2013, wilayah urban.

ABSTRACT

Name : Farizan Fajari Wardana
Study Program : Political Science
Title : The Defeat of Cambodia People's Party in Cambodia's Urban Areas on 2013 General Election

This thesis discusses about CPP's defeat in Cambodia's urban areas on 2013 general election. In particular, this thesis questions why CPP was defeated in Cambodia's urban areas on 2013 general election. To answer this question, this thesis uses Dominant Party Authoritarian Regimes from Kenneth Greene and International Election Observation concept from Thomas Carothers. This thesis uses qualitative method, by gathering primary data from indepth interview and secondary data analysis from literature review. This thesis finds that there are three main conditions that lead to the defeat of CPP in urban areas on 2013 general election. *First*, the decreasing performance and problems in Hun Sen Regimes. *Second*, differences of issues and campaign strategies used by CPP and CNRP. *Third*, the decrease of political intimidation practice by the military.

Keywords: CPP, Hun Sen, CNRP, 2013 election, urban area.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR ISTILAH	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian	7
1.4 Tinjauan Pustaka	7
1.5 Kerangka Teori dan Konseptual	11
1.5.1 Dominant Party Authoritarian Regimes	11
1.6 Metode Penelitian	16
1.6.1 Teknik Pengumpulan Data	17
1.6.2 Metode Analisis Data	18
1.7 Asumsi Penelitian	19
1.8 Kerangka Alur Berpikir	20
1.9 Sistematika Penulisan	21
BAB 2 REZIM OTORITER KOMPETITIF DI KAMBOJA DAN DOMINASI <i>CAMBODIA PEOPLE'S PARTY</i> PADA PEMILU TAHUN 1998- 2008	23
2.1 Rezim Otoriter Kompetitif di Kamboja	23
2.2 Sejarah dan Sistem Penyelenggaraan Pemilu di Kamboja dalam Rezim Otoriter Kompetitif	30
2.3 Dominasi CPP dalam Pemilu Kamboja Tahun 1998-2008	36
2.4 Strategi Kemenangan CPP dalam Pemilu Tahun 1998-2008	39

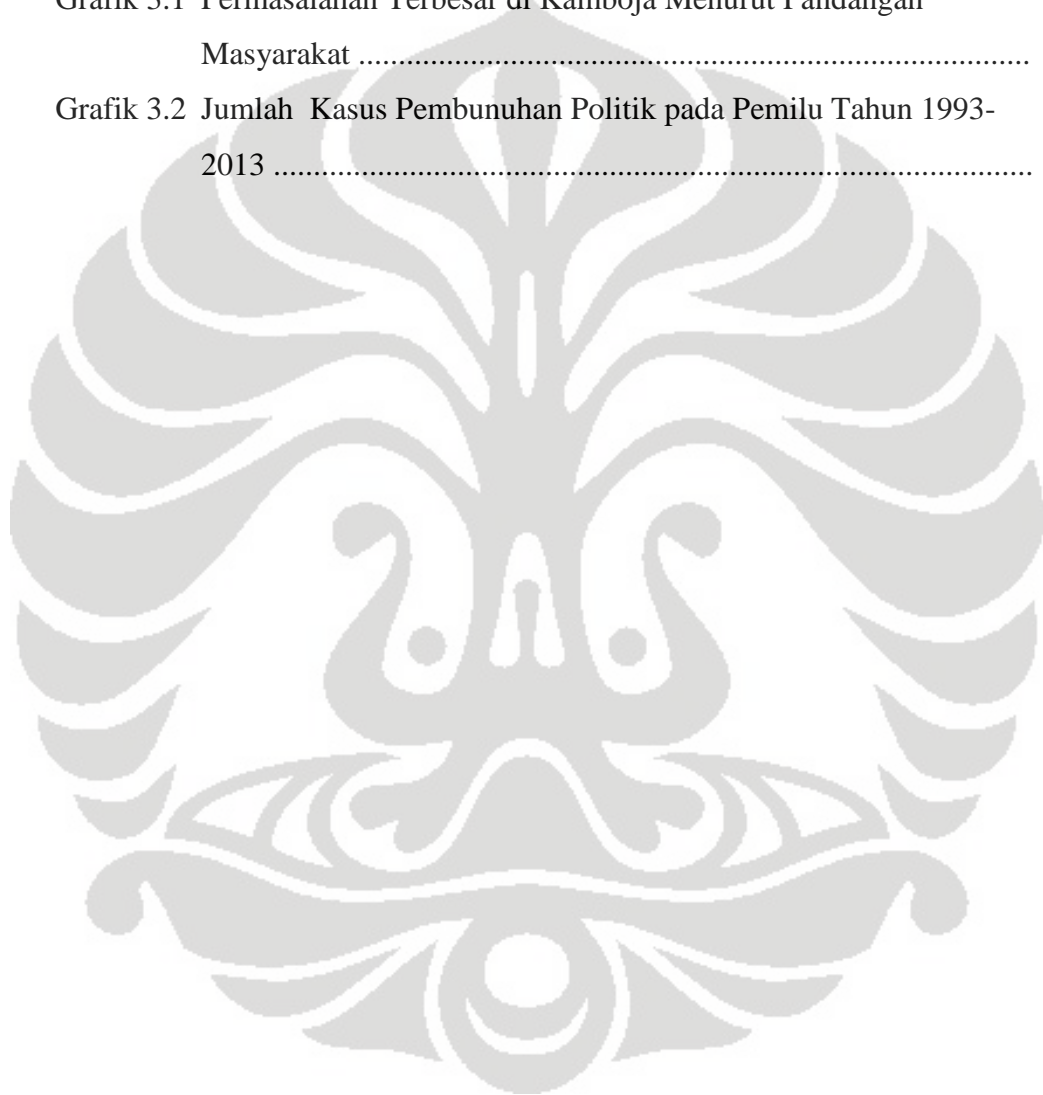
2.4.1 Strategi Vote Buying	40
2.4.2 Strategi Intimidasi Politik	43
2.4.3 Strategi Penyalahgunaan Sumber Daya Negara	44
2.4.4 Strategi Kecurangan Administratif dalam Pemilu	47
BAB 3 ANALISIS KEKALAHAN <i>CAMBODIA PEOPLE'S PARTY</i> DI WILAYAH URBAN PADA PEMILU TAHUN 2013	50
3.1 Fenomena Kekalahan CPP di Wilayah Urban Kamboja pada Pemilu Tahun 2013	50
3.2 Kondisi-Kondisi yang Melatarbelakangi Kekalahan CPP di Wilayah Urban pada Pemilu Tahun 2013	56
3.2.1 Penurunan Kinerja dan Permasalahan dalam Pemerintahan Hun Sen..	57
3.2.2 Perbedaan Isu dan Strategi Kampanye yang Digunakan CPP dan CNRP	65
3.2.3 Penurunan Praktik Intimidasi Politik oleh Militer	72
BAB 4 KESIMPULAN	79
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah dan Presentase Kursi Partai di Kamboja Tahun 1993-2013	4
Tabel 1.2 Perbandingan Perolehan Kursi CPP dan CNRP Tahun 2008 dan 2013 di Empat Wilayah Urban	5
Tabel 1.3 Perbandingan Rezim Demokratis, Otoriter Kompetitif, dan Otoriter Penuh	12
Tabel 1.4 Teknik Pengumpulan Data	17
Tabel 2.1 Hukum Internasional dan Domestik Tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Kamboja	25
Tabel 2.2 Perbandingan Konsep Levitsky dan Way dengan Rezim di Kamboja	28
Tabel 2.3 Perbandingan Presentase Suara dan Kursi Parlemen di Kamboja pada Pemilu Tahun 1993-2013	34
Tabel 2.4 Perbandingan Sistem Pemilu di Kamboja Sebelum dan Sesudah Pemilu Tahun 1993	35
Tabel 2.5 Jumlah dan Presentase Perolehan Suara dan Kursi Partai di Kamboja pada Pemilihan Daerah Tahun 2002-2012	39
Tabel 2.6 Strategi CPP dalam Mempertahankan Kekuasaan di Kamboja	48
Tabel 3.1 Perbandingan Jumlah Suara dan Kursi Partai di Kamboja pada Pemilu Tahun 2008 dan 2013	52
Tabel 3.2 Perolehan Jumlah Kursi CPP dan CNRP per Provinsi	53
Tabel 3.3 Indeks Korupsi Negara-Negara ASEAN Tahun 2013	58
Tabel 3.4 Praktik Korupsi yang Dilakukan Pemerintah Kamboja Hingga Tahun 2013.....	60
Tabel 3.5 Perbandingan Isu, Strategi, dan Target Kampanye CPP dan CNRP pada Pemilu Tahun 2013	69
Tabel 3.6 Kondisi-Kondisi yang Melatarbelakangi Kekalahan CPP di Wilayah Urban pada Pemilu Tahun 2013	77

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Perbandingan Jumlah Partai yang Berpartisipasi dalam Pemilu dan Parlemen Kamboja Sebelum dan Sesudah Tahun 1993	32
Grafik 2.2 Jumlah Perolehan Kursi Partai di Kamboja pada Pemilu Tahun 1993-2008	38
Grafik 3.1 Permasalahan Terbesar di Kamboja Menurut Pandangan Masyarakat	64
Grafik 3.2 Jumlah Kasus Pembunuhan Politik pada Pemilu Tahun 1993- 2013	74



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Alur Berpikir	21
--	----



DAFTAR SINGKATAN

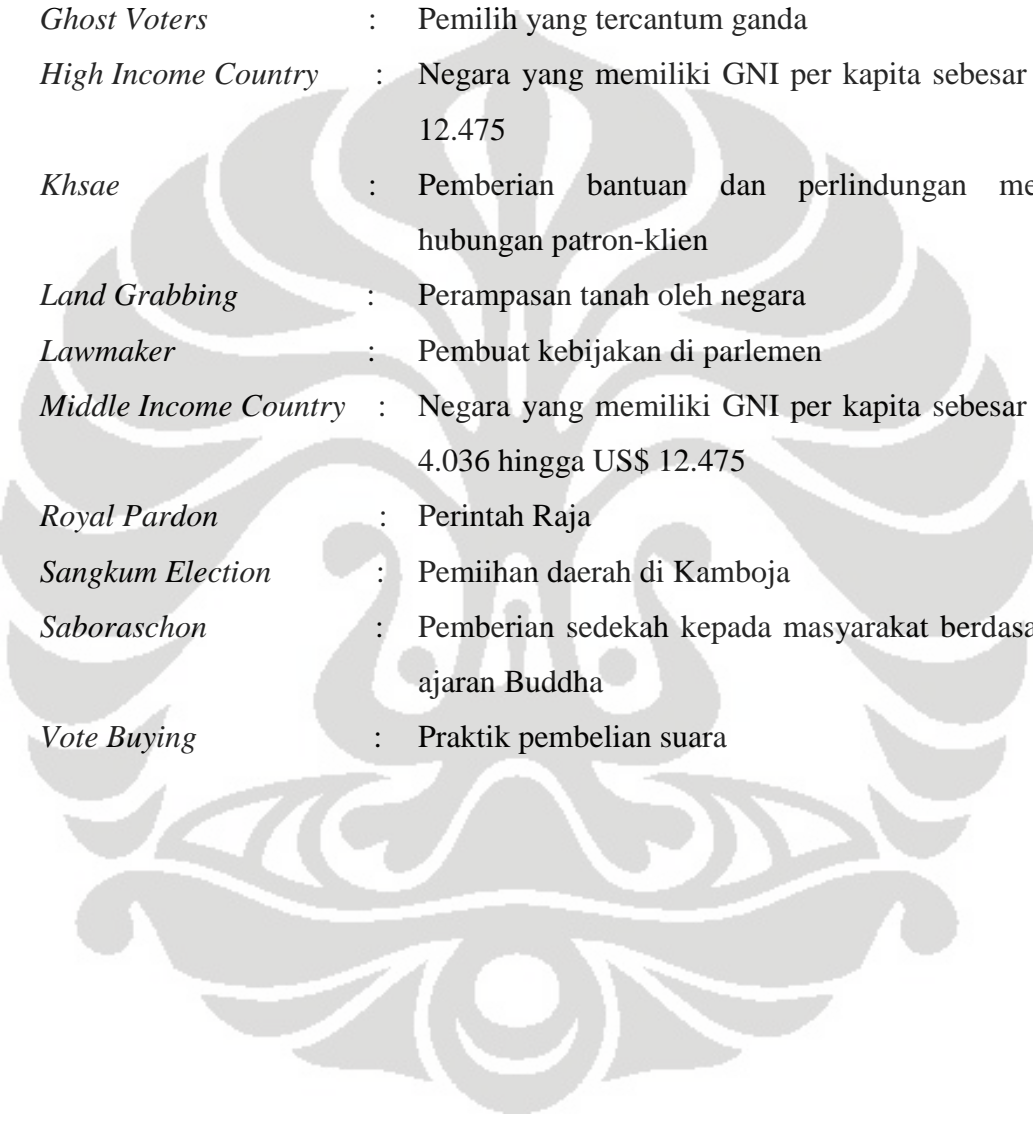


ACU	: <i>Anti-Corruption Unit</i>
ADHOC	: <i>Cambodian Human Rights and Development Association</i>
AHRC	: <i>Asian Human Right Commission</i>
BLDP	: <i>Buddhist Liberal Democratic Party</i>
CAPDI	: <i>Centrist Asia Pacific Democrats International</i>
CNP	: <i>Cambodian National Party</i>
CNRP	: <i>Cambodia National Rescue Party</i>
COMFREL	: <i>The Committee for Free and Fair Election in Cambodia</i>
CPP	: <i>Cambodia People's Party</i>
ELC	: <i>Economic Land Concession</i>
FUN	: <i>FUNCINPEC</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
HDDMP	: <i>Hang Dara Democratic Movement Party</i>
HRP	: <i>Human Rights Party</i>
HRW	: <i>Human Rights Watch</i>
ICAPP	: <i>International Conference for Asian Political Party</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
KAPP	: <i>Khmer Anti-Poverty Party</i>
KDP	: <i>Khmer Democratic Party</i>
KEDP	: <i>Khmer Economic Development Party</i>
KPRP	: <i>Kampuchean People's Revolutionary Party</i>
KRP	: <i>Khmer Republican Party</i>
LDP	: <i>League for Democratic Party</i>
MOU	: <i>Moulinaka</i>
NCAC	: <i>National Council Against Corruption</i>
NEC	: <i>National Election Committee</i>
NRP	: <i>Norodom Ranariddh Party</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PRD	: <i>Party of the Democratic Revolution</i>
PRI	: <i>Institutional Revolutionary Party</i>

PRI	: <i>Press Freedom Index</i>
PRK	: <i>People's Republic Kampuchea</i>
RDP	: <i>Republican Democracy Party</i>
SJP	: <i>Society of Justice Party</i>
SRP	: <i>Sam Rainsy Party</i>
TI	: <i>Transparency International</i>
UNTAC	: <i>The United Nations Transitional Authority in Cambodia</i>



DAFTAR ISTILAH



<i>Absolute Majority</i>	:	Predikat yang didapat oleh partai yang mendapatkan 2/3 kursi parlemen Kamboja
<i>Chief Village</i>	:	Kepala daerah di Kamboja
<i>Councillors Village</i>	:	Dewan daerah
<i>Ghost Voters</i>	:	Pemilih yang tercantum ganda
<i>High Income Country</i>	:	Negara yang memiliki GNI per kapita sebesar US\$ 12.475
<i>Khsae</i>	:	Pemberian bantuan dan perlindungan melalui hubungan patron-klien
<i>Land Grabbing</i>	:	Perampasan tanah oleh negara
<i>Lawmaker</i>	:	Pembuat kebijakan di parlemen
<i>Middle Income Country</i>	:	Negara yang memiliki GNI per kapita sebesar US\$ 4.036 hingga US\$ 12.475
<i>Royal Pardon</i>	:	Perintah Raja
<i>Sangkum Election</i>	:	Pemilihan daerah di Kamboja
<i>Saboraschon</i>	:	Pemberian sedekah kepada masyarakat berdasarkan ajaran Buddha
<i>Vote Buying</i>	:	Praktik pembelian suara

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan pemilu, merupakan sebuah topik yang menarik untuk dikaji lebih jauh penerapannya dalam sebuah negara. Menurut Ramlan Surbakti, pemilu didefinisikan sebagai sebuah mekanisme penyeleksi dan penyerahan kedaulatan masyarakat kepada orang atau partai yang dipercayai.¹ Sementara itu, Huntington dalam tulisannya menjelaskan bahwa implementasi pemilu memiliki lima tujuan utama, yaitu: (1) sebagai perwujudan kedaulatan rakyat; (2) sebagai sarana perwakilan politik; (3) sebagai sarana pergantian pemimpin secara konstitusional; (4) sebagai sarana pemimpin mendapat legitimasi; dan (5) sebagai sarana partisipasi politik masyarakat.² Berdasarkan kedua pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pemilu di sini sangat penting bagi masyarakat, karena melalui sarana ini, masyarakat dapat memilih pemimpin negara sesuai dengan pilihan yang ditentukan, sehingga keterpilihan calon pemimpin nantinya sangat bergantung pada pilihan yang diambil masyarakat.

Pada umumnya, pemilu dapat diterapkan di sebuah negara yang bersifat demokratis maupun otoriter (non-demokratis). Menurut penelitian Lee Morgenbesser, terdapat perbedaan karakteristik yang terlihat antara penyelenggaraan pemilu di negara demokratis dan otoriter, khususnya di negara-negara Asia Tenggara. Di negara demokratis, penyelenggaraan pemilu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi —seperti yang diungkapkan oleh Schumpeter dan Dahl— sehingga pada akhirnya penerapan pemilu dapat berjalan dengan bebas, adil, dan kompetitif bagi seluruh masyarakat. Namun di sisi lain, karakteristik pemilu di negara otoriter justru berbeda dengan pemilu di negara demokratis. Menurut Morgenbesser, meskipun pemilu di negara otoriter tetap menggunakan nilai demokratis, namun dalam penerapannya, pemilu tersebut juga

¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1992), hlm. 181.

² Samuel Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (terj.) (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 9-16.

memperkenankan partai pemerintah/penguasa untuk menggunakan cara otoriter dalam memenangkan pemilu —seperti kecurangan administratif, intimidasi dan represi, praktik pelanggaran pemilu— sehingga pemilu tersebut tidak sepenuhnya bersifat demokratis.³ Secara garis besar, tulisan ini akan membahas salah satu negara yang menerapkan pemilu dalam ruang lingkup otoriter, yaitu Kamboja. Meskipun terdapat adanya gelombang demokratisasi, namun penyelenggaraan pemilu di Kamboja masih tetap bersifat otoriter hingga saat ini.

Bagaimana penerapan pemilu di Kamboja dapat dikategorikan bersifat otoriter? Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa unsur otoriter yang terdapat selama pemilu berlangsung, seperti yang diungkapkan oleh Morgenbesser. Dalam hal ini, *Cambodia People's Party* (CPP) yang bertindak sebagai partai pemerintah, menggunakan beberapa cara otoriter untuk memenangkan pemilu dan terus mempertahankan kekuasaannya. *Pertama*, strategi *vote buying*. Menurut Caroline Hughes dan Garry Rodan, praktik pembelian suara merupakan salah satu strategi yang dilakukan CPP dalam mendulang banyak suara dari masyarakat, di setiap penyelenggaraan pemilu. Meskipun berbagai pemerhati politik internasional mengkritik tradisi ini, namun fenomena kompleks ini telah terjadi di Kamboja dari sejak lama, sehingga tradisi ini sudah dianggap lumrah bagi mayoritas masyarakat Kamboja.⁴ Strategi tersebut didukung dengan kondisi yang sedang dialami oleh masyarakat Kamboja. Menurut penelitian Collins, kondisi ekonomi dan tingkat pengetahuan masyarakat Kamboja yang relatif rendah membuat mereka cenderung memilih partai yang memberikan *vote buying* (CPP), dibandingkan dengan partai yang mempunyai program kebijakan ekonomi dan politik yang baik.⁵

Kedua, strategi intimidasi politik. Penelitian *Human Rights Watch* (HRW) berhasil membuktikan bahwa CPP memanfaatkan kekuatan militernya dengan tujuan untuk mengintimidasi masyarakat agar memberikan hak suaranya kepada

³ Lee Morgenbesser, 2016, “*States, Neopatrimonialism, and Elections: Democratization in Southeast Asia*”, Griffith University, hlm. 1-38.

⁴ Menurut Hughes, ‘pemberian sedekah’ ini mengilustrasikan dimensi simbolis dan koersif yang beroperasi melalui kooptasi sumber daya diskursif dalam mitos dan memori bersama, berupa politisasi sumber daya material dan mobilisasi melalui ultimatum. Kombinasi keduanya kemudian membuat praktik pemberian sedekah ini sulit untuk dicerna dan diatur oleh hukum secara legal-formal. Lihat Caroline Hughes dan Garry Rodan, *The Politics of Accountability in Southeast Asia: The Dominance of Moral Ideologies* (Oxford: Oxford University Press, 2014), hlm. 112.

⁵ William Collins, 2000, “Impact Survey of Voter Knowledge and Awareness”, *Working Paper*, hlm. 10-41.

CPP. Tidak hanya masyarakat, pihak oposisi dan penyelenggara pemilu-pun ikut menjadi korban intimidasi dari militer. Tindakan represif ini sangat terlihat di beberapa wilayah Kamboja, sehingga CPP dapat terus mempertahankan dominasi jumlah suaranya.⁶

Ketiga, penyalahgunaan sumber daya negara oleh CPP. Dalam hal ini, CPP mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kamboja untuk tetap mempertahankan kekuasaan mereka di pemerintahan. Selain itu, CPP juga memanfaatkan secara ilegal infrastruktur yang dimiliki oleh negara —seperti kendaraan dan bangunan negara— untuk kepentingan kampanye partai dalam pemilu. Kondisi tersebut tentunya semakin mempermudah jalan CPP untuk mengalahkan para kompetitornya dalam pemilu.⁷

Keempat, kecurangan administratif dalam pemilu. Kontrol penuh yang dimiliki oleh CPP terhadap lembaga pemilu Kamboja, *National Election Committee* (NEC), menyebabkan banyaknya laporan yang didapat terkait kecurangan pemilu. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *The Committee for Free and Fair Election in Cambodia* (COMFREL), kecurangan tersebut pada umumnya terlihat dari banyaknya jumlah ‘pemilih hantu’ dan masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih, di setiap penyelenggaraan pemilu.⁸

Keempat strategi otoriter yang dilakukan oleh CPP tersebut —dalam mempertahankan kekuasaan yang dimiliki— dapat dikatakan berhasil jika dilihat dari perolehan kursi yang didapat oleh CPP setiap penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh NEC, perolehan kursi CPP terus mengalami peningkatan sejak berhasil mengalahkan FUNCINPEC pada Pemilu tahun 1998. Puncaknya adalah ketika CPP berhasil memperoleh 90 kursi di parlemen pada pemilu tahun 2008. Perolehan tersebut merupakan yang tertinggi bagi CPP sejak keikutsertaan mereka pada pemilu tahun 1993.⁹

⁶ Human Rights Watch, 2003, "Don't Bite the Hand that Feeds You: Coercion, Threats, and Vote-Buying in Cambodia's National Election", *Briefing Paper*, diakses melalui <https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/asia/cambodia/elections.htm>.

⁷ Kheang Un dan Sokbunthoeun So, "Politics of Natural Resource Use in Cambodia", *Asian Affairs*, Vol. 36, No. 3, (2009), hlm. 123-138.

⁸ COMFREL, 2013, "National Assembly Election, Final Assessment and Report", *Report*, hlm. 74-77.

⁹ Women's Media Centre of Cambodia, 2013, "Electoral Analysis Report", *Report*, hlm. 20.

1.2 Rumusan Masalah

Superioritas jumlah kursi yang diperlihatkan CPP dalam tiga pemilu terakhir (1998, 2003, dan 2008) ternyata tidak terulang lagi pada pemilu tahun 2013. Meskipun berhasil menyandang predikat '*absolute majority*' dengan memperoleh 90 kursi pada pemilu tahun 2013, Perolehan kursi CPP harus berkurang 22 kursi di parlemen pada Pemilu tahun 2013, sehingga total hanya memperoleh 68 kursi.¹⁰ Meskipun CPP tetap memiliki kursi terbanyak dibandingkan dengan partai oposisi lainnya, perolehan kursi tersebut merupakan hasil yang terburuk bagi CPP sejak penyelenggaraan Pemilu tahun 1998 (**lihat Tabel 1.1**).¹¹

Tabel 1.1 Jumlah dan Presentase Kursi Partai di Kamboja Tahun 1993-2013

Partai	1993	1998	2003	2008	2013
CPP	51 (42,5%)	64 (52,5%)	73 (59,3%)	90 (73,1%)	68 (55,2%)
CNRP	-	-	-	-	55 (44,8%)
SRP	-	15 (12,3%)	24 (21,9%)	26 (21,2%)	-
HRP	-	-	-	3 (2,5%)	-
FUNCINPEC	58 (48,4%)	43 (35,2%)	26 (20,8%)	2 (1,6%)	-
NRP	-	-	-	2 (1,6%)	-
BLDP	10 (8,3%)	-	-	-	-
Moulinaka	1 (0,8%)	-	-	-	-
Total	120 (100%)	122 (100%)	123 (100%)	123 (100%)	123 (100%)

Sumber: COMFREL, 2013, "National Assembly Election, Final Assessment and Report", *Report*, hlm. 75.

Berkurangnya perolehan suara CPP dalam pemilu ini disebabkan oleh kegagalan CPP dalam meraih kursi terbanyak di empat wilayah urban Kamboja, yaitu: Phnom Penh, Kampong Cham, Kandal, dan Prey Veng. Kekalahan tersebut menjadi lebih vital mengingat proporsi jumlah kursi di keempat wilayah tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan 20 provinsi lainnya di Kamboja. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh NEC (**lihat Tabel 1.2**), terdapat penurunan

¹⁰ *Absolute majority* merupakan predikat yang disandang oleh partai yang berhasil meraih 2/3 kursi parlemen di Kamboja. Dalam pemilu tahun 2008, CPP berhasil melebihi jumlah perolehan kursi minimal agar dapat dikategorikan sebagai *absolute majority* (82 kursi), sehingga CPP dapat membentuk pemerintahan sendiri di Kamboja. Lihat Wolfgang Sachsenroder, *The Contemporary Politics in Cambodia* dalam Pou Sothirnak *et al.*, *Cambodia: Progress and Challenges Since 1991* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2012), hlm. 233.

¹¹ Meskipun tetap berhasil memperoleh kursi terbanyak dengan 68 kursi pada pemilu tahun 2013, namun terdapat penyempitan gap jumlah antara CPP dengan partai lainnya. Jika pada tahun 2008 perbedaan jumlah kursi CPP dengan SRP berjumlah 64, namun pada tahun 2013, perbedaan jumlah kursi CPP dengan CNRP (dulu SRP) hanya berjumlah 13. Women's Media Centre of Cambodia, *Op. Cit.*, hlm. 77.

jumlah kursi yang diperoleh CPP di empat wilayah urban tersebut. Jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, CPP harus kehilangan sebanyak dua kursi di Provinsi Phnom Penh, Prey Veng, dan Kandal, sedangkan khusus untuk Provinsi Kampong Cham, perolehan kursi CPP harus berkurang sebanyak tiga kursi.¹² Jika diakumulasi lebih lanjut, perolehan kursi CPP pada pemilu tahun 2013 harus mengalami pengurangan sebanyak sembilan kursi, di empat wilayah urban tersebut.

Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kemana suara CPP tersebut beralih? Khususnya yang berada di wilayah urban? Ternyata seluruh suara tersebut beralih kepada salah satu partai oposisi Kamboja, yaitu *Cambodia National Rescue Party* (CNRP), yang baru saja terbentuk pada tahun 2012, satu tahun menjelang dilaksanakan Pemilu tahun 2013. Partai ini merupakan gabungan dari dua partai oposisi yang terlebih dahulu sudah terbentuk, yaitu *Sam Rainsy Party* (SRP) dan *Human Rights Party* (HRP) — sehingga CNRP di sini diketuai dan diwakili oleh masing-masing pemimpin SRP dan HRP, yaitu Sam Rainsy dan Kem Sokha.¹³

Tabel 1.2 Perbandingan Perolehan Kursi CPP dan CNRP Tahun 2008 dan 2013 di Empat Wilayah Urban¹⁴

Provinsi	Jumlah Kursi	CPP			CNRP		
		2008	2013	+/-	2008	2013	+/-
Kampong Cham	18	11	8	-3	6	10	+4
Phnom Penh	12	7	5	-2	5	7	+2
Prey Veng	11	7	5	-2	3	6	+3
Kandal	11	7	5	-2	4	6	+2
Total	52	32	23	-9	18	29	+11

Sumber: (1) COMFREL, 2013, “National Assembly Election, Final Assessment and Report”, *Report*, hlm. 116. (2) COMFREL, 2008, “2008 National Assembly Election”, *Report*, hlm. 98.

Meskipun tidak memiliki waktu yang banyak untuk mempersiapkan diri dalam pemilu tahun 2013, CNRP berhasil mengumpulkan 55 kursi parlemen pada keikutsertaan perdananya dalam pemilu. Jumlah tersebut hanya berselisih 13 kursi dari CPP, yang bertindak sebagai pemenang pemilu. Banyaknya jumlah suara yang

¹² Colum Graham, *New Mandala: Cambodia's Inverted Mandala*, diakses melalui <http://www.newmandala.org/cambodias-inverted-mandala/> pada tanggal 6 Agustus 2016 pukul 20.47 WIB.

¹³ Canvasopedia, 2015, “Analysis of the Situation in Cambodia”, *Report*, hlm. 6.

¹⁴ Perolehan kursi CNRP di wilayah urban pada tahun 2008 merupakan gabungan dari jumlah kursi yang diperoleh SRP dan HRP, mengingat CNRP pada saat itu belum terbentuk.

diperoleh CNRP tersebut tidak lain disebabkan oleh kemenangan yang didapat CNRP di wilayah urban Kamboja. Berdasarkan data **Tabel 1.2**, CNRP berhasil memenangkan 29 kursi hanya dari empat provinsi urban tersebut. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan CPP, yang pada pemilu ini hanya mendapatkan 23 kursi, sehingga mereka mengalami kekalahan perdana di wilayah urban Kamboja. Menurut Kheang Un, keberhasilan CNRP tersebut merupakan hasil strategi kampanye — baik melalui media internet maupun secara langsung— yang hanya fokus dilakukan di empat provinsi tersebut, mengingat proporsi jumlah kursi di wilayah tersebut lebih banyak dari provinsi lainnya.

Selain itu, alasan mengapa CNRP hanya gencar melakukan kampanye di wilayah urban karena sulitnya akses yang dimiliki mereka untuk masuk ke wilayah rural, karena kekuatan yang dimiliki oleh CPP di wilayah tersebut.¹⁵ Menurut Hughes dan Rodan, kekuatan yang dimiliki oleh CPP dapat dilihat dari terbentuknya hubungan CPP-Masyarakat, dimana CPP dapat melakukan ‘pemberian sedekah’ kepada masyarakat berdasarkan ajaran Buddha (*saboraschon*), serta pemberian bantuan dan perlindungan melalui hubungan patron-klien (*khsae*), sehingga masyarakat rural cenderung memilih CPP dalam pemilu. Selain itu, kuatnya pengaruh militer dan ketiadaan pengawas pemilu internasional di wilayah rural membuat masyarakat di sana cenderung harus memilih CPP dibandingkan partai alternatif lainnya.¹⁶ Alhasil, perolehan kursi CNRP di wilayah rural hanya berjumlah sebanyak 26 dari 71 kursi, sementara itu dengan segala kelebihan yang dimiliki, CPP berhasil mendapatkan sebanyak 45 dari 71 kursi yang tersedia.¹⁷

Berdasarkan penjabaran tersebut, tulisan ini berupaya untuk mengkaji lebih mendalam terkait fenomena kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013. Dengan menggunakan teori *Dominant Party Authoritarian Regimes* dan konsep *International Election Observation*, tulisan ini diawali dengan menjabarkan kondisi pemilu di Kamboja dalam ruang lingkup otoriter, dominasi CPP pada pemilu periode 1998-2008, serta strategi yang dilakukan oleh CPP untuk

¹⁵ Kheang Un, *The Cambodian People Have Spoken: Has the Cambodian People's Party Heard?* Dalam Daljit Singh, *Southeast Asian Affairs 2015* (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2015), hlm. 103-105.

¹⁶ Hughes dan Rodan, *Op. Cit.*, hlm. 112.

¹⁷ Women's Media Centre of Cambodia, *Op. Cit.*, hlm. 20.

mewujudkan keberhasilan tersebut. Pembahasan tulisan ini akan dilanjutkan dengan hasil analisis terkait peristiwa dan kondisi yang melatarbelakangi kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013. Dengan pembahasan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah: ***“Mengapa CPP mengalami kekalahan di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013?”***

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam terkait fenomena kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013. Melalui penelitian ini, penulis akan membuktikan bahwa terdapat peristiwa dan kondisi penting yang terjadi di wilayah urban, sehingga pada tahapan berikutnya membuat CPP harus mengakui keunggulan kursi CNRP di wilayah tersebut pada pemilu tahun 2013. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, karena dengan mengkaji topik ini kita dapat mengetahui peristiwa dan kondisi apa saja yang dapat membawa kepada perubahan hasil pemilu di suatu wilayah, sehingga hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk menganalisis fenomena perubahan kursi/suara dalam pemilu negara lain, khususnya negara yang memiliki karakteristik yang sama dengan Kamboja (negara otoriter).

1.4 Tinjauan Pustaka

Dalam tulisan ini, penulis akan mengkaji dua penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemilu tahun 2013 di Kamboja, yang dapat dijadikan sebagai tinjauan dan masukan bagi penulis dalam proses pembuatan tulisan ini.

Tulisan pertama adalah penelitian Caroline Hughes dengan judul *“Understanding the Elections in Cambodia 2013”*. Secara umum, tulisan ini membahas fenomena penting yang terjadi pada pemilu tahun 2013, yaitu penurunan drastis perolehan kursi/suara CPP. Terkait dengan hal ini, Hughes menggarisbawahi beberapa hal penting yang mempengaruhi pilihan masyarakat Kamboja pada pemilu tahun 2013. *Pertama*, penurunan kinerja pemerintah, dilihat dari kebijakan ekonomi yang diambil oleh Hun Sen, yang secara garis besar terdiri dari kebijakan *economic land concession* (ELC) dan eksploitasi pekerja garmen. Menurut Hughes, kebijakan tersebut pada dasarnya berdampak baik terhadap stabilnya GDP Kamboja di angka 7,7%. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut

justru memperburuk kondisi kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi pekerja pabrik, petani, dan peternak — sehingga menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kedua, berkurangnya intimidasi politik yang dilakukan militer terhadap para pemilih, khususnya di wilayah urban. Menurut Hughes, intimidasi politik mulai tidak efektif untuk digunakan mengingat banyaknya pengawas internasional yang mengawasi jalannya pemilu. Meskipun kecurangan administratif masih banyak terjadi pada pemilu tahun 2013, namun dengan tidak adanya lagi iklim mencekam dalam pemilu, pemilih kini dapat memilih tanpa adanya tekanan dari pihak tertentu, khususnya militer.

Ketiga, perubahan demografis di Kamboja, yang mulai didominasi oleh pemilih muda. Hughes berpendapat bahwa kondisi ini menjadi kerugian tersendiri bagi CPP, mengingat pemilih muda menginginkan adanya perubahan dalam pemerintahan, karena banyaknya permasalahan yang ditimbulkan selama Hun Sen menjabat sebagai perdana menteri. Kecenderungan pemilih muda untuk memilih CPP-pun semakin kecil mengingat mereka tidak terpengaruh dengan propaganda yang diberikan CPP melalui media radio dan kepala desa, karena menurut Hughes hal tersebut hanya efektif dilakukan terhadap pemilih tua. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan tersebut telah gagal dalam merangkul pemilih muda.¹⁸

Berdasarkan penjabaran tersebut, penulis bersependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hughes, yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal penting yang melatarbelakangi kegagalan CPP dalam mempertahankan perolehan suara/kursi, sehingga harus mengalami kekalahan di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013. Hal-hal yang menjadi penyebab kekalahan tersebut meliputi penurunan kinerja pemerintahan Hun Sen terutama pada periode 2008-2013, berkurangnya intimidasi politik yang dilakukan militer CPP terhadap para pemilihnya, serta perubahan demografis di Kamboja yang kini mulai didominasi oleh pemilih muda. Ketiga hal tersebut akan penulis gunakan sebagai rujukan utama dalam melihat fenomena kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013.

¹⁸ Caroline Hughes, "Understanding the Elections in Cambodia 2013", *Journal of Area Based Global Studies*, Vol. 1, No. 1, (2014), hlm. 1-20.

Tulisan kedua adalah penelitian Kheang Un yang berjudul “*The Cambodian People Have Spoken: Has the Cambodian People’s Party Heard?*”. Tulisan ini juga membahas hal-hal penting yang terjadi menjelang diselenggarakannya pemilu tahun 2013, sehingga masyarakat cenderung memilih CNRP dibandingkan CPP. *Pertama*, permasalahan besar yang tidak dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Hun Sen. Permasalahan yang disebutkan Kheang Un tersebut meliputi korupsi, kesenjangan sosial, perampasan tanah, politisasi sumber daya alam, dan banyaknya imigran ilegal dari vietnam.

Kedua, perbedaan strategi dan isu kampanye yang dibawa oleh CPP dan CNRP. Menurut penulis, strategi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut jauh berbeda. Di satu sisi, CPP tidak memilih isu-isu penting yang sedang berkembang dalam masyarakat dalam strategi kampanyenya, namun justru mengangkat kembali isu Khmer Merah, yang hanya menunjukkan peran penting CPP pada masa lalu. Meskipun memiliki banyak media kampanye, namun akibat pengangkatan isu yang bersifat tidak strategis tersebut, maka banyak masyarakat yang cenderung untuk tidak memilih CPP pada pemilu tahun 2013. Di sisi lain, CNRP sebagai partai baru justru berhasil mendapat kepercayaan yang lebih dari masyarakat karena mengutamakan isu-isu yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Meskipun media kampanye yang digunakan CNRP terbatas, namun dengan kualitas isu kampanye yang diangkat, serta efektifitas media baru yang digunakan (internet), maka pemilih, khususnya yang berasal dari wilayah urban, lebih memberikan suaranya kepada CNRP pada pemilu tahun 2013.

Ketiga, perubahan demografis masyarakat Kamboja, yang menjadi kerugian besar bagi CPP. Menurut Kheang Un, potensi jumlah pemilih muda yang sudah mencapai angka 50% pada tahun 2013, tidak dimanfaatkan dengan baik oleh CPP. Dalam hal ini, CPP justru mengangkat isu Khmer Merah, yang dimana pemilih muda tidak mengetahui ataupun merasakan peran penting CPP kala itu dalam membebaskan kejahatan genosida di Kamboja. Sebaliknya, pemilih muda justru hanya merasakan banyaknya permasalahan yang timbul selama masa kepemimpinan Hun Sen. Kondisi tersebut semakin menguatkan alasan pemilih muda untuk tidak memilih CPP pada pemilu 2013.¹⁹

¹⁹ Kheang Un, *Op. Cit.*, hlm. 103-116.

Seperti halnya tulisan Hughes, tulisan ini juga fokus untuk mengkaji hal-hal yang melatarbelakangi penurunan suara CPP pada pemilu tahun 2013. Terdapat dua irisan pemikiran yang terdapat dari tulisan Hughes dan Kheang Un, yaitu sama-sama menganggap kinerja pemerintah dan perubahan demografis dapat mempengaruhi pilihan masyarakat Kamboja. Namun, terdapat satu hal penting yang tidak ditemukan dalam penelitian Hughes, yaitu perbedaan strategi dan isu kampanye yang digunakan oleh CPP dan CNRP. Sejalan dengan pandangan Kheang Un, penulis juga berpendapat bahwa kurang efektifnya strategi dan isu kampanye yang digunakan oleh CPP membuat banyak pemilih mulai beralih untuk memilih CNRP, yang telah berhasil menggunakan strategi kampanyenya dalam menjaring banyak pemilih baru pada pemilu tahun 2013.

Berdasarkan dua tulisan yang telah dijabarkan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa terdapat tiga hal penting yang mempengaruhi pilihan masyarakat Kamboja, sehingga perolehan kursi/suara CPP mengalami penurunan drastis pada pemilu tahun 2013, yaitu: kinerja pemerintahan Hun Sen yang buruk dilihat dari banyaknya permasalahan yang muncul, perbedaan strategi dan isu kampanye yang diambil oleh CPP dan CNRP, serta berkurangnya intimidasi militer yang dilakukan CPP akibat kehadiran pengawas pemilu internasional. Meskipun penjabaran sebelumnya menyebutkan bahwa terdapat empat hal penting yang mempengaruhi pilihan masyarakat, dalam tulisan ini penulis akan menggabungkan faktor strategi dan isu kampanye dengan faktor perubahan demografis menjadi satu mengingat kedua hal tersebut saling berkaitan. Ketiga hasil analisis tersebut akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini. Berbeda dengan penelitian Hughes dan Kheang Un, dalam tulisan ini penulis tidak ingin melihat ketiga analisis tersebut dalam skala nasional. Tulisan ini hanya ingin menguji dan menganalisis ketiga hal tersebut dalam ruang lingkup wilayah urban Kamboja saja (Kampong Cham, Phnom Penh, Prey Veng, dan Kandal), mengingat permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah kekalahan CPP di empat wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013.

1.5 Kerangka Teori dan Konseptual

1.5.1 Dominant Party Authoritarian Regimes

Tulisan ini menggunakan teori *Dominant Party Authoritarian Regimes* dari Kenneth Greene dalam menjelaskan fenomena kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013. Landasan dari teori ini merupakan konsep *Competitive Authoritarianism* yang dikemukakan oleh Stevan Levitsky dan Lucan Way. Konsep ini merupakan bagian dari *Electoral Authoritarianism*.²⁰ Levitsky dan Way menjelaskan *Competitive Authoritarianism* sebagai sebuah rezim sipil yang memiliki institusi demokratis resmi dan secara luas dipandang sebagai sarana utama untuk mendapatkan kekuasaan — tetapi rezim ini melegalkan partai pemerintah untuk menyalahgunakan kekuasaannya sehingga mereka berada di posisi yang lebih untung dibandingkan dengan pihak oposisi. Keduanya berpendapat bahwa rezim ini bersifat kompetitif — dimana partai oposisi dapat menggunakan institusi demokratis (pemilu) untuk memperoleh kekuasaan (kursi pemerintahan). Meskipun pada kenyataannya tujuan partai oposisi tersebut sulit untuk terealisasi mengingat kuatnya posisi partai pemerintah.²¹

Lebih lanjut, Levitsky dan Way menjelaskan tiga karakteristik utama yang dimiliki oleh rezim otoriter kompetitif, sehingga rezim ini berbeda dengan rezim demokratis maupun otoriter pada umumnya. *Pertama*, karakteristik penyelenggara pemilu, yang dinilai paling terpenting dalam membedakan rezim otoriter kompetitif dengan rezim lainnya. Berbeda dengan rezim lainnya, dalam rezim otoriter kompetitif, partai pemerintah dapat menggunakan berbagai kekuatan negara untuk memenangkan pemilu — seperti kekerasan atau intimidasi, media yang bias, kecurangan dalam pemilu — namun dalam rezim ini, pemilu dapat secara rutin

²⁰ Menurut Schedler, *electoral authoritarianism* merupakan bentuk baru dari otoritarian, yang menggabungkan unsur prosedur pemilu dan nilai-nilai otoriter. Rezim ini memiliki beberapa karakteristik, seperti menggunakan sistem multi partai, hak pilih bagi seluruh masyarakat, dan memperbolehkan oposisi untuk berkompetisi untuk memperoleh kekuasaan — namun partai/pemimpin pemegang kekuasaan dapat memanipulasi pemilu dengan keunggulan yang dimiliki. Meskipun memiliki beberapa unsur demokrasi, namun karena adanya unsur manipulasi, Schedler berpendapat bahwa rezim ini tidak dapat dikatakan demokratis. Lebih lanjut lihat Andreas Schedler, *Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition* (Boulder CO: Lynne Rienner, 2006), hlm. 3-5.

²¹ Levitsky dan Way sepakat mendeskripsikan rezim ini sebagai “kompetisi yang nyata namun tidak adil” (*competition is real but unfair*). Lihat Steven Levitsky dan Lucan Way, *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War* (New York: Cambridge University Press, 2010), hlm. 5.

diselenggarakan, dan partai oposisi juga memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam pemilu. Oleh karena itu, dalam rezim ini, hasil pemilu tidak selalu dimenangkan oleh partai pemerintah mengingat partai oposisi juga memiliki potensi untuk memenangkan pemilu.²² *Kedua*, karakteristik kebebasan sipil. Dalam rezim otoriter kompetitif, kebebasan sipil diperbolehkan untuk dilakukan (kebebasan berpendapat dan independensi media), meskipun kebebasan tersebut tidak diproteksi oleh negara, sehingga hal tersebut berujung pada banyaknya intimidasi dan kekerasan yang terjadi. *Ketiga*, karakteristik lapangan yang tidak adil (*uneven playing field*). Levitsky dan Way membagi ketidakadilan tersebut dilihat dari tiga hal, yaitu: (1) akses terhadap sumber daya, dimana rezim berkuasa diuntungkan akses sumber daya negara yang dimilikinya untuk mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya dari pihak oposisi; (2) akses terhadap media massa, dimana partai oposisi tidak memiliki akses media yang digunakan sebagai sarana kampanye, mengingat dalam rezim ini partai berkuasa memonopoli hampir seluruh akses media massa; dan (3) akses terhadap hukum, dimana dalam rezim otoriter kompetitif, pengadilan, otoritas pemilu, dan pihak independen lainnya di kontrol oleh rezim berkuasa dengan menggunakan penyuapan, kooptasi, atau intimidasi.²³

Tabel 1.3 Perbandingan Rezim Demokratis, Otoriter Kompetitif, dan Otoriter Penuh

Variabel	Demokrasi	Otoriter Kompetitif	Otoriter Penuh
Status Inti Institusi Demokratis (pemilu dan kebebasan sipil)	<ul style="list-style-type: none"> • Diakui secara sistematis. • Dipandang sebagai satu-satunya cara untuk meraih kekuasaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada dan sangat berarti, namun secara sistematis dilanggar oleh pihak penguasa. • Dipandang sebagai cara utama untuk meraih kekuasaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada atau hampir tidak ada. • Tidak dipandang sebagai jalan untuk meraih kekuasaan

²² *Ibid.*, hlm. 6-8.

²³ *Ibid.*, hlm. 9-12.

Variabel	Demokrasi	Otoriter Kompetitif	Otoriter Penuh
Status Oposisi	<ul style="list-style-type: none"> Berkompetisi secara kurang lebih adil dengan pihak penguasa 	<ul style="list-style-type: none"> Berkompetisi secara legal dan terbuka, namun berada di posisi yang tidak menguntungkan karena kecurangan pihak penguasa 	<ul style="list-style-type: none"> Dilarang dan ditahan untuk berkompetisi
Tingkat Ketidakpastian (Hasil Pemilu)	<ul style="list-style-type: none"> Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Di antara demokrasi dan otoriter penuh 	<ul style="list-style-type: none"> Rendah

Sumber: Steven Levitsky dan Lucan Way, *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War* (New York: Cambridge University Press, 2010), hlm. 5.

Konsep yang dikemukakan oleh Levitsky dan Way tersebut dikembangkan oleh Kenneth Greene dalam sebuah penelitiannya yang mencoba menganalisis dominasi *Institusional Revolutionary Party* (PRI) dalam pemilu Meksiko selama kurang lebih 71 tahun. Dalam penelitiannya tersebut, ia mengembangkan konsep Levitsky dan Way tersebut menjadi sebuah teori bernama *Dominant Party Authoritarian Regimes*. Pada prinsipnya, keduanya sama-sama menjelaskan bagaimana karakteristik pemilu di sebuah negara yang menganut rezim otoriter kompetitif. Namun, penelitian Greene tidak hanya terpaku pada penjelasan bagaimana implementasi pemilu dalam sebuah rezim otoriter kompetitif, tetapi juga menjelaskan mengapa sebuah partai pemerintah (PRI) dapat mengalami kekalahan dalam pemilu, sehingga berdampak pada kemenangan bersejarah yang diraih oleh partai oposisi.²⁴

Dalam menjelaskan fenomena tersebut, Greene berpendapat bahwa runtuhnya dominasi PRI tersebut dilatarbelakangi oleh dua kondisi penting yang terjadi di Meksiko. *Pertama*, kegagalan kebijakan pemerintah Meksiko, yang dipimpin oleh PRI, sehingga menimbulkan permasalahan negara khususnya dalam bidang ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari krisis ekonomi yang melanda Meksiko tahun 1982 dan kemudian tahun 1994. Greene menilai pemerintah Meksiko saat itu gagal dalam menyelesaikan krisis karena telah membiarkan hutang luar negeri

²⁴ Kenneth Greene, *Why Dominant Parties Lose: Mexico's Democratization Comparative Perspective* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hlm. 1-31.

negara membengkak, sehingga membuat perekonomian dalam negeri dan kurs mata uang Peso semakin memburuk. Hal tersebut membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi menurun. Kondisi tersebut semakin diperburuk setelah PRI gagal mempertahankan monopolinya terhadap sumber daya Meksiko (terutama keuangan), sehingga membuat kondisi PRI semakin tidak stabil hingga menjelang pemilu.²⁵ Kedua, strategi kemenangan yang dilakukan partai oposisi. Kondisi ini berkaitan dengan bagaimana partai oposisi (PRD) dapat memanfaatkan keadaan buruk yang sedang dialami oleh PRI menjelang diselenggarakannya pemilu. Dalam hal ini, PRD yang memilih untuk bertarung — dan tidak berkoalisi— dengan PRI pada pemilu tahun 2000, berhasil memobilisasi mayoritas masyarakat Meksiko (terutama yang beraliran moderat) untuk memilih partai oposisi, melalui berbagai strategi kampanye yang digunakan, seperti media televisi dan pengangkatan isu ekonomi. Kondisi tersebut pada akhirnya membuat PRI mengalami kekalahan perdana sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu di Meksiko. Meskipun PRI memiliki keuntungan lebih besar (dapat menggunakan cara otoriter) dari pihak oposisi berkaca pada karakteristik rezim otoriter kompetitif di Meksiko, Greene menyatakan bahwa kasus pemilu tahun 2000 di Meksiko dapat membuktikan bahwa keuntungan tersebut tidak menjamin partai pemerintah (PRI) untuk terus menerus memenangkan pemilu.²⁶

Berdasarkan penjabaran tersebut, teori ini akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang penulis angkat dalam tulisan ini. Sesuai dengan isi teori tersebut, penulis berargumen bahwa pemerintahan Kamboja saat ini dapat dikategorikan sebagai *Competitive Authoritarianism*, dimana hal tersebut dapat terlihat dari kesesuaian tiga karakteristik yang ditawarkan oleh Levitsky dan Way, khususnya dalam ranah pemilu. Dalam hal ini, meskipun Kamboja menyelenggarakan pemilu (institusi demokratis), namun faktanya penyelenggaraan pemilu di Kamboja tetap tidak luput dari adanya penggunaan unsur otoriter oleh CPP, seperti kecurangan administrasi pemilu (perhitungan suara), *vote buying*, dan intimidasi politik. Selain konsep tersebut, penulis juga menggunakan teori

²⁵ Ketidakstabilan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh PRI sebagian besar disebabkan oleh efek jangka panjang yang disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda Meksiko. Lebih lanjut lihat *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Dominant Party Authoritarian Regimes dari Grenee untuk menganalisis fenomena kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013. Penggunaan teori tersebut dalam tulisan ini didasarkan oleh kesamaan karakteristik yang terdapat di Meksiko maupun Kamboja. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya partai pemerintah yang sangat lama berkuasa (PRI dan CPP), rezim dan sistem pemilu yang diterapkan (otoriter kompetitif), cara otoriter yang digunakan oleh partai pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan, dan sebuah partai oposisi (PRD dan CNRP) yang dapat ikut berkompetisi dalam pemilu. Namun, kesamaan karakteristik terpenting yang diperlihatkan dalam dua kasus tersebut adalah peristiwa dan kondisi penting yang terjadi di masing-masing negara sebelum fenomena kekalahan partai pemerintah terjadi, yaitu kebijakan dan kinerja pemerintah (yang menyebabkan krisis ekonomi) dan strategi yang dilakukan oleh oposisi dalam memobilisasi suara masyarakat. Atas dasar argumen tersebut, maka teori ini layak untuk digunakan untuk menganalisis fenomena kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013.

Untuk menyempurnakan teori dari Greene tersebut, juga digunakan konsep *International Election Observation* yang diungkapkan dalam tulisan Thomas Carothers. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan satu argumen terakhir penulis, namun hal tersebut tidak disinggung dalam teori Greene, yaitu peran yang dimiliki oleh aktor internasional dalam bentuk pengamat atau pengawas pemilu internasional, yang berhasil menurunkan intimidasi politik di wilayah urban Kamboja. Menurut Carothers, berdasarkan penelitiannya di beberapa negara (demokratis maupun otoriter), pengawas pemilu internasional memiliki fungsi penting terhadap penyelenggaraan pemilu yang diintervensinya, dimana kelompok ini tidak hanya dapat mendeteksi berbagai kecurangan yang terjadi dalam sebuah pemilu, namun juga dapat menghalangi aktor yang terlibat dalam pemilu untuk berbuat kecurangan.²⁷ Jika pengawas internasional sudah terstruktur dengan baik, maka menurut Carothers, kelompok ini dapat membantu proses pemilu di sebuah negara transisional. Dalam hal ini, pengawas internasional dapat menghimbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Selain itu, pengawas

²⁷ Namun, menurut Carothers, kondisi tersebut jarang sekali ditemukan mengingat kurangnya kualitas pengamat dan terganjal ijin dari otoritas bersangkutan.

internasional juga dapat membuat iklim pemilu yang aman bagi masyarakat, sehingga dapat mencegah pihak tertentu (terutama militer) untuk melakukan intimidasi dan represi terhadap masyarakat.²⁸ Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengawas internasional memiliki peranan penting dalam sebuah penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam meminimalisir adanya kecurangan dan membentuk iklim aman. Kondisi tersebut terealisasi dalam studi kasus Kamboja, dimana penyelenggaraan pemilu di wilayah urban cenderung berjalan lebih aman karena adanya pengawasan yang dilakukan aktor internasional, sedangkan penyelenggaraan pemilu di wilayah rural cenderung berjalan intimidatif dan penuh kecurangan karena ketidakhadiran pengawas internasional. Perbedaan tersebutlah yang pada akhirnya membuat masyarakat urban Kamboja dapat memilih dalam pemilu dengan adanya rasa aman tanpa adanya tekanan dari pihak militer. Dengan tambahan konsep ini, maka ketiga argumen yang telah dibangun oleh penulis sebelumnya —dalam melihat kekalahan CPP di wilayah urban pada pemilu tahun 2013— dapat dijelaskan dan dianalisis lebih lanjut oleh masing-masing teori/konsep yang digunakan.

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi permasalahan/fenomena yang berasal dari manusia maupun sosial.²⁹ Lebih lanjut, menurut Strauss dan Corbin, metode kualitatif juga digunakan untuk mendapatkan rincian kompleks terkait fenomena tersebut — yang tidak bisa dilakukan oleh metode kuantitatif.³⁰ Oleh karena itu, metode kualitatif menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena mampu memberikan analisis yang tajam dan detail dalam menjelaskan fenomena kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam proses penelitian kualitatif ini akan

²⁸ Thomas Carothers, "Observers Observed", *Journal of Democracy*, Vol. 8, No. 3, (1997), hlm. 17-31.

²⁹ John W Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among five tradition* (London: Sage Publication, 1998), hlm. 249.

³⁰ Straus dan Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (terj.) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 1-11.

melibatkan upaya mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dan mendalam dari partisipan, menganalisis data secara induktif, dan menafsirkan makna data.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan. *Pertama*, teknik pengumpulan data primer melalui metode wawancara mendalam (*indepth interview*). Teknik ini akan digunakan kepada lima kategori narasumber, yaitu: anggota partai CPP (pemerintah), anggota partai CNRP, pengamat politik Kamboja, pengawas pemilu (COMFREL), dan masyarakat urban. Wawancara mendalam ini nantinya akan dilakukan dengan menggunakan jenis pertanyaan terbuka dan wawancara semi terstruktur, sehingga didapatkan informasi yang lebih mendalam. *Kedua*, teknik pengumpulan data sekunder melalui studi literatur, khususnya yang berhubungan dengan hal-hal yang melatarbelakangi perubahan suara di wilayah urban Kamboja pada Pemilu tahun 2013. Secara spesifik, **Tabel 1.4** akan menjabarkan data yang diperlukan serta teknik pengumpulan data yang akan digunakan:

Tabel 1.4 Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data	Nama Narasumber	Informasi yang Diperoleh
Primer	<i>Indepth Interview</i>	Anggota Partai CPP	Thol Dina	<ul style="list-style-type: none"> Pandangan terhadap kekalahan CPP terhadap oposisi di wilayah urban
		Anggota Partai CNRP	Pich Sovann	<ul style="list-style-type: none"> Perbedaan isu dan strategi yang digunakan CNRP dalam memenangkan kursi di wilayah urban
		Pengamat Politik Kamboja	Meas Nee	<ul style="list-style-type: none"> Dinamika dan fenomena penting dalam pemilu Kamboja Peristiwa dan kondisi yang melatarbelakangi kekalahan CPP di wilayah urban pada pemilu tahun 2013

Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data	Nama Narasumber	Informasi yang Diperoleh
		Pengawas Pemilu (COMFREL)	Yong Kim Eng	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi pemilu di wilayah urban Kamboja Peristiwa yang terjadi selama pemilu berjalan hingga selesai
		Masyarakat Pemilih	Dam Sophat Rithy	<ul style="list-style-type: none"> Pandangan masyarakat terkait penurunan kinerja dan permasalahan pemerintahan Hun Sen Perbedaan isu dan strategi kampanye yang digunakan CPP dan CNRP Pandangan terkait intimidasi politik pada pemilu tahun 2013
		Literatur yang berkaitan dengan pemilu di Kamboja		<ul style="list-style-type: none"> Dinamika dan fenomena penting dalam pemilu di Kamboja Peristiwa dan kondisi yang melatarbelakangi kekalahan CPP di wilayah urban pada pemilu tahun 2013
Sekunder	<i>Literature Review</i>			

1.6.2 Metode Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, metode analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses menyusun, pengkategorian data, mencari pola, dengan tujuan untuk memahami maknanya. Keduanya berpendapat bahwa dalam sebuah penelitian kualitatif, perlu dilaksanakan empat tahapan analisis, yaitu:

1. **Reduksi data.** Pada tahap ini, dilakukan pengujian relevansi data dengan tujuan penelitian, yaitu: untuk mengetahui peristiwa dan kondisi yang melatarbelakangi kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013. Data yang didapat, baik dari hasil wawancara maupun studi literatur, diringkas, disusun lebih sistematis, serta menonjolkan pokok pentingnya.

2. **Display data.** Pada tahap ini, penulis akan mengklasifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan, yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub-pokok permasalahan. Sesuai dengan teori *Dominant Party Authoritarian Regimes* dan konsep *International Election Observation* yang digunakan, maka sub-pokok penelitian ini akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu: rezim otoriter kompetitif di Kamboja dan dominasi CPP pada pemilu tahun 1998-2008 serta analisis kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013.
3. **Penarikan kesimpulan.** Pada tahap ini, penulis akan menemukan benang merah dari seluruh pembahasan serta menjawab pertanyaan penelitian — dimana jika dihubungkan dengan tulisan ini, dapat diidentifikasi peristiwa dan kondisi yang melatarbelakangi kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013.
4. **Verifikasi data.** Pada tahap ini, penulis akan melihat kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar penelitian. Setelah pengolahan data dilakukan, maka dapat dilihat bahwa teori *Dominant Party Authoritarian Regimes* dan konsep *International Election Observation* dapat menjelaskan kondisi penerapan pemilu di Kamboja yang menggunakan nilai-nilai otoriter, serta dapat menjelaskan juga peristiwa dan kondisi yang melatarbelakangi kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013.³¹

1.7 Asumsi Penelitian

Dalam tulisan ini, diasumsikan bahwa perilaku memilih masyarakat dalam negara otoriter —khususnya otoriter kompetitif— tidak dapat dianalisis secara lebih mendalam, karena adanya tekanan, propaganda, dan intimidasi yang dilakukan oleh partai pemerintah. Kondisi tersebut pada akhirnya membuat pilihan masyarakat tidak sepenuhnya bersifat rasional —tidak sepenuhnya berasal dari pilihan sendiri— mengingat pengaruh besar dari luar yang diberikan oleh partai pemerintah. Berangkat dari asumsi tersebut, maka dalam tulisan ini penulis ingin melihat peristiwa dan kondisi penting (eksternal) yang terjadi di Kamboja dalam

³¹ Matthew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif penerjemah Tjejep Rohendi* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 18.

mempengaruhi pilihan masyarakat urban, sehingga pada tahapan berikutnya menyebabkan kekalahan perdana CPP di wilayah urban pada pemilu tahun 2013.

1.8 Kerangka Alur Berpikir

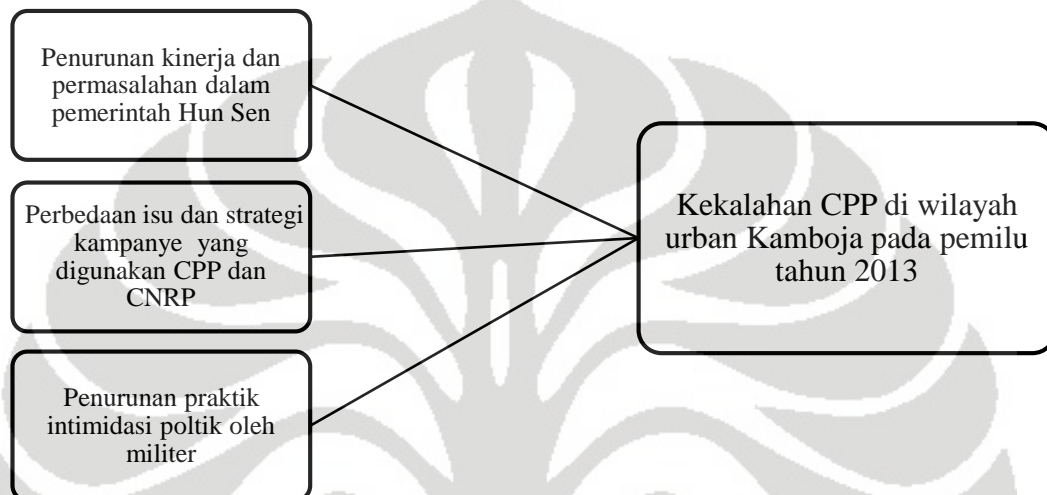
Bagan 1.1 merupakan gambaran kerangka alur berpikir yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Kerangka ini diawali dengan tiga peristiwa dan kondisi penting yang terjadi di Kamboja dalam mendorong kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013. *Pertama*, penurunan kinerja dan permasalahan dalam pemerintahan Hun Sen, khususnya pada periode pemerintahan 2008-2013. Dalam argumen ini, penulis melihat bahwa sikap dan kebijakan yang dibuat oleh Hun Sen pada periode tersebut justru berdampak buruk dan menimbulkan banyak permasalahan bagi masyarakatnya. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan yang diambil dalam mengatasi krisis (kebijakan ekonomi dan *land grabbing*), tingginya tingkat korupsi, dan kasus pelanggaran HAM di Kamboja, khususnya menjelang bergulirnya pemilu tahun 2013. Kondisi buruk tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintahan Hun Sen, sehingga masyarakat Kamboja —khususnya yang berada di wilayah urban— cenderung memilih partai oposisi pada pemilu tahun 2013.

Kedua, perbedaan isu dan strategi kampanye yang digunakan oleh CPP dan CNRP pada masa kampanye pemilu tahun 2013. Dalam argumen ini, penulis melihat bahwa pemilihan isu dan strategi kampanye yang dibawa oleh masing-masing partai dapat mempengaruhi pilihan akhir masyarakat Kamboja. Dalam hal ini, CNRP yang membawa isu terkait kesejahteraan masyarakat —dengan menggunakan strategi langsung maupun media internet— berhasil memobilisasi banyak pemilih Kamboja, khususnya pemilih muda dan yang berasal di wilayah urban.

Ketiga, penurunan intimidasi politik oleh militer. Dalam argumen ini, penulis melihat bahwa keberadaan pengawas pemilu internasional yang berada di wilayah urban Kamboja dapat meminimalisir kecurangan pemilu dan membuat rasa aman kepada para pemilih, sehingga pemilih di wilayah urban dapat memilih tanpa adanya tekanan. Hal tersebut pada akhirnya membuat masyarakat urban tidak takut untuk memilih partai alternatif dari CPP, sehingga memberikan kemenangan bagi CNRP di wilayah urban pada pemilu tahun 2013.

Tulisan ini berargumen bahwa setelah ketiga kondisi tersebut terjadi di wilayah Kamboja, maka pada tahapan/proses selanjutnya —dalam kerangka alur berpikir— CPP harus mengalami kekalahan perdana atas CNRP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013. Kerangka alur berpikir tersebut akan penulis gunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis pada pembahasan tulisan ini.

Bagan 1.1 Kerangka Alur Berpikir



1.9 Sistematika Penulisan

Dalam membahas fenomena kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013, tulisan ini terbagi ke dalam empat bab, yang terdiri atas:

BAB 1 PENDAHULUAN. Pada bab pertama ini, penulis akan mencantumkan latar belakang masalah, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, asumsi penelitian, kerangka alur berpikir, serta sistematika penulisan.

BAB 2 REZIM OTORITER KOMPETITIF DI KAMBOJA DAN DOMINASI CAMBODIA PEOPLE'S PARTY PADA PEMILU TAHUN 1998-2008. Pada bab kedua ini, penulis akan terlebih dahulu membahas rezim otoriter di Kamboja, sesuai dengan konsep yang diungkapkan oleh Levitsky dan Way. Selanjutnya, penulis akan menjabarkan sejarah dan karakteristik penyelenggaraan pemilu di Kamboja, khususnya sejak intervensi yang dilakukan oleh UNTAC pada pemilu tahun 1993. Terakhir, dalam bab ini, akan dijelaskan dominasi yang diperlihatkan CPP dalam pemilu periode 1998-2008. Penjelasan tersebut juga

berkaitan dengan strategi otoriter yang digunakan CPP, yaitu strategi *vote buying*, strategi intimidasi politik, penyalahgunaan sumber daya negara, dan kecurangan administratif pemilu, sehingga pada akhirnya memudahkan jalan CPP untuk mengalahkan para kompetitornya hingga pemilu tahun 2008.

BAB 3 ANALISIS KEKALAHAN *CAMBODIA PEOPLE'S PARTY* DI WILAYAH URBAN PADA PEMILU TAHUN 2013. Pada bab ketiga ini, penulis akan terlebih dahulu menjabarkan hasil pemilu tahun 2013, dimana CNRP secara mengejutkan dapat mengalahkan dominasi CPP di wilayah urban Kamboja. Pembahasan bab ini akan dilanjutkan dengan hasil analisis penulis terkait peristiwa dan kondisi penting yang terjadi di Kamboja, sehingga pada tahapan berikutnya membawa kepada fenomena kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013. Analisis tersebut akan dilakukan berdasarkan teori *Dominant Party Authoritarian Regimes* dari Greene, konsep *International Election Observation* dari Carothers, hasil wawancara dan temuan lapangan, serta kajian literatur yang digunakan dalam tulisan ini.

BAB 4 KESIMPULAN. Pada bab terakhir, akan disajikan kesimpulan dan analisis akhir penelitian, yang didalamnya terdapat jawaban dari pertanyaan penelitian, serta hasil analisis teori dan konsep yang digunakan.

BAB 2

REZIM OTORITER KOMPETITIF DI KAMBOJA DAN DOMINASI *CAMBODIA PEOPLE'S PARTY* PADA PEMILU TAHUN 1998-2008

Dalam bab ini, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan secara umum rezim otoriter di Kamboja, sesuai dengan konsep *Competitive Authoritarianism* yang dikemukakan oleh Levitsky dan Way. Pembahasan bab ini dilanjutkan menuju sejarah dan karakteristik pemilu di Kamboja pada saat berada dalam rezim otoriter kompetitif, khususnya sejak intervensi yang dilakukan oleh UNTAC pada pemilu tahun 1993. Pada bagian terakhir, bab ini menyajikan pemaparan terkait dominasi yang diperlihatkan CPP pada pemilu periode 1998-2008, serta strategi otoriter yang digunakan —strategi *vote buying*, strategi intimidasi politik, penyalahgunaan sumber daya negara, dan kecurangan administratif pemilu— dalam memanfaatkan rezim otoriter kompetitif di Kamboja, sehingga pada akhirnya memudahkan jalan CPP untuk mengalahkan para kompetitornya hingga pemilu tahun 2008.

2.1 Rezim Otoriter Kompetitif di Kamboja

Dalam subbab ini penulis akan menjelaskan bagaimana implementasi rezim otoriter kompetitif di Kamboja. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam menganalisis hal tersebut, tulisan ini menggunakan konsep *Competitive Authoritarianism* yang dikembangkan oleh Levitsky dan Way. Secara garis besar, keduanya mendefinisikan rezim otoriter kompetitif sebagai rezim sipil yang memiliki institusi demokratis resmi dan secara luas dipandang sebagai sarana utama untuk mendapatkan kekuasaan — namun rezim ini juga memperbolehkan partai pemerintah untuk menyalahgunakan kekuasaannya sehingga mereka berada di posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pihak oposisi. Lebih lanjut, Levitsky dan Way memaparkan tiga karakteristik utama yang membedakan rezim otoriter kompetitif dengan rezim lainnya. *Pertama*, karakteristik dalam penyelenggaraan pemilu. Meskipun partai pemerintah dapat menggunakan berbagai kekuatan negara untuk memenangkan pemilu, namun partai oposisi dalam rezim ini diperbolehkan dan memiliki hak penuh untuk berkompetisi dalam pemilu. *Kedua*, karakteristik dalam kebebasan sipil. Dalam rezim otoriter kompetitif, meskipun kebebasan sipil diperbolehkan untuk dilakukan, namun kebebasan

tersebut tidak diproteksi dan dijamin oleh negara, sehingga kondisi tersebut berujung pada banyaknya intimidasi dan kekerasan yang terjadi terhadap kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat. *Ketiga*, ‘lapangan’ yang tidak menguntungkan bagi pihak oposisi. Selain dalam ranah pemilu, partai pemerintah juga memiliki kekuatan sumber daya negara lainnya yang tidak dimiliki oleh pihak oposisi, seperti akses terhadap sumber daya negara, akses terhadap media massa, dan akses terhadap hukum.³²

Lalu apakah ketiga karakteristik yang telah dijelaskan oleh Levitsky dan Way tersebut sesuai untuk menggambarkan rezim di Kamboja saat ini? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penulis berargumen bahwa ketiga karakteristik yang ditawarkan oleh Levitsky dan Way memiliki persamaan dengan realita rezim yang hingga saat ini sedang berjalan di Kamboja. *Pertama*, persamaan karakteristik dalam ranah penyelenggaraan pemilu. Sesuai dengan penjelasan yang diungkapkan oleh Levitsky dan Way, dalam penyelenggaraan pemilu di Kamboja, partai pemerintah diperbolehkan untuk menggunakan kekuasaannya agar berada di posisi yang lebih baik dibandingkan pihak oposisi, sehingga memudahkan mereka untuk memenangkan pemilu. Menurut Morgenbesser, CPP yang bertindak sebagai partai pemerintah, memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk melakukan tindakan otoriter terhadap kompetitornya dalam pemilu, seperti: kekerasan dan kecurangan administratif dalam pemilu.³³ Meskipun begitu, Kamboja yang menerapkan sistem multi partai, tetap memperbolehkan partai oposisi untuk ikut berkompetisi secara kompetitif dalam penyelenggaraan pemilu. Tercatat, sebanyak tujuh partai oposisi yang mengikuti pemilu tahun 2013.³⁴ Bahkan, salah satu dari partai oposisi tersebut, CNRP, berhasil memenangkan kursi mayoritas di wilayah urban Kamboja. Hal tersebut menjadi bukti bahwa partai oposisi dalam pemilu di Kamboja memiliki kemungkinan untuk memenangkan pemilu, meskipun partai pemerintah dalam

³² Penjelasan terkait konsep *competitive authoritarianism* dapat dilihat lebih lengkap dalam kerangka teori. Levitsky dan Way, *Op. Cit.*, hlm. 5-12.

³³ Morgenbesser, *Op. Cit.*, hlm. 1-38.

³⁴ Tujuh partai tersebut adalah: CNP (*Cambodian Nationality Party*), FUNCINPEC (*National United Front for an Independent, Neutral, Peaceful, and Cooperative Cambodia*), RDP (*Republican Democratic Party*), KEDP (*Khmer Economic Development Party*), KAPP (*Khmer Anti-Poverty Party*), CNRP (*Cambodian National Rescue Party*), dan LDP (*League for Democracy Party*). Lebih lanjut lihat COMFREL, *Op. Cit.*, hlm. 116.

rezim ini memiliki berbagai keunggulan untuk tetap terus mempertahankan kekuasaannya.

Kedua, persamaan karakteristik dalam ranah kebebasan sipil. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Levitsky dan Way, kebebasan sipil yang dimiliki oleh setiap masyarakat Kamboja tidak dilarang dan diperbolehkan oleh pemerintahnya. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa hukum internasional dan domestik yang mengatur tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dimiliki oleh masyarakat Kamboja secara keseluruhan.

Tabel 2.1 Hukum Internasional dan Domestik Tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Kamboja

Hukum/Peraturan	Isi
Article 19, The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)	“Setiap individu memiliki hak kebebasan berpendapat maupun berekspresi”
Article 19, The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)	“(1) setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan pendapat tanpa adanya intervensi; (2) setiap individu memiliki hak untuk berekspresi di tempat umum
Article 31, Constitution of Cambodia ³⁵	“(1) Kamboja mengakui dan menghormati hak asasi manusia seperti yang tertera dalam piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, serta kovenan yang berhubungan dengan HAM; (2) Masyarakat Khmer memiliki hak, kebebasan, dan tanggung jawab yang sama meskipun memiliki ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kepentingan politik, status sosial, kekayaan, ataupun situasi lainnya yang berbeda. Hak dan kebebasan yang dimiliki oleh masing-masing individual tidak boleh mengganggu kebebasan yang dimiliki oleh individu lainnya”
Article 41, Constitution of Cambodia	“Masyarakat Khmer memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pendapat pribadi, serta kebebasan pers, publikasi, dan berorganisasi. Tidak ada yang boleh menggunakan keuntungan ini untuk merendahkan derajat orang, serta mempengaruhi adat istiadat, masyarakat adat, perintah publik, dan keamanan nasional”

³⁵ Pasal 31 ini dibuat sebagai pengakuan pemerintah Kamboja terhadap piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta Kovenan yang berhubungan dengan HAM (UDHR dan ICCPR), Hak Perempuan, dan Hak Anak. Lebih lanjut lihat The Constitution of the Kingdom of Cambodia, diakses melalui <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kh/kh009en.pdf>.

Hukum/Peraturan	Isi
Article 80, Constitution of Cambodia	“Tidak boleh ada anggota majelis yang dituntut, ditahan, dan dipenjara karena mengungkapkan pendapatnya dalam bagian tugasnya. Penuntutan, penahanan, dan pemenjaraan hanya boleh dilakukan atas izin parlemen atau komite tetap parlemen”
Article 35, Constitution of Cambodia	“Seluruh masyarakat Khmer memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya negara”
Article 39, Constitution of Cambodia	“Masyarakat Kamboja dapat melaporkan, membuat pengaduan, dan mengajukan klaim terhadap setiap pelanggaran hukum oleh negara atau badan yang terikat selama masih menjalankan tugasnya”
Article 37, Constitution of Cambodia	“Masyarakat Kamboja memiliki hak untuk melakukan pemogokan dan demonstrasi yang tidak bersifat kekerasan”
Article 2, Law on Peaceful Assembly 2009	“Tujuan dari hukum ini adalah untuk memastikan kebebasan berekspresi masyarakat Khmer melalui <i>peacefully assembly</i> ”
Article 1, The Press Law 1995	“Peraturan ini menetapkan untuk memastikan kebebasan pers dan publikasi sesuai dengan pasal 31 dan 41 dari Konstitusi”

Sumber: Cambodian Center for Human Rights, *Cambodia Gagged: Democracy at Risk?* (Phnom Penh: CCHR, 2010), hlm. 4-13.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa 10 hukum/peraturan di Kamboja —khususnya pasal 31 dan 41 Konstitusi Kamboja— memperbolehkan masyarakat Kamboja untuk mengekspresikan dan mengemukakan pendapatnya di tempat umum. Namun, kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut tidak diberi jaminan keamanan oleh pemerintah Kamboja. Seperti yang telah diungkapkan oleh Levitsky dan Way sebelumnya, pemerintah Kamboja justru cenderung menghalangi dan membatasi kebebasan tersebut dengan menggunakan upaya intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh militer, karena alasan stabilitas keamanan negara.³⁶ Alhasil, berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Freedom House* tahun 2013, kebebasan sipil di Kamboja hanya diberi nilai 5/7 (buruk/tidak

³⁶ Pemerintah Kamboja menggunakan celah konstitusi untuk menjustifikasi tindakan represifnya terhadap kebebasan masyarakat. Salah satu celah yang digunakan adalah pasal 41 Konstitusi, dimana kebebasan berpendapat tidak boleh dilakukan jika mengganggu keamanan nasional. Dalam hal ini, pemerintah menganggap kebebasan tersebut sebagai bentuk ancaman keamanan nasional, sehingga tindakan represif oleh militer menjadi tindakan yang dilegitimasi dan dibutuhkan oleh pemerintah. Lebih lanjut lihat Cambodian Center for Human Rights, *Cambodia Gagged: Democracy at Risk?* (Phnom Penh: CCHR, 2010), hlm. 4-13.

bebas), sebagai akibat banyaknya tindakan represif yang dilakukan oleh militer terhadap kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat.³⁷

Ketiga, persamaan karakteristik dalam ‘lapangan’ yang tidak adil. Seperti apa yang diungkapkan oleh Levitsky dan Way, beberapa lapangan yang berada di Kamboja cenderung merugikan pihak oposisi karena kontrol penuh yang dimiliki oleh CPP. Dilihat dari akses sumber daya negara, pihak oposisi tidak memiliki akses yang sebanding dengan akses yang dimiliki oleh CPP. Selain keuangan negara, CPP seringkali menggunakan infrastruktur negara dan militer untuk kepentingan pribadi partai, khususnya dalam kampanye pemilu.³⁸ Posisi CPP yang terus menerus berada di pucuk pemerintahan Kamboja selama beberapa periode terakhir membuat mereka lebih mudah untuk memiliki kontrol penuh terhadap sumber daya tersebut, sehingga kondisi tersebut semakin mempersulit akses yang dimiliki oleh pihak oposisi.

Sementara itu, dilihat dari akses media massa. Meskipun partai oposisi memiliki akses terhadap media massa, namun akses tersebut sangat terbatas karena monopoli yang dilakukan oleh CPP. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh COMFREL, partai oposisi Kamboja secara keseluruhan hanya memiliki 3 dari 67 stasiun radio yang tersedia.³⁹ Selain itu, partai oposisi juga tidak memiliki akses sama sekali terhadap stasiun televisi di Kamboja, karena dimiliki dan dikontrol seutuhnya oleh CPP.⁴⁰ Kondisi tersebut tentunya mencerminkan betapa buruknya kebebasan pers di Kamboja. Hal tersebut diperkuat dengan adanya data *Press Freedom Index* (PRI) tahun 2013, dimana kebebasan pers di Kamboja berada pada peringkat 143 dari 176 negara, sehingga menjadikan Kamboja sebagai salah satu negara di dunia dengan kondisi kebebasan pers yang terburuk.⁴¹

³⁷ Freedom House, *Cambodia*, diakses melalui <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/cambodia> pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 2.39 WIB.

³⁸ COMFREL, *Op. Cit.*, hlm. 27-28.

³⁹ Tiga stasiun radion tersebut merupakan: FM 93,5 yang dimiliki oleh CNRP, serta FM 90 dan FM 90,5 yang dimiliki oleh FUNCINPEC. Selain itu, stasiun radio di Kamboja bersifat independen atau dimiliki oleh CPP. Lebih lanjut lihat *Ibid.*, hlm. 32.

⁴⁰ Meskipun tidak memiliki saluran televisi sendiri, namun partai oposisi tetap memiliki kesempatan untuk tampil di televisi. Di televisi negara (TVK), rata-rata semua partai memiliki kesempatan 10-15% untuk tampil. Namun untuk televisi yang dimiliki oleh CPP, partai oposisi hampir tidak bisa memiliki waktu tampil karena sangat didominasi oleh CPP. Lebih lanjut lihat *Ibid.*, hlm. 33.

⁴¹ Reporters Without Borders, 2013, “World Press Freedom Index 2013”, *Report*, hlm. 10.

Terakhir, dilihat dari akses terhadap hukum. Meskipun independensi peradilan di Kamboja telah diatur dalam pasal 109 Konstitusi, namun pada kenyataannya komisi yudisial di Kamboja tidak terlepas dari campur tangan pemerintah.⁴² Penelitian yang dilakukan oleh *Asian Human Right Commission* (AHRC) menyimpulkan bahwa hampir semua hakim dan jaksa yang berada di Kamboja memiliki hubungan dengan CPP. Tidak hanya itu, beberapa dari aktor tersebut juga diberikan posisi penting di dalam CPP. Kondisi tersebut tentunya merugikan pihak oposisi maupun masyarakat yang berupaya mendapatkan keadilan di komisi yudisial.⁴³ Ketidakadilan tersebut tergambarkan dari banyaknya kasus yang sangat merugikan oposisi maupun masyarakat, namun disisi lain menguntungkan CPP. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Freedom House*, banyaknya kasus penangkapan yang menimpa pihak oposisi (khususnya *lawmaker* CNRP) dan aktivis/jurnalis di Kamboja, menjadikan kondisi hukum di negara tersebut salah satu yang terburuk di Asia Tenggara, dengan nilai 3/16 (sangat buruk).⁴⁴

Tabel 2.2 Perbandingan Konsep Levitsky dan Way dengan Rezim di Kamboja

Variabel	Konsep <i>Competitive Authoritarianism</i> Levitsky & Way	Rezim di Kamboja
Karakteristik Pemilu	Partai pemerintah menggunakan berbagai kekuatan negara untuk memenangkan pemilu, namun partai oposisi dalam rezim ini diperbolehkan dan memiliki hak penuh untuk berkompetisi dalam pemilu	CPP sebagai partai pemerintah, memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk melakukan tindakan otoriter terhadap kompetitornya dalam pemilu, seperti kekerasan, kecurangan administratif dalam pemilu. Namun, Kamboja yang menerapkan sistem multi partai, tetap memperbolehkan partai oposisi untuk ikut berkompetisi secara kompetitif dalam pemilu

⁴² The Constitution of the Kingdom of Cambodia, *Op. Cit.*

⁴³ Asian Human Rights Commission. *Cambodia: Judicial Independence is the Key to Reducing Defamation Lawsuits Against Critics and Upholding Freedom Expression*. Dalam Cambodian Center for Human Rights, *Cambodia Gagged: Democracy at Risk?* (Phnom Penh: CCHR. 2010), hlm. 11.

⁴⁴ Berdasarkan data tersebut, hanya Myanmar (1) dan Laos (2) yang memiliki kondisi hukum yang lebih buruk dari Kamboja. Selain karena banyaknya pihak oposisi dan para aktivis yang dihukum karena melawan ketiadilan yang dilakukan oleh CPP, buruknya sistem hukum di Kamboja bisa dilihat dari berbagai aspek lainnya, seperti: sistem yang tidak efisien dan korup, kurangnya kualitas pengadil, dan banyaknya peristiwa penyiksaan narapidana. Lebih lanjut lihat Freedom House. *Op. Cit.*

Variabel	Konsep <i>Competitive Authoritarianism</i> Levitsky & Way	Rezim di Kamboja
Karakteristik Kebebasan Sipil	Kebebasan sipil diperbolehkan, namun tidak diproteksi dan dijamin oleh negara, sehingga kondisi tersebut berujung pada banyaknya intimidasi dan kekerasan yang terjadi terhadap kebebasan sipil	Kebebasan sipil di Kamboja diperbolehkan. Hal tersebut dilihat dari sepuluh hukum/peraturan yang mengatur tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat. Namun, pemerintah tidak menjamin dan bertanggung jawab terhadap kebebasan tersebut. Dengan alasan stabilitas dan keamanan negara, pemerintah cenderung membatasi kebebasan tersebut dengan upaya intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh militer
Karakteristik Lapangan yang tidak adil	Partai pemerintah memiliki kekuatan sumber daya yang tidak dimiliki oleh pihak oposisi, seperti akses terhadap sumber daya negara, akses terhadap media massa, dan akses terhadap hukum	Lapangan yang tidak adil di Kamboja dapat dilihat dari tiga hal: (1) CPP membatasi dan mengontrol penuh sumber daya negara yang dimiliki oleh negara (seperti infrastruktur dan keuangan) untuk kepentingan pribadi partai; (2) pembatasan akses media massa, akibat monopoli CPP; dan (3) intervensi lembaga hukum Kamboja

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Berdasarkan ketiga persamaan karakteristik tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa rezim yang saat ini sedang berjalan di Kamboja dapat dikategorikan sebagai otoriter kompetitif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Levitsky dan Way. Argumen yang dibangun tersebut diperkuat oleh beberapa penelitian sebelumnya yang menyimpulkan hasil yang serupa, seperti penelitian yang dilakukan oleh Morgenbesser dengan judul “*States, Neopatrimonialism, and Election: Democratisation in Southeast Asia*”, penelitian yang dilakukan oleh Duncan McCargo dengan judul “*Cambodia: Getting Away with Authoritarianism*”, dan penelitian yang dilakukan oleh Kheang Un dengan judul “*Cambodia: Moving away from Democracy?*”.⁴⁵ Meskipun ketiga penelitian tersebut memiliki alasan

⁴⁵ Lebih lanjut lihat Lee Morgenbesser. 2016, “*States, Neopatrimonialism, and Elections: Democratization in Southeast Asia*”, Griffith University, hlm. 1-38; Duncan McCargo, “*Cambodia: Getting Away with Authoritarianism?*”, *Journal of Democracy*, Vol. 16, No. 4, (2005), hlm. 98-112;

yang berbeda dalam melihat rezim otoriter kompetitif di Kamboja, namun penulis melihat bahwa alasan yang diberikan oleh masing-masing peneliti tersebut sudah mencakup ketiga karakteristik yang telah dipaparkan oleh Levitsky dan Way sebelumnya.

Sesuai dengan fokus pembahasan yang diangkat dalam tulisan ini, penulis tidak akan membahas rezim otoriter kompetitif di Kamboja secara keseluruhan. Tulisan ini hanya fokus untuk membahas salah satu unsur/karakteristik yang terdapat dalam rezim otoriter kompetitif di Kamboja, yaitu pemilu. Penulis akan membahas hal tersebut secara lebih mendalam pada pembahasan berikutnya.

2.2 Sejarah dan Sistem Penyelenggaraan Pemilu di Kamboja dalam Rezim Otoriter Kompetitif

Subbab ini secara khusus menjelaskan salah satu unsur/karakteristik yang ada di dalam rezim otoriter kompetitif di Kamboja, yaitu pemilu. Dalam memaparkan pembahasan ini, penulis akan menjelaskan secara umum sejarah dan karakteristik sistem pemilu yang digunakan oleh Kamboja, khususnya sejak pemilu tahun 1993, ketika Kamboja mulai memasuki era rezim otoriter kompetitif.

Dilihat dari konteks historis, penyelenggaraan pemilu di Kamboja mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang. Sebelum mengubah bentuknya menjadi Kerajaan Kamboja (*Kingdom of Cambodia*) seperti saat ini, negara ini telah menyelenggarakan pemilu sebanyak 10 kali.⁴⁶ Namun, karena penyelenggaraan pemilu pada periode tersebut masih belum terstruktur dengan baik dan tidak bersifat kompetitif (otoriter penuh), maka pada subbab ini penulis hanya akan membahas penyelenggaraan pemilu di Kamboja sejak terbentuknya Kerajaan Kamboja pada tahun 1993 hingga tahun 2008.⁴⁷

dan Kheang Un, "Cambodia: Moving Away from Democracy?", *Sage Journals*, Vol. 32, No. 5, (2011), hlm. 546-562.

⁴⁶ Penyelenggaraan pemilu tersebut terbagi ke dalam lima fase. *Pertama*, **masa kolonial**, tahun 1946, 1947, dan 1951. *Kedua*, **masa kerajaan Kamboja**, tahun 1955, 1958, 1962, dan 1966. *Ketiga*, **masa Republik Khmer**, tahun 1972. *Keempat*, **masa Demokratik Kampuchea**, tahun 1976. *Kelima*, **masa People's Republic of Kampuchea**, tahun 1983. Lebih lanjut lihat Michael Vickery dan Ramses Amer, 1996, "Democracy and Human Rights in Cambodia", *Report*, hlm. 3

⁴⁷ Vickery dan Amer berpendapat bahwa sistem pemilu yang diterapkan Kamboja sebelum tahun 1993 masih bersifat 'otoriter satu partai'. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak ketidakikutsertaan pihak oposisi dalam pemilu pasca kemerdekaan Kamboja, sehingga hanya satu partai yang berhak untuk menguasai pemerintahan Kamboja. Pengecualian terdapat pada pemilu 1955 dimana terdapat 7 partai yang berkompetisi dalam pemilu. Meskipun begitu, hanya satu partai (Sangkum) yang

Penyelenggaraan pemilu perdana di Kamboja, setelah kembali menggunakan sistem kerajaan, dilaksanakan pada bulan Mei 1993. Penyelenggaraan pemilu pertama di rezim otoriter kompetitif ini diawali oleh adanya Perjanjian Damai Paris (*Paris Peace Accords*) tahun 1991.⁴⁸ Dalam perjanjian tersebut, terdapat delapan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Kamboja. Salah satu tugas terpenting yang tertera dalam perjanjian tersebut adalah mengubah sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu.⁴⁹

*The Cambodian people shall have the right to determine their own political future through the free and fair election of a constituent assembly, which will draft and approve a new Cambodian Constitution in accordance with Article 23 and transform itself into a legislative assembly, which will create the new Cambodian Government. This election will be held under United Nations auspices in a neutral political environment with full respect for the national sovereignty of Cambodia*⁵⁰

Masyarakat Kamboja memiliki hak untuk menentukan masa depan politik mereka melalui pemilihan majelis konstituante yang bebas dan adil, yang akan dirancang dan disetujui dalam Konstitusi Kamboja yang baru sesuai dengan Pasal 23, serta mengubah majelis tersebut menjadi majelis legislatif (parlemen), yang akan menciptakan Pemerintahan Kamboja yang baru. Pemilu ini akan dilaksanakan dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di lingkungan politik yang netral dengan penuh penghormatan terhadap kedaulatan nasional Kamboja.

Berdasarkan hasil perjanjian tersebut, pemerintah Kamboja diharuskan untuk membuat konstitusi yang baru, mengubah lembaga legislatif, dan yang paling terpenting menyelenggarakan pemilu yang bersifat bebas dan adil. Dalam mengimplementasikan tugas tersebut, pemerintah Kamboja dibantu oleh salah satu badan yang dibentuk khusus oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu *The United Nations Transitional Authority in Cambodia* (UNTAC), melalui Resolusi

berhak menduduki pemerintahan Kamboja, karena berhasil mendapatkan seluruh kursi yang tersedia (91). Lebih lanjut lihat *Ibid.*, hlm. 3-4.

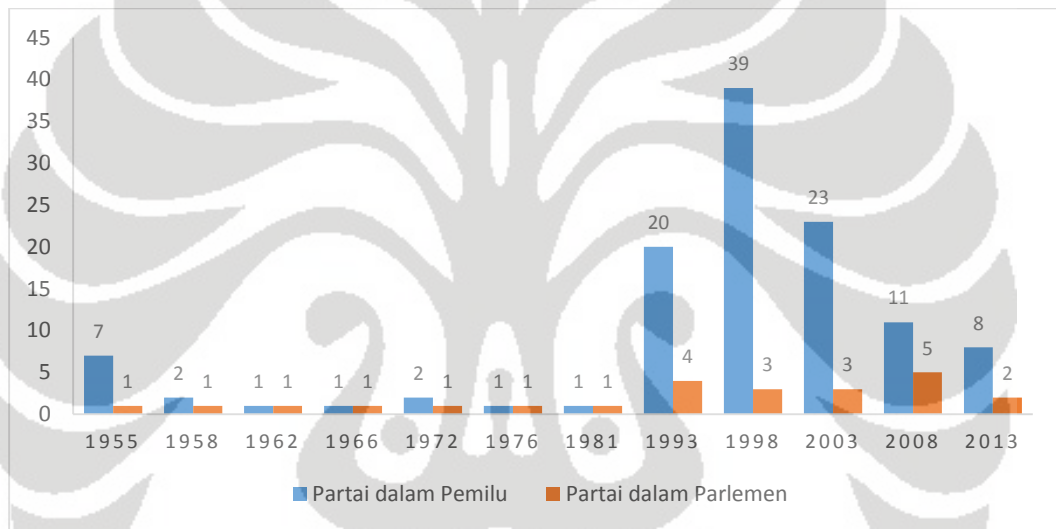
⁴⁸ Perjanjian tersebut dihadiri dan ditandatangani oleh empat pihak penting Kamboja, yaitu: pemerintah Kamboja, FUNCINPEC, KPNLF, dan Khmer Rouge. Dari pihak eksternal, perjanjian ini juga ditandatangani oleh 18 negara anggota PBB saat itu. Lebih lanjut lihat Catherine McKinley dan Kate Noble, *Country Case Study: Cambodia*. (London: BBC. 2012), hlm. 6

⁴⁹ Kedelapan hal tersebut terdiri dari pengaturan pada masa transisi, penyelenggaraan pemilu, hak asasi manusia, jaminan internasional, imigran dan pengungsi, pembebasan tahanan perang, prinsip kontitusi Kamboja, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

⁵⁰ United States Institute of Peace, *Peace Agreements Digital Collection*, Diunduh melalui file:///C:/Users/user/Downloads/KH_911023_Comprehensive%20Peace%20Agreement.pdf.

Dewan Keamanan PBB No 745 Tahun 1992.⁵¹ Sesuai dengan isi resolusi tersebut, UNTAC memiliki tujuan utama untuk mengembalikan perdamaian dan fungsi pemerintah sipil Kamboja yang telah dirusak pada masa berperang yang panjang — salah satunya dengan cara menyelenggarakan pemilu yang bersifat bebas dan adil.⁵² Demi mencapai tujuan tersebut, keberadaan UNTAC di Kamboja dibantu oleh 50.000 masyarakat sipil Kamboja beserta 15.900 militer, 3.400 polisi sipil, 2.000 masyarakat sipil, 450 sukarelawan PBB, dan dana sebesar US\$1.6 milyar yang berasal dari 45 negara anggota PBB.⁵³

Grafik 2.1 Perbandingan Jumlah Partai yang Berpartisipasi dalam Pemilu dan Parlemen Kamboja Sebelum dan Sesudah Tahun 1993



Sumber: COMFREL, 2013, “National Assembly Election, Final Assessment and Report”, *Report*, hlm. 75.

Penyelenggaraan pemilu tahun 1993 tersebut pada akhirnya dijadikan sebagai landasan dan dasar bagi pemerintah Kamboja untuk melaksanakan pemilu pada

⁵¹ UNTAC diketuai oleh Yasushi Akashi (Jepang), Komandan pasukan oleh John Sanderson (Australia), dan Komisioner polisi oleh Klaas Roos (Belanda). Badan ini dibubarkan oleh PBB setelah berhasil menyelenggarakan pemilu di Kamboja tahun 1993 dengan baik. Lebih lanjut lihat Trevor Findlay, *Cambodia: The Legacy and Lesson of UNTAC*. (New York: Oxford University Press, 1995), hlm. 26-36.

⁵² Selain menyelenggarakan pemilu, UNTAC juga diharuskan untuk menjalankan tugas pemerintahan Kamboja hingga terpilihnya pemimpin baru pada Pemilu tahun 1993. Tugas tersebut meliputi: urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan nasional, keuangan, memonitor kepergian tentara asing (Khmer Rouge), mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, memelihara hukum dan ketertiban, mengatur pengungsi, merehabilitasi infrastruktur negara, membantu rekonstruksi dan perkembangan ekonomi, serta mengadili pihak yang berkaitan dengan Khmer Rouge.

⁵³ Gareth Evans, “Peacekeeping in Cambodia: Lesson Learned”, *NATO Review*, Vol 42, No.2, (1994), hlm. 24-27.

periode berikutnya. Dalam hal ini, UNTAC dinilai telah berhasil mengubah pelaksanaan pemilu di Kamboja menjadi lebih baik. Jika berkaca pada pemilu sebelumnya, perubahan tersebut dapat dilihat jelas dari beberapa sistem yang mulai digunakan pada Pemilu tahun 1993. Perubahan tersebut pada akhirnya juga merubah sistem pemilu Kamboja yang sebelumnya bersifat otoriter penuh menjadi otoriter kompetitif, seperti apa yang dikemukakan oleh Levitsky dan Way.

Pertama, penerapan sistem multi-partai. Jika sebelumnya Kamboja menerapkan sistem partai tunggal, pada pemilu tahun 1993 Kamboja mulai mengganti sistem tersebut menjadi sistem multi-partai. Penerapan sistem tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah partai yang ikut berpartisipasi dalam pemilu dan parlemen sejak tahun 1993. Berdasarkan data **Grafik 2.1**, dapat dilihat sebuah tren peningkatan jumlah partai yang berpartisipasi sejak pemilu tahun 1993, jika dibandingkan dengan pemilu pada periode sebelumnya. Tidak hanya itu, penerapan sistem tersebut juga berdampak pada terbentuknya iklim kompetitif dalam pemilu, sehingga —tidak seperti pada pemilu sebelum tahun 1993— seluruh partai yang terdaftar sebagai peserta pemilu memiliki kesempatan untuk berkompetisi mendapatkan kursi di parlemen.⁵⁴ Karakteristik tersebut tentunya sesuai dengan penjelasan yang diungkapkan oleh Levitsky dan Way, dimana pemilu dalam rezim otoriter kompetitif lebih bersifat kompetitif dibandingkan dengan rezim otoriter penuh, karena setiap partai dalam rezim ini memiliki kesempatan untuk memenangkan pemilu.

Kedua, penerapan sistem proporsional tertutup (*list proportional representation*).⁵⁵ Menurut Aurel Croissant, dalam sistem ini jumlah kursi yang diterima oleh suatu partai harus proporsional dengan jumlah suara yang diterima oleh partai tersebut di setiap provinsi.⁵⁶ Dengan menggunakan sistem baru tersebut,

⁵⁴ Sebelum pemilu tahun 1993, Kamboja masih menerapkan sistem satu partai, sehingga hanya satu partai yang dapat berkuasa di parlemen. Banyak ahli yang mengatakan bahwa Kamboja pada tahun 2013 kini tidak lagi menganut sistem multi partai, namun sistem dua partai asimetris, karena hanya dua partai yang benar-benar menguasai parlemen di Kamboja. Lebih lanjut lihat COMFREL, *Op.Cit.*, hlm. 1-16.

⁵⁵ Selain mendekatkan proporsi jumlah kursi dan suara yang diterima oleh partai, sistem ini juga memiliki karakteristik tertutup, yaitu masyarakat tidak bisa secara spesifik memilih calon tertentu, sehingga masyarakat hanya dapat memilih partai peserta pemilu saja.

⁵⁶ Meskipun telah menggunakan sistem ini di hampir seluruh provinsi, namun terdapat beberapa provinsi yang masih menggunakan sistem lama (pluralitas), yaitu: provinsi Koh Kong, Mondulkiri, Ratanakiri, Sihanoukville, Strung Treng, Kep, Pailin, Oddar Meanchey dan Preah Vihear. Sistem plural yang masih digunakan hingga tahun 2013 dikarenakan jumlah kursi yang hanya satu di

maka Kamboja kini tidak lagi menggunakan sistem plural secara menyeluruh dalam pemilu, sehingga membuat partai yang suaranya relatif kecil-pun memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam parlemen. Dampak dari sistem tersebut dapat dilihat dari data **Tabel 2.3**, dimana sejak tahun 1993, presentase jumlah kursi yang didapat oleh setiap partai di Kamboja relatif proporsional dengan jumlah suara yang didapat oleh partai-partai tersebut secara keseluruhan. Kondisi tersebut berbeda jika berkaca pada pemilu sebelum tahun 1993, dimana dalam sistem plural, hanya partai pemerintah yang dapat menguasai parlemen, meskipun partai oposisi memiliki suara yang cukup untuk mendapat kursi di parlemen.⁵⁷ Perubahan sistem tersebut tentunya berdampak positif terhadap iklim kompetitif dalam pemilu di Kamboja, dimana dengan menggunakan sistem proporsional partai kecil memiliki kesempatan besar untuk memperoleh kursi di parlemen.

Tabel 2.3 Perbandingan Presentase Suara dan Kursi Parlemen di Kamboja pada Pemilu Tahun 1993-2013

Partai	1993		1998		2003		2008		2013	
	Suara	Kursi	Suara	Kursi	Suara	Kursi	Suara	Kursi	Suara	Kursi
CPP	38,2%	42,5%	41,4%	52,4%	47,3%	59,3%	58,1%	73,1%	48,83%	55,2%
CNRP	-	-	-	-	-	-	-	-	44,46%	44,8%
SRP	-	-	14,3%	12,3%	21,9%	19,5%	21,9%	21,1%	-	-
HRP	-	-	-	-	-	-	6,62%	2,4%	-	-
FUN	45,5%	48,3%	31,7%	35,3%	20,8%	21,1%	5,05%	1,7%	3,66%	0%
NRP	-	-	-	-	-	-	5,62%	1,7%	-	-
BLDP	3,8%	8,3%	0,9%	0%	-	-	-	-	-	-
MOU	1,4%	0,9%	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: COMFREL, 2013, "National Assembly Election, Final Assessment and Report", *Report*, hlm. 75.

sembilan provinsi tersebut, sehingga tidak efektif jika menggunakan sistem proporsional. Lebih lanjut lihat Aurel Croissant, *Electoral Politics in Cambodia: Historical Trajectories, Current Challenges, and Comparative Perspective* (Germany: Konrad Adenauer Stiftung, 2016), hlm. 8-10.

⁵⁷ Argumen tersebut dapat dibuktikan dari perbandingan hasil pemilu tahun 1955 dan 1993. Karena masih menggunakan sistem plural pada pemilu tahun 1955, maka *Democratic Party* yang mendapatkan 12,3% suara tidak sama sekali mendapatkan kursi dalam parlemen. Hal tersebut dikarenakan sifat sistem plural yang hanya melihat suara partai dominan dan menghilangkan suara partai yang kalah. Namun ketika Kamboja mulai mengganti sistem tersebut menjadi sistem proporsional, maka suara kecil-pun memiliki dampak yang besar dalam memperoleh kursi parlemen. Hal tersebut dapat dilihat dari peristiwa yang dialami oleh *Buddhist Liberal Democratic Party* (BDLC) pada pemilu tahun 1993. Meskipun hanya meraih 3,8% suara, secara mengejutkan partai ini dapat memperoleh 10 kursi dalam parlemen. Begitupun juga yang terjadi dengan Partai Moulinaka, dimana partai tersebut dapat meraih satu kursi meskipun hanya memperoleh 1,4% suara saja. Lebih lanjut lihat Aurel Croissant, *Electoral Politics in Southeast and East Asia: Comparative Perspective* (Singapore: Friedrich Ebert, 2002), hlm. 326-328.

Ketiga, pemberlakuan peraturan tentang pembentukan pemerintahan sendiri di Kamboja. Dalam konstitusi Kamboja baru, disebutkan bahwa sebuah partai dapat membentuk pemerintahannya sendiri selama periode lima tahun jika berhasil mengumpulkan 2/3 dari total kursi parlemen. Jika gagal mencapai jumlah tersebut, maka jalan keluar yang dapat ditempuh partai tersebut adalah membentuk koalisi dengan partai lain, khususnya partai yang sama-sama memiliki proporsi kursi yang banyak. Pembentukan koalisi tersebut nantinya akan mempermudah proses pembuatan kebijakan dalam parlemen Kamboja, mengingat pihak oposisi tidak memiliki kekuatan (kursi) yang cukup untuk menghentikan niat koalisi dalam menyusun sebuah kebijakan.⁵⁸ Kondisi tersebut berbeda jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu sebelum tahun 1993, dimana pemilu pada periode tersebut tidak menggunakan peraturan demikian, mengingat parlemen pada saat itu hanya dikuasai oleh satu partai saja. Seperti halnya dua perubahan sebelumnya, perubahan sistem ini juga memiliki dampak positif terhadap pihak oposisi, yang cenderung memiliki kekuatan yang lebih lemah dibandingkan dengan partai pemerintah. Dalam sistem ini, partai oposisi memiliki kesempatan untuk mengambil sikap di parlemen, jika partai pemerintah gagal mendapatkan 2/3 kursi parlemen, sehingga kehadiran posisi dan suara oposisi di parlemen sangat penting ketika perdana menteri (partai pemerintah) berupaya untuk merumuskan kebijakan.⁵⁹ Kondisi tersebut tentunya berbeda jika dibandingkan dengan rezim otoriter penuh, dimana kehadiran partai oposisi di parlemen tidak memiliki signifikansi berarti karena kekuatan besar yang dimiliki oleh partai pemerintah.

Tabel 2.4 Perbandingan Sistem Pemilu di Kamboja Sebelum dan Sesudah Pemilu 1993

Sistem/Karakteristik	Sebelum Pemilu 1993	Setelah Pemilu 1993
Sistem Partai	Menggunakan sistem partai tunggal, sehingga hanya satu partai yang menguasai parlemen	Menggunakan sistem multi partai, sehingga tidak hanya satu partai yang menguasai parlemen

⁵⁸ Women's Media Centre of Cambodia, 2012, "Cambodian Commune Council Election", *Report*, hlm. 4.

⁵⁹ Kondisi ini dapat dilihat pada pemilu tahun 1998. Pada saat itu, CPP gagal mendapatkan 2/3 jumlah kursi parlemen, meskipun berhasil menang terhadap partai oposisi terbesar pada saat itu, FUNCINPEC. Karena ingin membentuk pemerintahan, maka CPP dan FUNCINPEC akhirnya setuju untuk berkoalisi, sehingga pemerintahan Hun Sen saat itu dapat merumuskan berbagai kebijakan/peraturan di parlemen Kamboja.

Sistem/Karakteristik	Sebelum Pemilu 1993	Setelah Pemilu 1993
Sistem Pemilu	Menggunakan sistem plural	Menggunakan sistem proporsional tertutup (namun terdapat sebagian kecil provinsi yang masih menggunakan sistem plural)
Ketentuan Membentuk Pemerintah Sendiri	Tidak ada, karena parlemen hanya dikuasai oleh satu partai saja	Diperlukan 2/3 kursi parlemen. Jika tidak mencukupi, diharuskan untuk membentuk koalisi
Bentuk Rezim/Sifat Pemilu	Otoriter Penuh	Otoriter Kompetitif

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemilu di Kamboja pasca intervensi yang dilakukan oleh UNTAC tahun 1993. Perubahan yang dapat dilihat dari tiga sistem/karakteristik tersebut —sistem partai, sistem pemilu, dan ketentuan membentuk pemerintah sendiri— pada akhirnya berdampak positif terhadap implementasi pemilu di Kamboja. Perubahan positif tersebut dapat dilihat dari terbentuknya iklim/unsur kompetitif antar partai dalam pemilu, yang sebelumnya tidak pernah ada dalam pemilu di Kamboja. Dengan terbentuknya kondisi tersebut, maka pemilu di Kamboja sejak tahun 1993 tidak lagi dapat dikelompokkan sebagai pemilu yang bersifat otoriter penuh, karena pemilu pada periode tersebut lebih cocok dengan karakteristik otoriter kompetitif, seperti yang diungkapkan oleh Levitsky dan Way.

2.3 Dominasi CPP dalam Pemilu Kamboja Tahun 1998-2008

Subbab ini menyajikan pemaparan terkait dominasi yang diperlihatkan CPP dalam pemilu rezim otoriter kompetitif tahun 1998-2008. Pembahasan tersebut dimulai dengan terlebih dahulu menjabarkan perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh CPP, sebelum mencapai puncak kesuksesannya pada pemilu tahun 2008. Perjalanan tersebut dimulai ketika CPP terbentuk untuk pertama kalinya pada tahun 1951, dimana pada saat itu CPP masih dikenal dengan nama *Kampuchean People's Revolutionary Party* (KPRP). Meskipun sudah terbentuk sebelum kemerdekaan Kamboja, partai ini baru berpartisipasi dalam pemilu tahun 1981 ketika bentuk negara Kamboja berubah menjadi *People's Republic Kampuchea*

(PRK).⁶⁰ Dalam pemilu tersebut, KPRP berhasil memenangkan seluruh (117) kursi yang tersedia dengan perolehan suara sebanyak 3.209.377 (100%), sehingga menjadikan Pen Sovan sebagai Perdana Menteri Kamboja pada periode tersebut.⁶¹ Seiring dengan adanya perubahan dalam sistem pemilu Kamboja pada tahun 1993, KPRP-pun mengganti namanya menjadi CPP, seperti yang kita kenal saat ini. Meskipun memiliki modal kemenangan pada pemilu tahun 1981, CPP pada akhirnya gagal memenangkan pemilu tahun 1993 dengan hanya memperoleh kursi sebanyak 51 (38,2%), setelah kalah dari FUNCINPEC yang berhasil memperoleh 58 kursi (45,5%).⁶² Kendati gagal memperoleh kursi terbanyak pada pemilu tahun 1993, CPP tetap berhasil mendapatkan kekuasaan yang besar dalam pemerintahan Kamboja, mengingat Hun Sen —selaku presiden CPP— ditempatkan sebagai perdana menteri kedua Kamboja di bawah Norodhom Ranaridh.⁶³

Kemenangan yang diperoleh CPP pada akhirnya terwujud lima tahun berselang. Dilatarbelakangi oleh peristiwa kudeta militer terhadap Norodhom Ranaridh pada tahun 1997, CPP berhasil mengungguli perolehan kursi FUNCINPEC pada pemilu tahun 1998.⁶⁴ Nama FUNCINPEC yang telah buruk akibat peristiwa kudeta tersebut membuat mereka hanya mendapatkan 43 kursi (35,2%) pada

⁶⁰ Kekuasaan besar yang dimiliki oleh Norodhom Sihanouk, Lon Nol, dan Pol Pot (Khmer Rouge) memaksa KPRP untuk tidak dapat berpartisipasi dalam pemilu hingga tahun 1981.

⁶¹ Frank Frost, *The Cambodia Conflict* (Australia: Departement of the Parliamentary Library, 1991), hlm. 2.

⁶² FUNCINPEC merupakan partai kerajaan yang dibentuk oleh Norodhom Sihanouk pada tahun 1981. Pada saat memenangkan pemilu tahun 1993, FUNCINPEC dipimpin oleh anak dari Norodhom Sihanouk, Norodhom Ranaridh. Lebih lanjut lihat David Roberts, "The Cambodian Elections of 1993", *Electoral Studies*, Vol. 13, No. 2, (1994), hlm. 157-162.

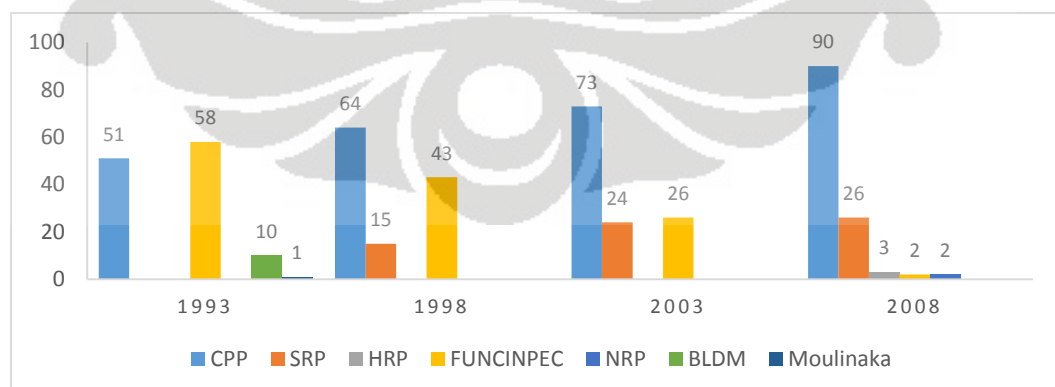
⁶³ Sistem dua perdana menteri hanya diterapkan di Kamboja pada pemilu tahun 1993, sebelum peraturan tersebut diganti pada pemilu tahun 1998. Lebih lanjut lihat Jeffrey Gallup. *Cambodia's Electoral System: A Window of Opportunity for Reform*. Dalam Aurel Croissant, *Electoral Politics in Southeast and East Asia: Comparative Perspective* (Singapore: Friedrich Ebert, 2002), hlm. 32.

⁶⁴ Kudeta tersebut diawali dengan meningkatnya tensi antara Hun Sen dan Ranaridh pada tahun 1996. Sejak saat itu, Hun Sen berupaya untuk meningkatkan kekuatan pasukan militernya. Meskipun tidak didukung oleh beberapa petinggi CPP — seperti Chea Sim (presiden CPP), Sar Kheang (Menteri dalam negeri), Tea Banh (Menteri pertahanan), dan Ke Kim Yan (Kepala angkatan bersenjata) — namun Hun Sen tetap melaksanakan kudetanya terhadap Ranaridh pada tahun 1997. Dalam kudeta ini, Ranaridh didakwa bersalah karena telah memasok senjata ilegal (meskipun dakwaan ini dianggap konspirasi Hun Sen). Meskipun harus diasingkan selama 9 bulan, pada akhirnya Ranaridh kembali ke Kamboja atas perintah Raja Sinhanouk. Lebih lanjut lihat Sue Downie, "Cambodia's 1998 Election: Understanding Why it Was Not a 'Miracle on the Mekong'", *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 54, No. 1, (2000), hlm. 43-58; dan HRW, *Cambodia: July 1997: Shock and Aftermath*, diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2007/07/27/cambodia-july-1997-shock-and-aftermath> pada tanggal 21 Maret 2017 pukul 12.17 WIB.

penyelenggaraan pemilu tersebut, sementara CPP berhasil mendapatkan 64 kursi (52,5%). Meskipun menang, perolehan kursi CPP tersebut tidak mencukupi jumlah yang diminta — $\frac{2}{3}$ dari total keseluruhan kursi parlemen Kamboja (81/122 kursi)— untuk membentuk pemerintahan sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pada akhirnya CPP dan FUNCINPEC sepakat untuk membentuk sebuah koalisi di parlemen, sehingga kedua partai tersebut dapat membentuk pemerintahan sendiri di Kamboja.⁶⁵

Sejak mencatatkan kemenangan pada pemilu tahun 1998, jalan CPP untuk memperoleh kemenangan di dua pemilu berikutnya-pun terasa tanpa hambatan. Tercatat, CPP berhasil mendapatkan masing-masing 73 dan 90 kursi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2003 dan 2008. Bahkan, pada pemilu 2008, CPP tidak perlu lagi untuk berkoalisi dengan FUNCINPEC untuk membentuk pemerintahannya sendiri, karena jumlah kursi yang diperoleh pada pemilu tersebut sudah mencukupi kuota $\frac{2}{3}$ jumlah kursi parlemen Kamboja yang diperlukan (82/123 kursi). Runtuhnya dominasi FUNCINPEC dan keputusan koalisi yang dilangsungkan dengan CPP, membuat tidak ada partai oposisi sepadan yang dapat menghadang dominasi CPP. Dari beberapa partai oposisi yang berkompetisi pada pemilu tahun 2003 dan 2008, hanya SRP yang dapat menandingi perolehan kursi CPP meskipun perolehan kursi tersebut hanya berjumlah sebanyak 26 kursi (21,9%).⁶⁶

Grafik 2.2 Jumlah Perolehan Kursi Partai di Kamboja pada Pemilu Tahun 1993-2008



Sumber: COMFREL, 2008, “2008 National Assembly Election”, *Report*, hlm. 64.

⁶⁵ COMFREL, 2008, “2008 National Assembly Election”, *Report*, hlm. 64-66.

⁶⁶ COMFREL, 2013, *Op. Cit.*, hlm. 75-77.

Dominasi yang diperlihatkan CPP tidak hanya sebatas terlihat di pemilihan umum saja, namun juga terlihat dalam pemilihan daerah (*sangkum election*). Berdasarkan data **Tabel 2.5**, maka dapat dilihat keberhasilan CPP dalam memenangkan tiga penyelenggaraan pemilihan daerah yang mulai dihelat pada tahun 2002. Puncaknya ketika CPP berhasil menorehkan perolehan suara tertinggi pada pemilihan daerah tahun 2012 dengan suara sebesar 3.631.082 (61,8%), serta kursi kepala daerah (*chief village*) sebanyak 1.592 dan kursi dewan daerah (*councillors village*) sebanyak 8.292. Jumlah tersebut hanya bisa ditandingi oleh SRP yang hanya memperoleh suara sebesar 1.224.460 (20,63%), serta kursi kepala daerah sebanyak 22 dan kursi dewan daerah sebanyak 2.155.⁶⁷

Tabel 2.5 Jumlah dan Presentase Perolehan Suara dan Kursi Partai di Kamboja pada Pemilihan Daerah Tahun 2002-2012

Partai	2002			2007			2012		
	Suara	Chief	Council	Suara	Chief	Council	Suara	Chief	Council
CPP	2.647.849 (60,89%)	1598	7703	3.148.533 (60,82%)	1591	7988	3.631.082 (61,80%)	1592	8292
SRP	736.454 (16,94%)	13	1346	1.303.906 (25,1%)	28	2660	1.224.460 (20,84%)	22	2155
FUN	955.200 (21,97%)	10	2211	277.545 (5,36%)	2	274	222.671 (3,79%)	1	151
NRP	-	-	-	419.791 (8,11%)	0	425	170.962 (2,91%)	0	52
HRP	-	-	-	-	-	-	580.483 (9,88%)	18	800

Sumber: COMFREL, 2012, "Final Assessment and Report on 2012 Commune Council Elections", *Report*, hlm. 55-60.

2.4 Strategi Kemenangan CPP dalam Pemilu Tahun 1998-2008

Keberhasilan yang diraih oleh CPP dalam mendominasi pemilu di Kamboja tentunya menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Meskipun pemilu di Kamboja saat ini lebih bersifat kompetitif, bagaimana cara dan strategi yang dilakukan oleh CPP sehingga dapat terus mempertahankan kemenangannya dalam setiap penyelenggaraan pemilu? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penulis kembali menggunakan konsep otoriter kompetitif. Seperti yang telah dijelaskan oleh Levitsky dan Way, meskipun penyelenggaraan pemilu bersifat kompetitif, dalam

⁶⁷ COMFREL, 2012, "Final Assessment and Report on 2012 Commune Council Elections", *Report*, hlm. 55-60.

rezim otoriter kompetitif partai pemerintah dapat menyalahgunakan kekuasaan negara yang dimilikinya untuk memenangkan pemilu, sehingga posisi partai pemerintah cenderung lebih diuntungkan dibandingkan dengan partai oposisi. Mengingat Kamboja sedang berada dalam rezim yang sama (otoriter kompetitif), maka penulis berargumen bahwa CPP sebagai partai pemerintah juga menggunakan strategi tersebut —memanfaatkan kekuasaan negara dalam kepentingan pemilu— sehingga pada akhirnya CPP berhasil mempertahankan dominasinya dari partai oposisi hingga pemilu tahun 2008. Dalam membuktikan analisis tersebut, penulis berargumen bahwa strategi yang digunakan oleh CPP dalam memanfaatkan kekuasaan negara Kamboja dapat dilihat dari empat bentuk, yaitu: (1) strategi *vote buying*; (2) strategi intimidasi politik; (3) penyalahgunaan sumber daya negara; dan (4) kecurangan administratif dalam pemilu.

2.4.1 Strategi Vote Buying

Strategi pertama yang dibahas dalam tulisan ini adalah strategi *vote buying*, yang merupakan salah satu cara utama yang digunakan CPP untuk mendulang banyak suara di setiap penyelenggaraan pemilu. Strategi ini sudah menuai banyak kritikan dari pengawas internasional. Namun, mengingat strategi ini sudah menjadi tradisi sejak masa kepemimpinan Sinhanouk, maka pada akhirnya fenomena *vote buying* sudah dianggap lumrah bagi masyarakat Kamboja.⁶⁸

Berdasarkan penelitian Hughes, praktik pembelian suara yang dilakukan oleh CPP terbagi menjadi dua bentuk umum. Bentuk pertama yang dijelaskan merupakan *saboraschon*, yaitu ‘pemberian sedekah’ kepada masyarakat yang bersandarkan pada ajaran agama Buddha.⁶⁹ Terminologi tersebut pada dasarnya

⁶⁸ Selain bagian dari tradisi, salah satu penyebab utama maraknya *vote buying* di Kamboja adalah peraturan yang rancu dan tidak tegas dalam melarang praktik tersebut. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada tingginya angka *vote buying* di Kamboja, terutama oraktik *vote buying* yang diatasmakan sebagai sedekah atau pemberian tanpa pamrih. Lebih lanjut lihat COMFREL, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 78.

⁶⁹ Pada awalnya, tradisi ini hanya berbentuk berupa pemberian donasi oleh individu dari luar maupun dalam negeri, yang berdampak terhadap infrastruktur negara (terutama kuil Buddha). Tradisi ini juga pernah dilaksanakan oleh raja Jayavarman VII (1181-1220), dimana ia membangun rumah sakit dan rumah bagi masyarakat. Pada pertengahan abad ke-20, tradisi ini juga dilakukan oleh Sihanouk, dimana ia biasanya memberikan hadiah dari atas helikopter kepada masyarakat, serta membangun sekolah dan infrastruktur di beberapa wilayah Kamboja. Tradisi ini kemudian diimplementasikan sedikit berbeda oleh Hun Sen. Sejak pemilu tahun 1998, Hun Sen menggunakan tradisi ini menjelang diselenggarakannya pemilu, sehingga hadiah yang diberikan diharapkan dapat berdampak pada banyaknya suara yang didapat dalam pemilu.

digunakan untuk menggambarkan individu yang memberikan donasi secara ikhlas dan sukarela kepada masyarakat. Tradisi ini digunakan oleh CPP sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan politik uang kepada masyarakat Kamboja. Meskipun tradisi ini bersifat sukarela, namun demikian praktik yang dilakukan CPP terhadap tradisi ini menyebabkan terbentuknya hubungan akuntabilitas *bottom-up* antara masyarakat dan CPP. Dalam hubungan ini, masyarakat dituntut untuk memilih CPP dalam pemilu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan rasa terima kasih mereka atas bantuan yang didapat dari CPP. Terbentuknya hubungan tersebut pada akhirnya memudahkan CPP untuk mengalahkan para kompetitornya, yang tidak memiliki hubungan maupun kemampuan finansial yang kuat seperti CPP.⁷⁰

Menurut Hughes, dalam mengimplementasikan *saboraschon*, CPP harus menyelaraskan bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bantuan tersebut pada akhirnya tidak dianggap sebagai praktik pembelian suara, melainkan bantuan sukarela yang bertujuan untuk manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa tujuan bantuan yang diberikan oleh CPP terhadap masyarakat, seperti: pembangunan kuil dan sekolah sebagai basis spiritual dan pengetahuan bagi masyarakat; pemberian beras sebagai kebutuhan makanan untuk menjalankan program kerja yang menggunakan tenaga kerja masyarakat; pembuatan jalan dan jembatan sebagai sarana untuk mempersatukan wilayah di Kamboja; serta pemberian barang elektronik untuk memajukan masyarakat yang masih buta akan perkembangan teknologi.⁷¹ Strategi tersebut semakin berjalan efektif mengingat dalam menjalankan praktik tersebut, Hun Sen sebagai ketua CPP seringkali turun langsung ke wilayah tujuan. Kendati pemberian tersebut tidak jarang berasal dari pihak lain — negara maupun donor negara asing — tetapi mengingat penyalur bantuan tersebut merupakan Hun Sen, maka pada akhirnya sosok Hun Sen-lah yang akan diingat oleh masyarakat sebagai penolong mereka. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong masyarakat — yang

⁷⁰ Menurut Hughes, selain CPP, partai lain di Kamboja juga melakukan praktik politik uang. Namun, kemampuan yang terbatas yang dimiliki oleh beberapa partai tersebut menyebabkan praktik ini tidak memiliki dampak yang signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh CPP. Lebih lanjut lihat Caroline Hughes, "The Politics of Gifts: Tradition and Regimentation in Contemporary Cambodia", *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 37, No. 3, (2006), hlm. 470-471.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 473.

telah diberikan bantuan — untuk cenderung memilih CPP dibandingkan partai lainnya dalam penyelenggaraan pemilu.⁷²

Selain *saboraschon*, bentuk *vote buying* kedua yang dijelaskan oleh Hughes merupakan *Khsae*, yaitu pemberian bantuan perlindungan bagi masyarakat Kamboja melalui hubungan patron-klien yang bersifat timbal balik. Dalam sistem ini, terbentuk suatu hubungan hierarki yang mempercayai bahwa sosok Hun Sen yang berada di puncak piramida dapat melindungi dan menjaga keamanan masyarakat yang berada di bawah sistem hierarki.⁷³ Dengan adanya stigma seperti itu, maka pada akhirnya masyarakat yang membutuhkan keamanan dan perlindungan cenderung memilih CPP dalam penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh *Asia Foundation*, dimana penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 25% pilihan masyarakat Kamboja ditentukan pada partai yang dapat menjamin keamanan mereka, mengingat tingginya intensitas konflik yang terjadi di Kamboja dalam beberapa dekade terakhir.⁷⁴

Dilihat dari jumlahnya, praktik pembelian suara yang dilakukan oleh CPP dalam penyelenggaraan pemilu terbilang sangat masif sejak memenangkan pemilu tahun 1998.⁷⁵ Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh COMFREL, tingginya praktik pembelian suara di Kamboja dimulai sejak pemilu tahun 2003. Status CPP yang sudah bertindak sebagai partai pemerintah pada saat itu membuat mereka tidak kesulitan untuk mengimplementasikan strategi ini dalam skala yang besar. Jika diakumulasi secara keseluruhan, CPP rela mengeluarkan dana sebesar US\$ 170.000, membangun 58 sekolah, 5 jembatan, 43 km jalan, 400 ton beras, 130 ton semen, serta 320 barang elektronik (komputer, generator, televisi, dan lain sebagainya) yang digunakan untuk meyakinkan masyarakat agar memilih CPP dalam pemilu tahun 2003. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan yang berarti

⁷² *Ibid.*, hlm. 474.

⁷³ Terbentuknya sistem ini diawali oleh propaganda yang dilakukan oleh Hun Sen, dimana ia merepresentasikan diri sebagai *bang thom* (*big brother*) yang dapat melindungi masyarakat Kamboja. Hingga saat ini, tradisi tersebut masih dipercayai oleh masyarakat Kamboja, khususnya yang berada di wilayah rural. Lihat *Ibid.*, hlm. 479.

⁷⁴ The Asia Foundation, *Democracy in Cambodia: 2013* (Phnom Penh: Asia Foundation, 2013), hlm. 49.

⁷⁵ Terkait pemilu tahun 1998, penulis tidak mendapatkan data secara pasti tentang jumlah *vote buying* pada saat itu. Namun mengutip penelitian yang dilakukan oleh *Human Right Watch*, kasus *vote buying* terbesar yang dilakukan oleh CPP pada pemilu tahun 1998 berada di provinsi Siem Reap, dimana *vote buying* umumnya berbentuk pemberian uang (US\$ 12.5) serta pemberian barang pokok bagi masyarakat. Lebih lanjut lihat Human Right Watch, 2003. *Op. Cit.*, hlm. 5.

dalam selang waktu lima tahun.⁷⁶ Pada pemilu tahun 2008, COMFREL menemukan sebanyak 61 kasus pembelian suara di seluruh provinsi Kamboja selama penyelenggaraan pemilu berlangsung, khususnya dalam bentuk uang maupun pembangunan infrastruktur.⁷⁷

2.4.2 Strategi Intimidasi Politik

Strategi kedua yang dibahas dalam tulisan ini adalah strategi intimidasi politik yang dilakukan oleh militer. Menurut pandangan Meas Nee, CPP menggunakan sarana militer yang notabene merupakan milik negara sebagai alat untuk mengintimidasi masyarakat pemilih, sehingga pada akhirnya masyarakat tersebut terpaksa untuk memilih CPP dalam pemilu.

*Other than vote buying, CPP uses their existing military power since the 1997 military coup to intimidate public into voting CPP. Intimidation by the military is not only directed to the public, but to the opposition party and NEC as well, especially during voting and counting the votes*⁷⁸

Selain strategi vote buying, CPP di sini memanfaatkan kekuatan militer yang dimiliki sejak kudeta (militer) tahun 1997 untuk mengintimidasi masyarakat agar memilih CPP pada penyelenggaraan pemilu. Intimidasi yang dilakukan oleh militer tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, namun juga kepada pihak oposisi dan NEC, terutama pada masa pencoblosan dan perhitungan suara.

Selain ditujukan kepada masyarakat, berdasarkan paparan Meas Nee tersebut, intimidasi militer nyatanya juga dilakukan terhadap pihak oposisi maupun penyelenggara pemilu (NEC), khususnya pada masa pencoblosan dan perhitungan suara pemilu. Meas Nee menerangkan bahwa strategi ini mulai digunakan oleh CPP sejak keberhasilan kudeta militer yang dilakukan terhadap Ranariddh tahun 1997, dimana kudeta tersebut pada akhirnya memuluskan langkah CPP untuk

⁷⁶ Kasus *vote buying* pada tahun 2008 banyak ditemukan di wilayah Kampong Cham, Kampong Chhnang, Kampong Thom, Kampong Speu, Kampot, Koh Kong, Prey Veng, Pursat, Siem Riep, dan Ratanakiri. Namun kasus *vote buying* pada saat itu paling banyak ditemukan di wilayah Svay Rieng, berjumlah 10 kasus. Lihat COMFREL, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 103.

⁷⁷ Meskipun COMFREL menyatakan bahwa *vote buying* yang dilakukan oleh CPP terjadi secara merata di 24 provinsi, namun COMFREL memiliki data spesifik terkait provinsi mana yang paling rawan terindikasi kasus tersebut. Menurut COMFREL, pembangunan infrastruktur yang paling banyak dilakukan oleh CPP terjadi pada provinsi Siem Reap, Distrik Krolanh. Sementara itu, pemberian bantuan berbentuk uang 100.000 – 500.000 Riels banyak terjadi di wilayah Ratanakiri, Kampong Thom, dan Kampot. Lihat COMFREL, 2013, *Op. Cit.*, hlm. 26-27.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Meas Nee (Pengamat politik Kamboja), tanggal 24 September 2016, di Sunway Hotel, Phnom Penh.

mengalahkan FUNCINPEC pada pemilu tahun 1998. Sejak saat itu, kekuatan militer yang dimiliki oleh CPP semakin bertambah besar. Kekuatan tersebut dapat digambarkan dari jumlah intimidasi politik yang terjadi pada pemilu 2003, dimana secara keseluruhan COMFREL menemukan 291 kasus intimidasi militer yang dilakukan oleh CPP selama penyelenggaraan pemilu berlangsung. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada pemilu tahun 2008 menjadi 187 kasus.⁷⁹

2.4.3 Strategi Penyalahgunaan Sumber Daya Negara

Strategi ketiga yang dibahas dalam tulisan ini adalah penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki oleh negara. Kontrol penuh yang dimiliki oleh CPP terhadap sumber daya Kamboja nyatanya tidak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kheang Un dan Sokbunthoeun So, lemahnya kredibilitas institusi politik dan kuatnya budaya korupsi di Kamboja justru membuat keberadaan sumber daya alam di Kamboja berdampak negatif terhadap kondisi masyarakat. Dalam hal ini, CPP —yang menguasai dan bertindak sebagai pemerintah Kamboja— menyalahgunakan sumber daya alam tersebut untuk dijadikan sebagai salah satu lumbung pemasukan utama partai, yang nantinya mereka gunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan.⁸⁰

Secara garis besar, Kheang Un dan Sokbunthoeun So menyebutkan bahwa terdapat tiga sumber daya alam yang dimanfaatkan secara berlebihan oleh pemerintah Kamboja, yaitu: tanah, hutan, dan minyak. Terkait sumber daya tanah, pemerintah Kamboja lewat kebijakan *Economic Land Concessions* (ELC) mencoba untuk memanfaatkan luas tanah Kamboja yang relatif besar untuk kepentingan ekonomi CPP.

*Economic Land Concession refers to a mechanism to grant private state land through a specific economic land concession contract to a concessionaire to use for agricultural and industrial-agricultural exploitation*⁸¹

⁷⁹ COMFREL, 2013, *Op. Cit.*, hlm. 60.

⁸⁰ CPP menggunakan kekuatan militer mereka untuk menjaga akses sumber daya alam Kamboja. Kondisi tersebut pada akhirnya menyulitkan masyarakat yang mencoba untuk memanfaatkan kekayaan alam Kamboja tersebut. Lihat Kheang Un dan Sokbunthoeun So, *Op. Cit.*, hlm. 123-138.

⁸¹ USAID, *Property Rights and Resource Governance: Cambodia*, Laporan USAID Country Profile, hlm. 6.

Lahan Konsesi Ekonomi merujuk pada sebuah mekanisme pemberian tanah negara melalui kontrak konsesi lahan ekonomi tertentu kepada pemegang konsesi, yang akan digunakan untuk tujuan eksploitasi/pemanfaatan pertanian dan industri pertanian.

Berdasarkan isi dari artikel 2 *sub-decree 146* tersebut, pemerintah Kamboja memberikan akses kepada pihak/perusahaan mana saja yang ingin menggunakan tanah negara untuk kepentingan agrikultur maupun industri agrikultur, lewat kebijakan ELC.⁸² Di satu sisi, kebijakan ini memiliki dampak positif terhadap kenaikan pendapatan negara Kamboja. Data dari Kementrian Ekonomi dan Keuangan Kamboja menunjukkan bahwa kebijakan ELC berhasil menambah pendapatan negara sebanyak US\$80 juta pada periode 2012-2015.⁸³ Namun di sisi lain, kebijakan ELC justru berdampak buruk terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. Tercatat, sejak diberlakukan pada tahun 2000, kebijakan ini telah mengambil secara paksa sebanyak 1.934.896 hektar tanah yang dimiliki oleh kurang lebih 830.000 orang untuk digunakan sebagai lahan ELC, sehingga mayoritas dari mereka kehilangan tempat tinggal maupun lahan pencaharian.⁸⁴

Selain tanah, pemerintah Kamboja juga mengeksploitasi sumber daya hutan yang melimpah di Kamboja untuk dijadikan sebagai lumbung pendapatan pribadi mereka. Dalam hal ini, pemerintah melalui hubungan patron-klien yang terbentuk dengan pengusaha, berkerjasama untuk mendapatkan keuntungan yang masif dari hasil kebijakan ekspor kayu skala besar di Kamboja, baik yang bersifat legal

⁸² Seperti yang tertera dalam artikel 3 dan 4, ketentuan lahan ELC dinilai sangat normatif dan mudah untuk dipenuhi oleh para investor. Bahkan, dalam beberapa peraturan, pemerintah Kamboja dinilai cenderung 'memberikan' lahan negara mereka dalam jangka waktu panjang untuk keperluan industri agrikultur. Peraturan tersebut meliputi: (1) konsesi lahan ekonomi yang diberikan tetap atas nama negara memiliki durasi maksimum 99 tahun; (2) setiap perusahaan boleh memiliki tanah dalam skala besar, asalkan tidak lebih dari 10.000 Hektar. Jika ingin mendapatkan jumlah tanah yang lebih dari ketentuan, maka pihak tersebut harus membentuk perusahaan yang baru; dan (3) lahan konsesi harus dimanfaatkan terus menerus oleh perusahaan. Jika dalam jangka waktu 12 tidak dimanfaatkan, maka pemerintah dapat memindahkan kepemilikan lahan tersebut kepada perusahaan lain. Lihat Council for the Development of Cambodia, *Sub-Decree 146 Economic Land Concessions*, Diakses melalui http://www.cambodiainvestment.gov.kh/sub-decree-146-on-economic-land-concessions_051227.html Pada tanggal 4 April 2017 pukul 17.15 WIB.

⁸³ FIDH, *Cambodia: 60.000 new victims of government land grabbing policy since January 2014*, diakses melalui <https://www.fidh.org/en/region/asia/cambodia/cambodia-60-000-new-victims-of-government-land-grabbing-policy-since> pada tanggal 4 April 2017 pukul 17.48 WIB.

⁸⁴ Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementrian Agrikultur, Kehutanan, dan Perikanan Kamboja, hingga tahun 2012 pemerintah telah memberikan izin kepada 230 perusahaan untuk melaksanakan ELC di tanah Kamboja. Lihat Chea Vannak, *Agriculture Ministry to End ELC*, diakses melalui <https://web.archive.org/web/20151008052240/http://www.akp.gov.kh/?p=69494> pada tanggal 4 April 2017 pukul 18.14 WIB.

maupun ilegal.⁸⁵ Eksploitasi yang berlebihan tersebut pada akhirnya berdampak buruk terhadap kondisi hutan di Kamboja.⁸⁶ Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh LICADHO, Kamboja telah kehilangan sebanyak 59.422 km² (14,9%) luas hutan dalam jangka waktu hanya 13 tahun (2000-2013).⁸⁷

Sumber daya alam terakhir yang disebut oleh Kheang Un dan Sokbunthoeun So adalah sumber daya minyak. Meskipun sumber daya minyak baru ditemukan di Kamboja — oleh Chevron-Texaco— pada tahun 2006, namun sumber daya ini diprediksi dapat menjadi salah satu sumber pemasukan terbesar negara yang dapat disalahgunakan oleh CPP.⁸⁸ Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *International Monetary Fund* (IMF), jumlah pemasukan minyak di satu blok (blok A) diperkirakan akan mengalami peningkatan dari US\$ 174 juta pada tahun 2011 menjadi US\$ 1,7 Miliar pada tahun 2021. Jumlah tersebut akan meningkat

⁸⁵ Tulisan *Cambodia's Family Tree* membuktikan bahwa terdapat adanya hubungan patron-klien yang terjalin antara pemerintah dan pengusaha dalam memanfaatkan sumber daya hutan di Kamboja. Dalam hal ini, pemerintah Kamboja yang diwakili oleh Hun Sen, memudahkan jalan pengusaha untuk melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap hutan Kamboja. Disatu sisi, pihak pengusaha yang mayoritas memiliki relasi dengan Hun Sen —Hun Chouch (sepupu), Seng Keang (mantan istri Hun Chouch), dan Khun Thong (kakak ipar dari menteri kabinet Hun Sen)— memberikan keuntungan yang didapat dari hasil ekspor kayu kepada Hun Sen. Terbentuknya kondisi tersebut membuat Global Witness pada tahun 2007 menyebut Hun Sen beserta para elitnya sebagai “*Kleptocratic Elites*”. Lebih lanjut lihat *Cambodia's Family Trees: Illegal Logging and the Stripping of Public Assets by Cambodia's Elite*, Global Witness Report, Juni 2007, hlm. 19-22.

⁸⁶ Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *the post*, Kamboja telah mengekspor 107.832 kubik kayu, yang nilainya ditaksir mencapai US\$ 123 juta. Namun, banyak pihak menilai bahwa sebagian besar dari hasil kayu tersebut merupakan hasil dari penebangan ilegal. Selain mengorbankan hutan, kasus ekspor kayu ilegal di Kamboja juga memakan korban jiwa. Seorang aktivis bernama Chut Wutty dikabarkan tewas setelah melakukan demonstrasi atas praktik ekspor kayu ilegal yang dilakukan oleh pemerintah Kamboja, khususnya terhadap China. Lebih lanjut lihat Charlie Campbell, *In Cambodia, China Fuels Deadly Illegal Logging Trade*, diakses melalui <http://world.time.com/2013/05/14/in-cambodia-illegal-logging-unabated-on-anniversary-of-leading-activists-death/> pada tanggal 5 April 2017 pukul 1.21 WIB.

⁸⁷ Zsombor Peter, *Unprotected Areas*, diakses melalui <https://www.cambodiadaily.com/unprotectedareas/> pada tanggal 5 April 2017 pukul 1.34 WIB.

⁸⁸ Pencarian sumber daya minyak di Kamboja sebenarnya telah gencar dilakukan sejak tahun 1970, namun pencarian tersebut diberhentikan akibat terjadinya perperangan. Pencarian kembali dilakukan pada tahun 2000 oleh perusahaan asal Amerika Serikat bernama Chevron Texaco. Perusahaan ini pada akhirnya berhasil menemukan 6 titik lokasi sumber daya minyak di Kamboja. Keenam titik tersebut dinamakan blok A-F oleh pemerintah Kamboja. Hingga saat ini, baru titik A yang diperbolehkan oleh pemerintah untuk dieksploitasi lebih lanjut. Pada tahun 2014, perusahaan asal Singapura bernama KrisEnergy mengambil alih hak pengelolaan minyak yang dimiliki oleh Chevron, mengingat tidak tercapainya persetujuan dengan pihak pemerintah Kamboja. Lebih lanjut lihat Prak Chan Thul, *Cambodia to Revise Oil Contract, Paving Way For First Oil*, diakses melalui <http://www.reuters.com/article/us-cambodia-oil-idUSKBN16R0FT> pada tanggal 5 April 2017 pukul 13.55 WIB.

sebanyak US\$ 2 Miliar jika pemerintah dan perusahaan minyak berkaitan berhasil mengoptimalkan dengan baik enam blok minyak lainnya.⁸⁹

Selain menyalahgunakan sumber daya alam, CPP juga memanfaatkan secara ilegal infrastruktur yang dimiliki oleh negara. Infrastruktur yang seharusnya digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan negara dan masyarakat, justru dalam kasus ini digunakan untuk keperluan kampanye pemilu CPP. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh COMFREL, jumlah penyalahgunaan infrakstruktur negara oleh CPP mengalami peningkatan pada pemilu tahun 2008, khususnya dalam bentuk penggunaan ratusan *civil servants* (pegawai negeri sipil), bangunan serta transportasi negara. Jumlah tersebut kembali mengalami peningkatan lima tahun berselang.⁹⁰

2.4.4 Strategi Kecurangan Administratif dalam Pemilu

Strategi terakhir yang dibahas dalam tulisan ini adalah kecurangan administratif dalam pemilu. Dalam hal ini, CPP memanfaatkan kendali penuh yang dimiliki terhadap NEC — sebagai penyelenggara pemilu — untuk melakukan kecurangan administratif dalam pemilu. Jika dibandingkan dengan tiga kecurangan yang penulis bahas sebelumnya, jumlah kecurangan ini berjumlah jauh lebih besar. Kecurangan administratif dalam pemilu memiliki berbagai bentuk, seperti tidak terdaftarnya nama pemilih tetap dan nama pemilih yang tercantum ganda (*ghost voters*) dalam daftar yang dikeluarkan oleh NEC. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh COMFREL, jumlah kecurangan administratif yang dilakukan oleh CPP mengalami peningkatan dalam jangka waktu satu periode pemilu. Jika pada pemilu tahun 2003 jumlah nama pemilih Kamboja yang tidak terdaftar dan terdaftar ganda berjumlah 400.000 dan 250.000, maka pada pemilu berikutnya jumlah tersebut meningkat tajam menjadi 1.250.000 dan 300.000.⁹¹ Dugaan kecurangan

⁸⁹ Berdasarkan penelitian yang ada, blok A dinilai memiliki kandungan minyak dan gas yang lebih banyak dan berharga dibandingkan dengan lima blok lainnya. Lihat Kheang Un dan Sokbunthoeun So, *Op. Cit.*, hlm. 130.

⁹⁰ Meskipun intimidasi tahun 2013 banyak ditemukan setelah ditetapkannya hasil pemilu, namun intimidasi tetap ditemukan di beberapa provinsi seperti Kandal, Kampong Cham, Phnom Penh, Kampot, Prey Veng, Kampong Thom, Takeo, Sihanouk Ville, dan Rattanakiri. Lihat COMFREL, 2013, *Op. Cit.*, hlm. 10.

⁹¹ Perbedaan data yang ditunjukkan COMFREL dan NEC sangat besar. Jika COMFREL menyatakan bahwa jumlah pemilih yang tidak terdaftar sejumlah 1.250.000, namun NEC mengungkapkan bahwa jumlah pemilih yang tidak terdaftar hanya berjumlah 290.000. Padahal data yang dikeluarkan

yang dilakukan oleh NEC semakin menguat mengingat NEC membantah adanya kecurangan sebesar itu pada pemilu tahun tersebut. Padahal, beberapa lembaga internasional yang mengawasi jalannya pemilu di Kamboja memiliki kesimpulan yang kurang lebih sama seperti apa yang disampaikan oleh COMFREL tersebut.

Tabel 2.6 Strategi CPP dalam Mempertahankan Kekuasaan di Kamboja

Bentuk Strategi	Penjelasan
Strategi <i>Vote Buying</i>	Strategi ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: (1) <i>Saboraschon</i> , yaitu pemberian sedekah kepada masyarakat pemilih yang berdasarkan pada ajaran agama Buddha (pemberian uang, barang, pembangunan infrastruktur); dan (2) <i>Khsae</i> , yaitu pemberian bantuan perlindungan kepada masyarakat Kamboja melalui hubungan patron-klien yang bersifat timbal balik. Dalam hal ini, masyarakat yakin Hun Sen yang berada pada puncak piramida dapat melindungi dan menjaga keamanan masyarakat selama ia berada di pucuk pemerintahan Kamboja.
Strategi intimidasi politik	Kekuatan militer yang dimiliki oleh CPP digunakan untuk mengintimidasi masyarakat agar memilih CPP dalam pemilu. Selain masyarakat, CPP menggunakan militer untuk mengintimidasi pihak oposisi maupun penyelenggara pemilu.
Penyalahgunaan Sumber Daya Negara	Dalam strategi ini, CPP menyalahgunakan sumber daya yang dimiliki oleh Kamboja untuk kepentingan pribadi partai, sehingga dapat terus mempertahankan kekuasaan di pemerintahan. Penyalahgunaan tersebut terbagi menjadi dua bentuk: (1) CPP menyalahgunakan tiga sumber daya terbesar Kamboja —tanah, hutan, dan minyak— sebagai lumbung pemasukan partai; dan (2) menyalahgunakan infrastruktur yang dimiliki negara —pegawai negeri sipil, bangunan, dan transportasi— untuk kepentingan kampanye CPP dalam pemilu.
Kecurangan Administratif Pemilu	CPP memanfaatkan kontrol penuh terhadap NEC untuk melakukan kecurangan administratif pemilu. Kecurangan tersebut berbentuk kesalahan pencantuman nama pemilih dalam skala yang besar dan kecurangan dalam perhitungan suara.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keempat strategi yang dilakukan oleh CPP tersebut memiliki pengaruh besar terhadap

COMFREL didukung oleh tiga lembaga internasional lainnya, seperti NDI, NICFEC, dan CAS. Lebih lanjut lihat *Ibid.*, hlm. 49.

langgengnya dominasi CPP di Kamboja, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sesuai dengan konsep yang diungkapkan oleh Levitsky dan Way, meskipun rezim otoriter kompetitif membuka persaingan kompetitif antar partai, namun dalam rezim ini CPP (sebagai partai pemerintah) dapat memiliki hak istimewa untuk menggunakan sumber daya negara, yang sebenarnya penggunaannya diperuntukkan bagi masyarakat, sebagai sarana untuk mengalahkan para kompetitornya dalam pemilu. Keempat strategi tersebut, yang terdiri dari strategi *vote buying*, strategi intimidasi politik oleh militer, penyalahgunaan sumber daya negara, serta kecurangan administratif pemilu, merupakan sebuah bukti penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh CPP dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaannya di pemerintah. Meskipun begitu, keempat strategi tersebut tidak selamanya akan menjamin kemenangan partai pemerintah. Pada bab berikutnya, penulis akan mencoba menganalisis fenomena kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013. Dalam pemilu tersebut, keempat strategi yang dilakukan oleh CPP tidak berjalan efektif karena munculnya tiga peristiwa dan kondisi penting di Kamboja, yang pada tahapan berikutnya berperan meruntuhkan dominasi kursi CPP di wilayah urban.

BAB 3

ANALISIS KEKALAHAN *CAMBODIA PEOPLE'S PARTY* DI WILAYAH URBAN PADA PEMILU TAHUN 2013

Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan fenomena kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013. Meskipun tetap meraih kemenangan dalam skala nasional, perolehan kursi CPP di wilayah urban harus mengalami penurunan signifikan pada pemilu tahun 2013. Hal tersebut membuat perolehan kursi mereka di wilayah tersebut harus mengalami kekalahan dari partai oposisi yang baru saja terbentuk, CNRP. Lebih lanjut, penulis juga akan menyajikan hasil analisis terkait kondisi-kondisi penting yang melatarbelakangi kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013, yang terdiri dari penurunan kinerja dan permasalahan dalam pemerintahan Hun Sen, perbedaan isu dan strategi kampanye yang digunakan CPP dan CNRP, serta penurunan praktik intimidasi politik oleh militer. Dalam melakukan analisis tersebut, penulis menggunakan teori *Dominant Party Authoritarian Regimes* yang dikemukakan oleh Greene, konsep *International Election Observation* yang dijelaskan oleh Carothers, hasil wawancara dan temuan lapangan, serta kajian literatur yang digunakan dalam tulisan ini.

3.1 Fenomena Kekalahan CPP di Wilayah Urban Kamboja pada Pemilu Tahun 2013

Penyelenggaraan pemilu tahun 2013 di Kamboja berhasil memberikan hasil yang tidak terduga bagi banyak pihak, khususnya CPP. Dominasi perolehan kursi yang diperlihatkan CPP sejak pemilu tahun 1998 ternyata tidak terulang kembali pada pemilu tahun 2013. Padahal pada saat itu, CPP memiliki kesempatan besar untuk mempertahankan jumlah kursi yang sebelumnya diperoleh (90 kursi) mengingat satu-satunya lawan terberat yang dihadapi oleh CPP adalah CNRP, yang notabenenya merupakan partai baru.⁹² Posisi CPP semakin diuntungkan ketika ketua CNRP saat itu, Sam Rainsy, tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Kamboja

⁹² CNRP merupakan partai gabungan dari SRP dan NRP yang baru terbentuk pada tanggal 17 Juli 2012. Dengan kondisi tersebut, CNRP tidak memiliki pengalaman sama sekali terkait pemilu mengingat partai ini belum terbentuk pada pemilu tahun 2008 maupun pemilihan daerah tahun 2012.

karena kasus pemalsuan peta Kamboja-Vietnam yang menjeratnya sejak tahun 2010.⁹³ Namun atas perintah Raja Norodhom Shihamoni (*royal pardon*), Sam Rainsy diperbolehkan untuk kembali ke wilayah Kamboja, meskipun kepulangannya tersebut hanya berjarak sembilan hari dari penyelenggaraan pemilu tahun 2013.⁹⁴ Kondisi tersebut membuat persiapan CNRP menjadi tidak maksimal, mengingat Sam Rainsy sebagai figur terpenting CNRP tidak dapat hadir selama masa kampanye pemilu bergulir.

Meskipun dengan kondisi yang dimiliki saat itu banyak pihak menilai bahwa CPP dapat dengan mudah mengalahkan CNRP — namun pasca pengumuman hasil pemilu tahun 2013, CPP harus menerima bahwa jumlah perolehan suara dan kursi mereka harus mengalami penurunan drastis.⁹⁵ Berdasarkan data **Tabel 3.1**, dapat dilihat bahwa perolehan suara dan kursi yang dimiliki oleh CPP pada pemilu tahun 2013 mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan perolehan mereka pada pemilu tahun 2008. Jika pada pemilu tahun 2008 CPP berhasil meraih sebanyak 3.492.374 (58,11%) suara dan 90 kursi, pada pemilu tahun 2013 CPP harus puas dengan perolehan sebanyak 3.235.969 suara (48,83%) dan 68 kursi. Jumlah tersebut hanya berbeda tipis dengan perolehan CNRP, yang di luar dugaan dapat mengumpulkan sebanyak 2.946.176 suara (44,46%) dan 55 kursi.⁹⁶ Padahal, jika dibandingkan dengan hasil pemilu tahun 2008, jumlah perolehan kursi yang

⁹³ Pada tahun 2010, Sam Rainsy dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara oleh pengadilan Kamboja karena dianggap telah memalsukan peta teritori Kamboja dan Vietnam. Tindakan yang dilakukan oleh Sam Rainsy merupakan bentuk perlawanan atas kesepakatan teritori yang dilakukan oleh pemerintah Kamboja dan Vietnam. Sam Rainsy merasa keputusan yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut sangat merugikan pihak Kamboja, mengingat banyak masyarakat Kamboja yang berada diperbatasan kehilangan tempat tinggal. Lihat BBC, *Exiled Cambodian Opposition Leader Given Jail Term*, diakses melalui <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11395570> pada tanggal 6 April 2017 pukul 16.27 WIB.

⁹⁴ Kedatangan Sam Rainsy tersebut disambut meriah oleh kurang lebih 100.000 pendukung CNRP yang rela datang ke bandara internasional Phnom Penh. Lihat Chan Thul, *Sam Rainsy Returns Home, Joins Poll Campaign*, diakses melalui <http://www.reuters.com/article/us-cambodia-election-rainsy-idUSBRE96I0C620130719> pada tanggal 6 April 2016 pukul 16.29 WIB.

⁹⁵ Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap enam narasumber berbeda, semua narasumber sepakat bahwa hasil pemilu tahun 2013 di luar perkiraan mereka. Meskipun CPP tetap memenangkan pemilu, namun mereka semua terkejut dengan perolehan suara dan kursi yang didapat oleh CNRP, dimana jumlah tersebut hanya berbeda tipis dengan apa yang diperoleh CPP.

⁹⁶ COMFREL, 2013, *Op. Cit.*, hlm. 77-78.

dimiliki oleh seluruh partai oposisi —SRP, HRP, NRP, dan FUNCINPEC— hanya mencapai sebanyak 33 kursi.⁹⁷

Tabel 3.1 Perbandingan Jumlah Suara dan Kursi Partai di Kamboja pada Pemilu Tahun 2008 dan 2013

Partai	2008			Partai	2013		
	Suara	%	Kursi		Suara	%	Kursi
CPP	3.492.374	58,11	90	CPP	3.235.969	48,83	68
SRP	1.316.714	21,91	26	CNRP	2.946.176	44,46	55
HRP	397.816	6,62	3	FUN	242.413	3,66	0
NRP	337.943	5,62	2	LDP	68.389	1,03	0
FUN	303.764	5,05	2	KAPP	42.222	0,65	0
LDP	68.909	1,15	0	CNP	38.123	0,58	0
KDP	32.386	0,54	0	RDP	33.715	0,5	0
HDDMP	25.065	0,42	0	KEDP	19.152	0,29	0
SJP	14.112	0,23	0				
KRP	11.693	0,19	0				
KAPP	9.501	0,16	0				
Total		100	123	Total		100	123

Sumber: (1) Sumber: COMFREL, 2008, “2008 National Assembly Election”, *Report*, hlm. 64; (2) COMFREL, 2013, “National Assembly Election, Final Assessment and Report”, *Report*, hlm. 75.

Jika dikaji lebih jauh, penurunan jumlah kursi yang dialami oleh CPP disebabkan oleh kegagalan mereka dalam mempertahankan perolehan kursi di wilayah urban. Kegagalan tersebut terasa signifikan mengingat wilayah urban memiliki proporsi jumlah kursi yang lebih besar dibandingkan dengan 20 provinsi lainnya di Kamboja. Berdasarkan data **Tabel 3.2**, dapat dilihat bahwa perolehan kursi CPP di empat wilayah urban Kamboja harus mengalami penurunan sebanyak sembilan kursi. Di antara empat provinsi tersebut, penurunan terbesar CPP terjadi di provinsi Kampong Cham, dimana mereka harus kehilangan sebanyak tiga kursi. Sementara itu, untuk tiga provinsi lainnya, yaitu Phnom Penh, Prey Veng, dan Kandal, CPP harus kehilangan masing-masing sebanyak dua kursi. Penurunan tersebut-pun pada akhirnya berdampak pada kegagalan CPP untuk mempertahankan predikat ‘*absolute majority*’ yang mereka raih pada pemilu tahun 2008, sehingga mereka tidak dapat membentuk pemerintahan sendiri di parlemen

⁹⁷ Meskipun kalah, CNRP tidak mengikuti jejak FUNCINPEC pada tahun 1998 yang sepakat membentuk koalisi dengan CPP, sehingga membuat tidak adanya pihak oposisi di parlemen. Dalam hal ini, CNRP tetap menekankan sikap sebagai kelompok oposisi CPP dalam parlemen pada periode 2013-2018. Lihat Peter Manikas, “Cambodia’s 1998 Elections: The Failure of Democratic Consolidation”, *New England Journal of Public Policy*, Vol. 14, No. 11, (1998), hlm. 157-158.

Kamboja tanpa kehadiran CNRP sebagai pihak oposisi.⁹⁸ Padahal, jika CPP dapat mempertahankan perolehan kursi mereka di wilayah urban —dan tidak kehilangan sebanyak 5 kursi wilayah rural— maka CPP akan tetap menjadi penguasa parlemen Kamboja periode 2013-2018.

Selain wilayah urban, CPP sebenarnya juga kehilangan beberapa kursi di wilayah rural. Secara garis besar, penurunan tersebut dapat dilihat di sembilan provinsi. Provinsi yang mengalami penurunan terbesar terjadi di Takeo, Kampong Speu, Kampot, dan Svay Rieng, dimana CPP harus kehilangan sebanyak dua kursi di provinsi tersebut. Sementara itu, untuk provinsi lainnya, yaitu Battambang, Kampong Thom, Siem Reap, Kampong Chhang, dan Pursat, CPP harus mengalami penurunan sebanyak satu kursi.⁹⁹ Meskipun penurunan tersebut terlihat signifikan, namun perolehan kursi CPP di wilayah rural masih tetap berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan CNRP. Kuatnya pengaruh yang dimiliki CPP di wilayah tersebut pada akhirnya membuat CNRP gagal meruntuhkan dominasi CPP pada pemilu tahun 2013.

Tabel 3.2 Perolehan Jumlah Kursi CPP dan CNRP per Provinsi

Provinsi	Jumlah Kursi	CPP			CNRP		
		2008	2013	+/-	2008 (SRP+HRP)	2013	+/-
Wilayah Urban							
Kampong Cham	18	11	8	-3	6	12	+4
Phnom Penh	12	7	5	-2	5	7	+2
Prey Veng	11	7	5	-2	3	6	+3
Kandal	11	7	5	-2	4	6	+2
Wilayah Rural							
Battambang	8	6	5	-1	2	3	+1
Takeo	8	6	4	-2	2	4	+2
Banteay Meanchey	6	4	4	0	1	2	+1
Kampong Speu	6	5	3	-2	1	3	+2
Kampong Thom	6	4	3	-1	1	3	+2

⁹⁸ Pada pemilu tahun 2013, CPP setidaknya membutuhkan sebanyak 82 kursi untuk dapat menguasai parlemen Kamboja. Berkaca pada perolehan CPP yang hanya mendapatkan 68 kursi, maka pada akhirnya CPP harus membagi kekuasaannya dengan CNRP. CPP juga harus berkompromi dengan CNRP untuk membuat sebuah kebijakan/undang-undang, mengingat proses legislasi di Kamboja membutuhkan persetujuan dari 2/3 anggota parlemen. Lihat Cambodia Daily, *CPP Wins, But Suffers Loss in Parliamentary Majority*, diakses melalui <https://www.cambodiadaily.com/elections/cpp-wins-but-suffers-loss-in-parliamentary-majority-37210/> pada tanggal 9 April 2017 pukul 19.15 WIB.

⁹⁹ COMFREL, 2013, *Op. Cit.*, hlm. 78.

Provinsi	Jumlah Kursi	CPP			CNRP		
		2008	2013	+/-	2008 (SRP+HRP)	2013	+/-
Kamptot	6	5	3	-2	1	3	+2
Siem Reap	6	5	4	-1	1	2	+1
Svay Rieng	5	5	3	-2	0	2	+2
Kampong Chhang	4	3	2	-1	1	2	+1
Pursat	4	4	3	-1	0	1	+1
Kratie	3	2	2	0	1	1	0
Koh Kong	1	1	1	0	0	0	0
Mondulkiri	1	1	1	0	0	0	0
Preah Vihear	1	1	1	0	0	0	0
Ratanakiri	1	1	1	0	0	0	0
Sihanouk Ville	1	1	1	0	0	0	0
Stung Treng	1	1	1	0	0	0	0
Kep	1	1	1	0	0	0	0
Pallin	1	1	1	0	0	0	0
Oddar Meanchey	1	1	1	0	0	0	0
Total	123	90	68	-22	29	55	+21

Sumber: (1) COMFREL, 2013, "National Assembly Election, Final Assessment and Report", Report, hlm. 116. (2) COMFREL, 2008, "2008 National Assembly Election", Report, hlm. 98.

Meskipun dengan hasil tersebut perolehan kursi CPP masih lebih unggul dibandingkan CNRP, namun berkaca dengan apa yang mereka raih pada tiga pemilu sebelumnya, tentunya pihak CPP merasa kecewa dengan pencapaian mereka pada pemilu tahun 2013. Hasil tersebut bisa saja bertambah buruk bagi CPP jika mereka tidak memiliki kontrol penuh terhadap NEC, selaku penyelenggara pemilu Kamboja. Yong Kim Eng selaku dewan direktur COMFREL, menyatakan bahwa seharusnya CNRP berhak memenangkan pemilu tahun 2013 dengan perolehan suara sebanyak 66%. Namun, kemenangan bersejarah tersebut harus pupus akibat manipulasi suara skala besar yang dilakukan oleh NEC dan CPP.¹⁰⁰

From the reports that spread through social media (Facebook), CNRP stated that they should be able to win the election by 66%. It is failed to be achieved because of the large scale fraud committed by NEC (ordered by CPP). The victory achieved by CPP led to one of the biggest 'bloody'

¹⁰⁰ Yong Kim Eng menjelaskan bahwa sebenarnya kemenangan CNRP sudah menjadi 'rahasia publik'. Sebagian besar Masyarakat Kamboja, khususnya yang berada di wilayah urban, sebenarnya sudah mengetahui bahwa CNRP merupakan partai pemenang pemilu tahun 2013 dengan perolehan suara sebanyak 66%. Pada umumnya, informasi tersebut mereka dapatkan melalui media sosial Facebook, yang disebarluaskan secara menyeluruh oleh pihak CNRP. Hasil wawancara dengan Yong Kim Eng (Dewan Direksi COMFREL), tanggal 24 September 2016, di Ochidee Restaurant, Phnom Penh.

*protests in Cambodia (...). The boycott of parliament was also done by the CNRP, because they still cannot accept NEC decision.*¹⁰¹

Dari report yang tersebar melalui media sosial (Facebook), pihak CNRP menyatakan bahwa seharusnya mereka dapat memenangkan pemilu dengan perolehan sebesar 66%. Kecurangan skala besar yang dilakukan oleh NEC (atas perintah CPP) pada akhirnya membuat kemenangan tersebut gagal diraih. Kemenangan yang diraih CPP tersebut pada akhirnya mengundang salah satu protes 'berdarah' terbesar di Kamboja (...). Pemboikotan terhadap parlemen juga dilakukan oleh pihak CNRP, yang masih tidak terima dengan keputusan NEC.

Lebih lanjut, Kim Eng menjelaskan bahwa kekalahan tersebut pada akhirnya mengundang protes besar dari para pendukung CNRP. Hal tersebut tergambarkan dari beberapa peristiwa demonstrasi yang terjadi pasca ditetapkannya CPP sebagai pemenang pemilu. Salah satu protes terbesar terjadi di provinsi Phnom Penh, yang merupakan wilayah kekuasaan CNRP. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh LICADHO, demonstrasi yang terjadi di wilayah ibu kota tersebut dihadiri oleh kurang lebih 20.000 pendukung CNRP. Demonstrasi tersebut berakhir ricuh setelah pemerintah memutuskan untuk mengerahkan pasukan militer dalam skala yang besar. Akibatnya, terdapat dua demonstran yang menjadi korban jiwa, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka dan ditangkap oleh pihak berwajib.¹⁰²

Selain masyarakat, protes juga datang dari pihak CNRP yang secara tegas menolak hasil pemilu yang dikeluarkan oleh NEC. Protes tersebut direalisasikan dalam bentuk pemboikotan terhadap parlemen Kamboja, sehingga fungsi parlemen di Kamboja pada saat itu tidak berjalan seperti semestinya. Pemboikotan tersebut pada akhirnya berakhir tiga tahun berselang, setelah kedua belah pihak memutuskan untuk berdamai.¹⁰³

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Lihat LICADHO, *Year 2013 in Review: Cambodian Election*, diakses melalui <http://www.licadho-cambodia.org/articles/20140318/139/index.html> pada tanggal 10 April 2017 pukul 19.56 WIB dan ABC News, *Cambodian Leaders Meet After Violent Protest*, diakses melalui <http://www.abc.net.au/news/2013-09-16/an3a-cambodia27s-leaders-meet-amidst-violent-protests/4960620> pada tanggal 10 April 2017 pukul 19.58 WIB.

¹⁰³ Dalam amandemen Konstitusi Kamboja, ditetapkan sebuah peraturan bahwa parlemen Kamboja hanya dapat berjalan jika terdapat 120 anggota aktif yang menduduki kursi parlemen. Dengan pemboikotan yang dilakukan oleh CNRP, secara tidak langsung seharusnya parlemen Kamboja tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai mestinya. Namun, dengan kekuatan yang dimiliki, CPP tetap menjalankan parlemen Kamboja meskipun tanpa kehadiran CNRP. Bahkan, pasca pemboikotan yang dilakukan oleh CNRP, parlemen Kamboja langsung mengesahkan dua undang-undang yang masing-masing menguntungkan pihak CPP. Tindakan tersebut menimbulkan protes besar dari pihak CNRP maupun masyarakat. Tekanan tersebut pada akhirnya membuat CPP harus

3.2 Kondisi-Kondisi yang Melatarbelakangi Kekalahan CPP di Wilayah Urban pada Pemilu Tahun 2013

Fenomena penurunan jumlah kursi CPP, yang berujung pada kekalahan di wilayah urban, tentunya menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Meskipun memiliki kekuatan yang besar —jika dilihat dari empat strategi yang digunakan untuk memenangkan pemilu— mengapa CPP gagal untuk mempertahankan dominasi perolehan kursi mereka khususnya di wilayah urban (Kampong Cham, Phnom Penh, Prey Veng, Kandal)?

Dalam subbab ini, penulis akan menjawab pertanyaan tersebut dengan menjabarkan peristiwa dan kondisi penting yang terjadi di wilayah urban Kamboja, sehingga pada tahapan berikutnya membuat CPP mengalami kekalahan di wilayah urban pada pemilu tahun 2013. Dalam menganalisis fenomena ini, penulis menggunakan teori *Dominant Party Authoritarian Regimes* dari Kenneth Greene. Secara garis besar, teori ini menjelaskan bahwa dominasi yang dimiliki oleh partai pemerintah dalam rezim otoriter kompetitif bisa saja diruntuhkan oleh kekuatan partai oposisi. Meskipun memiliki berbagai keunggulan untuk memenangkan pemilu, Greene berargumen bahwa kekalahan tersebut dilatarbelakangi oleh dua kondisi penting yang terjadi di Meksiko: (1) kinerja dan kebijakan pemerintah yang menimbulkan permasalahan bagi masyarakat; dan (2) strategi yang dilakukan pihak oposisi dalam memobilisasi suara masyarakat.¹⁰⁴ Dalam tulisan ini, penulis juga menggunakan konsep *International Election Observation* yang dikemukakan oleh Thomas Carothers untuk menyempurnakan teori *Dominant Party Authoritarian Regimes*. Selain dua kondisi yang dijelaskan dalam teori Greene, penulis juga melihat bahwa kondisi penurunan praktik intimidasi politik yang dilakukan oleh pengawas pemilu internasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

membuat kesepakatan dengan CNRP. Kesepakatan antara kedua belah pihak akhirnya terwujud pada tahun 2016. Terdapat beberapa poin penting dalam perjanjian tersebut, seperti: pemberian kekuasaan bagi Sam Rainsy dan CNRP dalam menentukan sikap politik di Parlemen; hak menggunakan televisi sebagai media kampanye CNRP; dan mereformasi struktur NEC, dimana CNRP kini dapat mengutus empat wakilnya dalam komisi tersebut sehingga menghindari terjadinya kecurangan pemilu di Kamboja seperti beberapa penyelenggaraan sebelumnya. Lihat Meas Sokchea, *CNRP to End Boycott*, diakses melalui <http://www.phnompenhpost.com/national/cnrp-end-boycott-return-national-assembly> pada tanggal 10 April 2017 pukul 20.05 WIB dan Xin Hua, *Cambodian Opposition Agrees to End Boycott*, diakses melalui http://usa.chinadaily.com.cn/world/2014-07/22/content_17898972.htm pada tanggal 10 April 2017 pukul 20.44 WIB.

¹⁰⁴ Greene. *Op. Cit.*, hlm. 1-31.

kemenangan sebuah partai oposisi di suatu wilayah yang bersifat otoriter. Dalam hal ini, pengawas pemilu internasional dapat memberikan iklim pemilu yang lebih aman dan meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan partai pemerintah, sehingga partai oposisi memiliki kemungkinan lebih besar untuk memenangkan pemilu.¹⁰⁵

Berangkat dari penjabaran teori dan konsep tersebut, penulis menyimpulkan bahwa terdapat tiga peristiwa dan kondisi yang melatarbelakangi kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013, yaitu: (1) penurunan kinerja dan permasalahan dalam pemerintahan Hun Sen; (2) perbedaan isu dan strategi kampanye yang digunakan CPP dan CNRP; dan (3) penurunan praktik intimidasi politik oleh militer. Ketiga kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi empat strategi pemilu CPP —strategi *vote buying*, strategi intimidasi politik, penyalahgunaan sumber daya negara, dan kecurangan administratif pemilu— yang telah digunakan sejak pemilu tahun 1998, sehingga tidak berjalan efektif lagi pada pemilu tahun 2013. Penjelasan terkait ketiga kondisi tersebut akan dijabarkan secara lebih mendalam pada tiga subbab berikutnya.

3.2.1 Penurunan Kinerja dan Permasalahan dalam Pemerintahan Hun Sen

Kondisi pertama yang dibahas dalam subbab ini adalah penurunan kinerja dan permasalahan yang terjadi pada masa pemerintahan Hun Sen. Berkaca pada argumentasi yang diungkapkan oleh Greene, penulis melihat bahwa banyaknya permasalahan yang terjadi di Kamboja akibat kinerja dan kebijakan pemerintahan Hun Sen memiliki pengaruh besar terhadap kekalahan mereka sendiri di wilayah urban pada pemilu tahun 2013. Pada pembahasan ini, penulis akan fokus membahas dan menjabarkan permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan Hun Sen, khususnya periode 2008-2013.

Jika dilihat dari konteks historis, permasalahan yang terjadi di Kamboja sebenarnya sudah dimulai sejak Hun Sen menjabat sebagai perdana menteri Kamboja pada tahun 1998. Namun, permasalahan tersebut masih dianggap belum terlalu parah —karena diikuti oleh beberapa pencapaian positif— sehingga masyarakat pada saat itu masih mempercayai bahwa Hun Sen dan CPP merupakan

¹⁰⁵ Carothers. *Op. Cit.*, hlm. 17-31.

sosok yang tepat untuk membawa Kamboja ke arah yang lebih baik.¹⁰⁶ Kondisi tersebut mulai berangsur berubah ketika memasuki periode 2008-2013. Meas Nee berpendapat bahwa permasalahan yang muncul pada periode tersebut semakin bertambah buruk jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

*Many problems occur in Cambodia. But the problem is getting worse in the last period of Hun Sen's regime (2008-2013). There are three major problems that arise at that time: corruption, human rights violations, and economic policies that harm the welfare of society. These three problems led many people to turn to the opposition parties in the 2013 election.*¹⁰⁷

Banyak permasalahan yang terjadi di Kamboja. Namun permasalahan tersebut bertambah parah pada periode terakhir kepemimpinan Hun Sen (2008-2013). Terdapat tiga permasalahan besar yang muncul saat itu: korupsi, pelanggaran HAM, dan kebijakan ekonomi yang merugikan kesejahteraan masyarakat. Ketiga permasalahan tersebut pada akhirnya membuat banyak masyarakat berpaling ke partai oposisi pada pemilu 2013.

Berkaca pada pandangan tersebut, dalam subbab ini penulis hanya fokus untuk membahas tiga permasalahan terbesar yang dialami oleh Kamboja pada masa kepemimpinan Hun Sen periode 2008-2013, yaitu tingginya tingkat korupsi, tingginya tingkat pelanggaran HAM, dan kebijakan ekonomi yang merugikan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.3 Indeks Korupsi Negara-Negara ASEAN Tahun 2013

Negara	Peringkat ASEAN	Peringkat Dunia	Nilai
Singapura	1	5	86
Brunei	2	38	60
Malaysia	3	53	50
Filipina	4	94	36
Thailand	5	102	35
Indonesia	6	114	32
Vietnam	7	116	31
Laos	8	140	26

¹⁰⁶ Meskipun menyebabkan permasalahan, namun kepemimpinan Hun Sen saat itu membawa banyak prestasi. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh World Bank, Kamboja dibawah kepemimpinan Hun Sen memilki beberapa prestasi, seperti: (1) pertumbuhan ekonomi Kamboja yang mencapai rata-rata 7% per tahun; (2) meningkatkan jumlah anak yang mengenyam pendidikan awal (SD); (3) menurunkan angka kematian bayi; (4) menurunkan jumlah pengidap penyakit HIV, malaria, dan tuberculosis; (5) meningkatkan angka ekspektasi hidup masyarakat; dan (6) menurunkan angka kemiskinan. Lebih lanjut lihat World Bank, *Overview Cambodia*, diakses melalui <http://www.worldbank.org/en/country/cambodia/overview> pada tanggal 11 April 2017 pukul 15.42 WIB.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Meas Nee (Pengamat politik Kamboja), tanggal 24 September 2016, di Sunway Hotel, Phnom Penh.

Negara	Peringkat ASEAN	Peringkat Dunia	Nilai
Myanmar	9	157	21
Kamboja	10	160	20

Transparency International, *Corruption Perception Index 2013* (Berlin: Transparency International, 2014), hlm. 5.

Pertama, tingginya tingkat korupsi. Permasalahan korupsi di Kamboja memang sudah mengakar sejak lama, sehingga menjadi sebuah budaya yang kerap dilakukan oleh pemerintah.¹⁰⁸ Namun seiring berjalannya waktu, permasalahan tersebut semakin bertambah buruk, khususnya menjelang dilaksanakannya pemilu tahun 2013. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Transparency International* (TI) tahun 2013, kondisi korupsi di Kamboja dikategorikan sebagai salah satu yang terburuk di dunia (peringkat 160/175), dengan nilai 20/100 (sangat buruk).¹⁰⁹ Kondisi tersebut semakin buruk berkaca pada kondisi korupsi di Kamboja yang tidak lebih baik dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Meskipun kondisi korupsi di Kamboja sempat berada di posisi yang lebih baik dibandingkan Laos dan Myanmar, sejak saat itu penanganan praktik korupsi di Kamboja tidak mengalami kemajuan.¹¹⁰ Data tersebut didukung oleh kajian yang dilakukan oleh Elizabeth Johnson. Menurutnya, kondisi korupsi di Kamboja sudah dalam posisi yang sangat parah, sehingga membuat praktik tersebut merambat ke dalam beberapa ranah negara.¹¹¹

¹⁰⁸ Budaya korupsi di Kamboja sudah terjadi sejak kepemimpinan masa Norodhom Sihanouk. Secara sistematis, Sihanouk memanfaatkan birokrasi yang lemah untuk melakukan praktik korupsi. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada perkembangan ekonomi Kamboja yang mengalami stagnansi. Permasalahan itulah yang pada akhirnya membuat ia dikudeta pada tahun 1970. Lebih lanjut lihat Milton Osborne, *Sihanouk Prince of Light, Prince of Darkness* (United States: University of Hawaii Press, 1994), hlm. 205-206.

¹⁰⁹ Transparency International, *Corruption Perception Index 2013* (Berlin: Transparency International, 2014), hlm. 5.

¹¹⁰ Jika dibandingkan dengan data yang dikeluarkan TI pada tahun 2007, dapat dilihat bahwa kondisi korupsi di Laos dan Myanmar lebih buruk dibandingkan dengan Kamboja. Pada saat itu, nilai indeks korupsi Kamboja berada di angka 20 (peringkat 162). Kondisi tersebut sedikit lebih baik dibandingkan dengan Laos dan Myanmar yang masing-masing nilai indeks korupsi mereka di angka 19 (peringkat 168) dan 14 (peringkat 179 terakhir). Namun, enam tahun berselang kondisi ketiga negara tersebut berbeda. Disatu sisi Laos dan Myanmar mengalami peningkatan kualitas penanganan korupsi, namun disisi lain Kamboja masih belum menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi praktik korupsi yang semakin bertambah parah. Lihat Transparency International, *World Corruption Perception Index Result Year 2013*, diakses melalui https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2007/0/#results pada tanggal 11 April 2017 pukul 16.12 WIB.

¹¹¹ Elizabeth Johnson menggunakan definisi yang diungkapkan oleh TI untuk melihat fenomena korupsi di Kamboja, yaitu 'penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi'. Dengan definisi tersebut, maka korupsi tidak hanya identik dengan uang, namun juga penyalahgunaan kekuasaan.

Tabel 3.4 Praktik Korupsi yang Dilakukan Pemerintah Kamboja Hingga Tahun 2013

Ranah	Penjelasan
Sumber daya alam	Pemerintah memanfaatkan akses terhadap sumber daya alam khususnya tanah, hutan, dan minyak untuk kepentingan partai CPP, khususnya untuk kebutuhan kampanye pemilu.
Pengadilan	Pemerintah memiliki kontrol besar terhadap pengadilan Kamboja, sehingga membuat lembaga tersebut tidak bersifat netral. Dalam beberapa kasus, pemerintah menggunakan kekuatannya tersebut untuk merugikan masyarakat dan menguntungkan pihak CPP. Secara garis besar kasus yang merugikan masyarakat dapat dilihat dari kasus pembunuhan Chut Wutty yang tidak dilanjutkan, sedangkan kasus Chhouk Bandith (anggota CPP) yang hanya dihukum 18 bulan setelah membunuh demonstran merupakan bukti kasus yang menguntungkan CPP.
Keuangan Publik	Pemerintah memanfaatkan keuangan negara yang dimiliki untuk kepentingan CPP. Salah satu bentuknya adalah penyalahgunaan dana yang diberikan Global Fund untuk memerangi penyakit AIDS, tuberculosis dan malaria, yang berjumlah sebanyak US\$ 317.000.
Pemilu	Pemerintah memanfaatkan kontrol besar terhadap NEC untuk membantu CPP memenangkan pemilu.
Media	Korupsi terhadap media dapat dilihat monopoli yang dilakukan oleh pemerintah terhadap hampir seluruh media di Kamboja (khususnya televisi dan radio). Selain itu, pemerintah juga membatasi akses oposisi untuk menggunakan media tersebut sebagai sarana kampanye.

Sumber: Elizabeth Johnson, *Corruption and Cambodia's Governance System: The Need for Reform* (Phnom Penh: Transparency International, 2014), hlm. 17.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik korupsi yang terjadi di Kamboja sudah merambat hingga mencapai lima ranah penting negara, yaitu: sumber daya alam negara, pengadilan, keuangan publik, pemilu, dan media. Hal tersebut dapat terjadi mengingat kuatnya kontrol dan pengaruh yang dimiliki oleh pemerintah terhadap ranah tersebut, sehingga pemerintah dapat dengan mudah mengeksploitasi dan menyalahgunakan kelima ranah tersebut.

Banyaknya praktik korupsi yang dengan bebas dilakukan oleh pemerintah juga dilatarbelakangi oleh lemahnya fungsi dua lembaga anti-korupsi Kamboja, yang bernama *Anti-Corruption Unit* (ACU) dan *National Council Against Corruption*

Lihat Elizabeth Johnson, *Corruption and Cambodia's Governance System: The Need for Reform* (Phnom Penh: Transparency International, 2014), hlm. 17.

(NCAC).¹¹² Secara resmi, lembaga tersebut berdiri pada tahun 2010 lewat pengesahan undang-undang anti-korupsi. Namun, fungsi ACU dan NCAC sebagai lembaga anti-korupsi terhambat oleh intervensi yang dilakukan oleh CPP. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Johnson, ditemukan sebuah fakta bahwa mayoritas dari anggota senior ACU, termasuk ketuanya, merupakan anggota CPP. Hal yang sama juga terjadi dengan NCAC, dimana mayoritas anggota mereka dipilih oleh kementrian, yang secara tidak langsung memiliki afiliasi dengan CPP.¹¹³ Kondisi tersebut tentunya membuat fungsi ACU dan NCAC menjadi tidak maksimal, sehingga praktik korupsi di Kamboja tidak dapat diberantas secara menyeluruh.

Kedua, tingginya tingkat pelanggaran HAM. Seperti halnya korupsi, kasus pelanggaran HAM di Kamboja juga sudah terjadi sejak lama. Namun, permasalahan tersebut semakin memburuk pada periode 2008-2013, khususnya menjelang diselenggarakannya pemilu tahun 2013. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh LICADHO, kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2012 LICADHO menemukan sebanyak 804 kasus, pada tahun 2013 kasus pelanggaran HAM di Kamboja mengalami peningkatan menjadi 972 kasus. Dari 972 laporan kasus yang diterima, LICADHO hanya dapat mengintervensi dan mengidentifikasi 485 kasus yang ada. Dari jumlah tersebut, pelanggaran HAM terbanyak yang ditemukan oleh LICADHO merupakan pelanggaran yang bermotivasi politik. Pelanggaran tersebut mengalami peningkatan drastis jika dibandingkan dengan tahun 2012, dimana pada tahun tersebut LICADHO hanya menemukan sebanyak 22 kasus, sedangkan pada tahun 2013 pelanggaran tersebut bertambah banyak menjadi 140 kasus. Pada umumnya, pelanggaran yang ditemukan tersebut berbentuk intimidasi yang dilakukan oleh militer dan polisi, terhadap masyarakat Kamboja, menjelang penyelenggaraan pemilu tahun 2013.¹¹⁴ Selain itu, LICADHO

¹¹² Meskipun dibentuk secara bersamaan, namun kedua lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda. ACU memiliki fungsi untuk mengimplementasikan hukum terkait korupsi dan mencegah terjadinya korupsi di Kamboja. Sementara itu, NCAC memiliki fungsi untuk mengkaji kebijakan terkait anti-korupsi dan mengembangkan strategi pencegahan korupsi yang akan diimplementasikan oleh ACU.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 138-139.

¹¹⁴ LICADHO, *Human Rights 2013: The Year in Review* (Phnom Penh: LICADHO. 2014), hlm. 14-15.

juga menyebutkan bahwa pelanggaran tersebut terus terjadi meskipun hasil pemilu tahun 2013 telah resmi diumumkan, dimana pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan terhadap pihak demonstran yang tidak menerima hasil kemenangan CPP pada pemilu tahun 2013.¹¹⁵

Selain pelanggaran tersebut, terdapat beberapa bentuk pelanggaran HAM yang ditemukan, seperti kasus *human trafficking* (*labour* dan *sexual trafficking*), kasus perampasan tanah, kasus aktivis HAM, dan kasus kebebasan pers.¹¹⁶ Dari total 485 kasus yang diidentifikasi, hanya 145 kasus (30%) di antaranya yang dapat diselesaikan melalui pengadilan tinggi Kamboja, meskipun tidak banyak dari kasus tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan netral.¹¹⁷ Data yang dipaparkan tersebut tentunya menunjukkan rendahnya komitmen yang dimiliki oleh pemerintah Kamboja untuk meningkatkan keamanan serta menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM di Kamboja, sehingga pada akhirnya berdampak negatif terhadap kondisi penegakan HAM di masyarakat.

Ketiga, kebijakan ekonomi yang merugikan kesejahteraan masyarakat Kamboja. Sejak awal kepemimpinannya, Hun Sen selalu menekankan pentingnya meningkatkan laju perekonomian Kamboja. Dalam visinya, Hun Sen berambisi untuk mengubah Kamboja sebagai *middle-income country* pada tahun 2030, dan *high-income country* pada tahun 2050.¹¹⁸ Hal tersebut berdampak pada tingginya rata-rata pertumbuhan GDP Kamboja yang mencapai hingga 7,7% tiap tahunnya,

¹¹⁵ Selain LICADHO, penulis juga melihat beberapa kasus penting yang dilaporkan oleh *Human Right Watch* (HRW). Berdasarkan data tersebut, terdapat sebanyak 30 kasus yang ditemukan terkait penyiksaan terhadap narapidana. Tidak sedikit dari narapidana tersebut yang sebenarnya dipenjara karena mengemukakan kritiknya terhadap pemerintah di muka umum. Lebih lanjut lihat Human Right Watch, 2013, *Cambodia 2013 Human Rights Reports*, Diunduh melalui <https://www.state.gov/documents/organization/220395.pdf>.

¹¹⁶ Setelah pelanggaran HAM bermotivasi politik, pelanggaran HAM terbesar kedua yang terjadi di Kamboja merupakan kasus *human trafficking* yang berjumlah hingga 108 kasus, yang melibatkan hingga 336 korban. Dari jumlah tersebut, 100 diantaranya merupakan kasus *child labour* dan 8 sisanya merupakan kasus *sexual trafficking*.

¹¹⁷ LICADHO, *Op. Cit.*, hlm. 14.

¹¹⁸ *Middle income country* didefinisikan memiliki GNI per kapita sebesar US\$ 4.036 hingga US\$ 12.475. Sedangkan untuk *high income country* didefinisikan memiliki GNI per kapita sebesar US\$ 12.475 keatas. Lebih lanjut lihat The World Bank, *World Bank Country and Lending Groups: Country Classification*, diakses melalui <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups> pada tanggal 12 April 2017 pukul 18.48 WIB.

sehingga berhasil dinobatkan oleh *World Bank* sebagai salah satu *high growth country*.¹¹⁹

Di balik kesuksesan tersebut, nyatanya pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Kamboja harus mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Menurut kajian Hughes, kondisi tersebut berawal sejak krisis ekonomi yang melanda Kamboja pada tahun 2009. Untuk menjaga perekonomian negara tetap stabil, Hun Sen melakukan eksploitasi terhadap industri garmen di Kamboja. Dalam hal ini, Hun Sen menginstruksikan untuk menurunkan upah pekerja garmen menjadi hanya US\$ 80 per bulan. Di sisi lain, pekerja garmen tersebut diharuskan untuk berkerja lembur (*overtime*), sehingga diharapkan kondisi perekonomian Kamboja dapat kembali normal dalam jangka waktu satu tahun.¹²⁰ Hasilnya, GDP Kamboja pada tahun 2010 kembali normal di angka 6%, meskipun berada dititik 0,1% pada tahun sebelumnya (tahun 2009). Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik jika berkaca pada kondisi yang dialami oleh pekerja garmen pasca krisis.¹²¹ Selain upah pekerja yang tidak dikembalikan seperti sedia kala (US\$ 140-150), data yang dikeluarkan oleh *The Asia Foundation* menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 60.000 pekerja garmen yang kehilangan pekerjaannya.¹²² Menurut Rithy, selaku aktivis pembela pekerja garmen Kamboja, kondisi buruk tersebut memicu adanya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh pekerja garmen kepada pemerintah. Puncak dari demonstrasi tersebut terjadi pada tahun 2013 di provinsi Phnom Penh, dimana 600 pekerja garmen di pabrik SL melakukan demonstrasi dan mogok kerja. Akibat dari demonstrasi tersebut, satu orang dilaporkan menjadi korban jiwa, sembilan orang mengalami luka parah, serta 30 orang lainnya di tahan oleh pihak berwajib.¹²³

¹¹⁹ Vannarith Chheang, *After Thirty Years of Hun Sen, Where is Cambodia Now?*, diakses melalui <http://www.eastasiaforum.org/2015/03/18/after-thirty-years-of-hun-sen-where-is-cambodia-now/> pada tanggal 12 Agustus 2017 pukul 18.50 WIB.

¹²⁰ Hughes, 2013, *Op. Cit.*, hlm. 12-13.

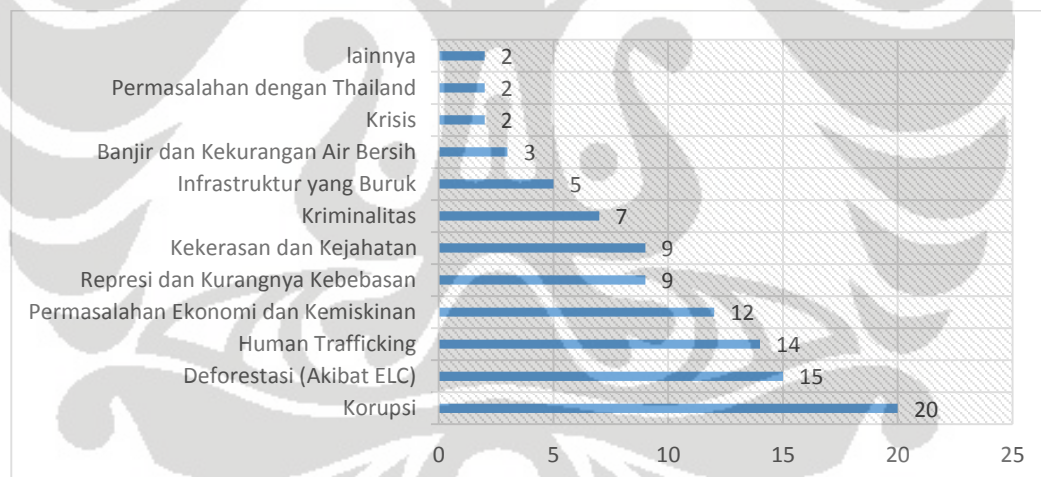
¹²¹ Kaoru Natsuda, 2009, "Challenges to the Cambodian Garment Industry in the Global Garment Value Chain", *Working Paper*, hlm. 4-6.

¹²² Veronique Salze-Lozach, *Cambodia's Garment Sector and the Global Economic Crisis*, diakses melalui <http://asiafoundation.org/2009/07/08/cambodias-garment-sector-and-the-global-economic-crisis/> pada tanggal 12 April 2017 pukul 18.56 WIB.

¹²³ Hasil wawancara dengan Rithy (Masyarakat/Aktivis Serikat Pekerja), tanggal 22 September 2016, di Sunway Hotel, Phnom Penh. Lihat juga ILO, *Thirtieth Synthesis Report on Working Condition in Cambodia's Garment Sector* (Geneva: ILO, 2013), hlm. 1-14.

Selain kebijakan tersebut, kebijakan ekonomi Hun Sen lainnya yang merugikan masyarakat adalah ELC, yang secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai perampasan tanah (*land grabbing*). Seperti yang sudah disampaikan dalam bab 2, kebijakan ini terbukti meningkatkan perekonomian Kamboja, namun disisi lain kebijakan tersebut juga berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika diakumulasi, sudah terdapat 1.934.896 hektar tanah yang diambil paksa oleh pemerintah dari kurang lebih 830.000 orang, sejak diberlakukannya ELC. Jumlah kasus tersebut masih relatif tinggi menjelang diselenggarakannya pemilu tahun 2013. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Cambodian Human Rights and Development Association* (ADHOC), terdapat 135 kasus pengambilan tanah yang berjumlah sebanyak 36.864 hektar, serta merugikan sebanyak 6.488 keluarga sehingga membuat mereka kehilangan tempat tinggal maupun lahan mata pencaharian.¹²⁴

Grafik 3.1 Permasalahan Terbesar di Kamboja Menurut Pandangan Masyarakat (%)



Silas Everett, "Democracy in Cambodia 2014: A Survey of the Cambodian Electorate" (Phnom Penh: The Asia Foundation Research, 2014), hlm. 18.

Ketiga permasalahan yang telah dibahas tersebut —permasalahan korupsi, pelanggaran HAM, dan kebijakan ekonomi— pada akhirnya merubah pandangan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya mereka yang berada di wilayah urban. Menurut Meas Nee, meskipun masyarakat di wilayah urban dan wilayah rural sama-sama tidak puas dengan permasalahan yang

¹²⁴ ADHOC, *Land Situation in Cambodia 2013* (Phnom Penh: ADHOC, 2014), hlm. 25-26.

ditimbulkan Hun Sen, namun berkaca pada tingginya kesadaran politik yang dimiliki oleh masyarakat urban, maka ketidakpuasaan dan protes terhadap pemerintah lebih banyak diutarakan oleh masyarakat di wilayah urban.¹²⁵ Ketidakpuasaan tersebut dapat terlihat dari survey yang dilakukan oleh *The Asian Foundation*, tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap pemerintah Kamboja mengalami penurunan dalam jangka waktu 11 tahun. Jika pada tahun 2003, 81% masyarakat Kamboja yakin bahwa pemerintah Kamboja dapat membawa mereka ke arah yang lebih baik, namun pada tahun 2014, 59% masyarakat Kamboja menilai pemerintah telah gagal membawa Kamboja ke jalan yang benar, mengingat banyaknya permasalahan yang terjadi, seperti: korupsi (20%), deforestasi sebagai akibat ELC (15%), *human trafficking* (14%), kondisi ekonomi dan kemiskinan (12%), serta represi dan kurangnya kebebasan (9%).¹²⁶

3.2.2 Perbedaan Isu dan Strategi Kampanye yang Digunakan CPP dan CNRP

Kondisi berikutnya yang dibahas dalam subbab ini adalah perbedaan isu dan strategi kampanye yang digunakan oleh CPP dan CNRP pada pemilu tahun 2013. Berangkat dari argumentasi kedua yang diungkapkan oleh Greene dalam teori *Dominant Party Authoritarian Regimes*, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pilihan isu dan strategi kampanye yang digunakan oleh partai pemerintah dan partai oposisi memiliki dampak signifikan terhadap hasil perolehan kursi partai dalam pemilu. Dalam kasus Kamboja, CNRP yang dianggap lebih tepat dalam memilih isu dan strategi kampanye dibandingkan CPP, pada akhirnya berhasil memenangkan kursi terbanyak di wilayah urban pada pemilu tahun 2013.

Dalam membahas kondisi ini, penulis terlebih dahulu akan menjabarkan kedua isu yang digunakan oleh masing-masing partai. Meskipun secara keseluruhan

¹²⁵ Menurut Meas Nee, perbedaan kesadaran politik antara masyarakat urban dan rural di Kamboja dilatarbelakangi oleh informasi yang didapat dari media. Masyarakat di wilayah rural hanya mengandalkan informasi dari televisi dan radio, yang banyak dipengaruhi oleh propaganda pemerintah. Sementara itu, masyarakat urban tidak hanya mengandalkan informasi yang diperoleh dari televisi dan radio, karena memiliki sumber informasi dari media internet yang lebih netral dibandingkan dengan media lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya kesadaran politik masyarakat urban, yang mengetahui banyaknya permasalahan pemerintahan Hun Sen dari informasi di media internet. Dengan hal tersebut, masyarakat urban sepakat untuk menginginkan perubahan, dan menolak penerimaan *vote buying* oleh CPP. Hasil wawancara dengan Meas Nee (Pengamat politik Kamboja), tanggal 24 September 2016, di Sunway Hotel, Phnom Penh.

¹²⁶ Silas Everett, "Democracy in Cambodia 2014: A Survey of the Cambodian Electorate" (Phnom Penh: The Asia Foundation Research, 2014), hlm. 18.

terdapat delapan partai peserta yang mengikuti penyelenggaraan pemilu tahun 2013, penulis dalam subbab ini hanya membahas isu partai yang diangkat oleh CPP dan CNRP pada pemilu tahun 2013.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kheang Un, pada dasarnya CPP dan CNRP mengambil isu kampanye yang berbeda pada pemilu tahun 2013. Disatu sisi, CPP masih menggunakan isu yang sama seperti yang mereka gunakan untuk memenangkan pemilu tahun 2008, yaitu isu Khmer Rouge.¹²⁷ Dalam hal ini, CPP menekankan pentingnya kehadiran mereka di Kamboja —khususnya Hun Sen— sebagai pahlawan yang telah berjasa membebaskan masyarakat Kamboja dari pasukan Khmer Rouge, yang dipimpin oleh Pol Pot. Dengan jasa tersebut, pada akhirnya Kamboja dapat mengalami perkembangan dalam berbagai hal, khususnya dalam bidang ekonomi, infrastruktur, stabilitas dan keamanan negara.¹²⁸ Selain isu tersebut, CPP juga menggunakan isu kampanye hitam (*black campaign*) untuk menyerang rivalnya, CNRP. Dalam hal ini, CPP mengintimidasi dan memaksa masyarakat untuk memilih mereka dalam pemilu, jika ratusan proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Kamboja ingin tetap berlanjut, mengingat biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan proyek tersebut berasal dari CPP. Propaganda lainnya yang digunakan merupakan isu perang saudara, dimana CPP mengancam akan menyerang pemerintahan CNRP dengan kekuatan militer yang dimiliki jika CNRP berhasil memenangkan pemilu tahun 2013.¹²⁹

Berbeda dengan CPP, CNRP mengangkat isu kampanye yang berkaitan dengan permasalahan yang belum terselesaikan di Kamboja serta memenuhi kebutuhan

¹²⁷ Seperti yang dilansir oleh *Phnom Penh Post*, pada tahun 2008 CPP menggunakan isu utama Khmer Rouge dalam kampanye partai. Dalam hal ini, CPP menekankan pentingnya kehadiran mereka di Kamboja. Tanpa CPP, Kamboja akan tetap berada di bawah kepemimpinan Pol Pot (Khmer Rouge), sehingga kondisi Kamboja tidak akan mengalami perkembangan seperti saat ini, khususnya dalam hal ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan keamanan negara. Isu tersebut pada akhirnya membawa CPP mendominasi pemilu tahun 2008 dengan perolehan sebanyak 90 kursi parlemen. Lihat Vong Sokheng, *CPP Campaigns in its Achievements*, diakses melalui <http://www.phnompenhpost.com/national/cpp-campaigns-its-achievements> pada tanggal 16 April 2017 pukul 16.26 WIB.

¹²⁸ Kheang Un, *Op. Cit.*, hlm. 103-116.

¹²⁹ Berdasarkan laporan yang diterima oleh LICADHO, propaganda tersebut dikeluarkan terhadap 4.000 orang yang menghadiri kampanye tersebut. Selain itu, CPP juga melakukan penyerangan terhadap wakil ketua CNRP, Kem Sokha. Dalam hal ini, CPP menuduh Kem Sokha telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan. Bahkan, CPP juga membentuk demonstrasi buatan yang bertajuk “anti-Sokha”, agar ia mundur dari jabatannya. Lebih lanjut lihat LICADHO, 2013, *Op. Cit.*, hlm. 4-5.

yang dimiliki masyarakat. Dengan menggunakan slogan “*change*”, CNRP berjanji akan memperbaiki permasalahan yang timbul akibat kepemimpinan Hun Sen, seperti kasus korupsi, imigran ilegal, *land grabbing*, serta pelanggaran HAM.¹³⁰ Selain itu, jika terpilih, CNRP juga berjanji untuk mencukupi beberapa kebutuhan mendasar masyarakat Kamboja, seperti: memberi uang pensiun kepada orang diatas 65 tahun sebesar US\$ 10, meningkatkan upah minimum pekerja menjadi US\$ 150, meningkatkan upah minimum pegawai negeri sipil menjadi US\$ 250, menurunkan harga hasil pertanian menjadi US\$ 0,25 per kg, fasilitas kesehatan gratis kepada masyarakat miskin, akses pendidikan yang adil, serta menurunkan harga gas, pupuk, dan listrik.¹³¹

Selain isu yang diangkat, lebih lanjut penulis juga membahas strategi kampanye yang digunakan oleh CPP dan CNRP. Sama halnya dengan isu kampanye, kedua partai tersebut juga menggunakan strategi kampanye yang berbeda— berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Disatu sisi, CPP dengan superioritas sumber daya yang dimiliki, menggunakan media televisi dan radio sebagai media kampanye utama mereka. Jika diakumulasi, CPP memiliki atau mengontrol 64 stasiun radio dan 15 stasiun televisi yang dapat digunakan sebagai media kampanye, dimana sebagian besar dari akses media tersebut diblokir dan dibatasi oleh CPP agar pihak oposisi tidak dapat memanfaatkan media tersebut.¹³² Selain media, CPP juga memanfaatkan sumber daya negara yang dimiliki untuk melakukan praktik *vote buying* dan intimidasi politik. Dengan keunggulan tersebut, maka CPP dapat dengan mudah mempengaruhi masyarakat pemilih, baik yang berada di berada di

¹³⁰ Slogan yang dipilih oleh CNRP merupakan bentuk kritikan terhadap CPP. Dalam hal ini, CNRP mengajak masyarakat untuk bersama-sama memilih mereka dalam pemilu tahun 2013, agar dapat mengubah kondisi buruk yang sedang dialami oleh Kamboja saat ini. Lebih lanjut lihat Noren Nilsson, “Election and Emerging Citizenship in Cambodia”, *Citizenship and Democratization in Southeast Asia*, Vol. 115, No. 1, (2016), hlm. 68-95.

¹³¹ Women’s Media Centre of Cambodia, 2013, *Op. Cit.*, hlm. 11-12.

¹³² Meskipun memiliki dan mengontrol media tersebut, namun hanya sebagian kecil dari media tersebut yang sepenuhnya digunakan sebagai media kampanye CPP. Berdasarkan laporan COMFREL, CPP hanya menggunakan FM 95 sebagai media radio, serta Bayon TV, *Cambodian Television Network* (CTN), *Cambodian News Channel* (CNC) dan APSARA Tvstation untuk media televisi. CPP tetap menggunakan beberapa media yang tidak disebutkan tersebut untuk keperluan kampanye, walaupun tidak bersifat secara penuh. Meskipun hanya sedikit, CPP tidak hanya memanfaatkan waktu berita media tersebut sebagai sarana kampanye, namun juga terdapat beberapa program radio dan televisi yang diselundupkan isu kampanye CPP. Lebih lanjut lihat COMFREL, 2013, *Op. Cit.*, hlm. 31.

wilayah urban dan khususnya di wilayah rural, berkaca pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya (1998-2008).

Di sisi lain, CNRP yang tidak memiliki keunggulan seperti CPP harus menyusun strategi untuk memaksimalkan sumber daya terbatas yang dimiliki, sehingga dapat bersaing dengan CPP.

*When compared with CPP, we (CNRP) clearly has no equivalent power. Almost all media in Cambodia are controlled by the government. This condition made us use the internet media, especially Facebook, and some private radio stations for campaign to spread CNRP campaign (...). Considering that it is very difficult to compete in rural areas, we are focused only on campaigning in urban areas, particularly to mobilize young people.*¹³³

Jika dibandingkan dengan CPP, kami (CNRP) jelas tidak memiliki kekuatan yang sepadan. Hampir seluruh media yang beroperasi di Kamboja dikontrol oleh pemerintah. Kondisi tersebut pada akhirnya membuat kami menggunakan media internet, khususnya Facebook, dan beberapa stasiun radio privat untuk berkampanye menyebarkan informasi CNRP (...). Mengingat sangat sulit untuk berkompetisi di wilayah rural, kami pada akhirnya hanya berfokus untuk berkampanye di wilayah urban, khususnya memobilisasi masyarakat muda.

Berdasarkan pernyataan Pich Sovann tersebut, keterbatasan akses yang dimiliki CNRP tersebut pada akhirnya membuat mereka sepakat untuk menggunakan media internet sebagai media utama kampanye, serta beberapa stasiun radio yang bebas kontrol CPP. Media internet, khususnya Facebook, merupakan satu-satunya media yang efektif digunakan oleh CNRP untuk berkampanye mengingat tidak ada pembatasan dan pelarangan akses yang dilakukan oleh CPP terhadap media ini pada saat itu.¹³⁴ Selain itu, media ini juga dianggap efektif untuk memobilisasi masyarakat pemilih khususnya mereka yang berada di wilayah urban dan dari kalangan muda, mengingat mayoritas pengguna media internet berasal dari

¹³³ Hasil wawancara dengan Pich Sovann (Anggota partai CNRP), tanggal 24 September 2016, di Sunway Hotel, Phnom Penh.

¹³⁴ Meskipun memiliki satu stasiun radio (93.5 FM), namun sinyal radio tersebut hanya dapat diterima di provinsi Phnom Penh dan Battambang saja, sehingga tidak dapat mencakup 22 provinsi lainnya. Dengan kondisi tersebut, maka CNRP memutuskan untuk menggunakan media internet yang tidak dapat dihalangi pengaksesannya oleh CPP. Namun, mengingat media tersebut baru mengalami perkembangan pesat dalam lima tahun terakhir, pada akhirnya mayoritas masyarakat yang dapat mengakses kampanye CNRP hanya mereka tinggal di wilayah urban. Lihat COMFREL, 2013, *Op. Cit.*, hlm. 32.

golongan tersebut (urban dan kalangan muda).¹³⁵ Meskipun keterbatasan tersebut membawa CNRP kepada media kampanye baru yang lebih efektif, keterbatasan tersebut juga memberikan dampak negatif terhadap CNRP. Menurut Pich Sovann, kuatnya pengaruh CPP di wilayah rural membuat akses CNRP terhadap wilayah tersebut menjadi terbatas. Pich Sovann menerangkan bahwa CNRP tetap melakukan kampanye di beberapa wilayah rural, akan tetapi keterbatasan tersebut pada akhirnya membuat usaha CNRP menjadi tidak maksimal.¹³⁶ Kondisi tersebut membuat CNRP lebih fokus untuk berkampanye dan memobilisasi masyarakat urban pada pemilu tahun 2013.

Tabel 3.5 Perbandingan Isu, Strategi, dan Target Kampanye CPP dan CNRP pada Pemilu Tahun 2013

Variabel	CPP	CNRP
Isu Kampanye	Fokus membawa isu Khmer Rouge. Dalam hal ini, CPP menekankan pentingnya kehadiran mereka di Kamboja sebagai pahlawan yang membebaskan masyarakat dari pasukan Khmer Rouge, sehingga kondisi Kamboja dapat mengalami perkembangan, khususnya dalam bidang ekonomi, infrastruktur, dan keamanan negara.	Fokus membawa isu permasalahan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, CPP berjanji akan memperbaiki permasalahan yang terjadi pada masa pemerintahan Hun Sen, seperti: korupsi, imigran ilegal, <i>land grabbing</i> , dan pelanggaran HAM. Selain itu, CNRP juga berjanji meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti: memberikan uang pensiun, meningkatkan upah minimum pekerja dan pegawai negeri sipil, menurunkan harga hasil pertanian, fasilitas kesehatan gratis, akses pendidikan adil, serta menurunkan harga gas, pupuk, dan listrik.

¹³⁵ Penelitian yang dilakukan oleh UNDP membuktikan bahwa pengguna media internet di Kamboja mayoritas berasal dari umur 12-24 tahun (34%) dan berada di wilayah urban (65%). Selain itu, mayoritas media internet digunakan sebagai akses untuk membaca berita (73%). Lebih lanjut lihat UNDP, *Media Habits and Information Sources of Youth in Cambodia* (Phnom Penh: UNDP, 2014), hlm. 15.

¹³⁶ Selain karena kuatnya pengaruh dan kekuasaan CPP di wilayah urban, Duncan Mc Cargo berpendapat bahwa Sam Rainsy tidak tertarik untuk berkampanye di wilayah rural mengingat jumlah kursinya yang sedikit jika dibandingkan dengan wilayah urban, sehingga pada akhirnya Sam Rainsy memutuskan untuk memusatkan kampanye di wilayah urban, khususnya Phnom Penh. Lihat Duncan McCargo, "Cambodia in 2013: (No) Country for Old Men?", *Asian Surveys*, Vol. 54, No. 1, (2014), hlm. 75.

Variabel	CPP	CNRP
Strategi Kampanye	Menggunakan media televisi dan radio yang dimiliki dan dikontrol. Selain itu, CPP juga memanfaatkan akses sumber daya yang dimiliki untuk melakukan praktik <i>vote buying</i> dan intimidasi politik	Meskipun memiliki satu stasiun radio, CNRP hanya fokus untuk menggunakan media internet (Facebook) sebagai media utama kampanye.
Target Kampanye	Masyarakat di wilayah urban dan rural.	Masyarakat di wilayah urban, khususnya kalangan muda.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Isu dan strategi kampanye yang digunakan oleh kedua partai tersebut pada akhirnya memberikan dua hasil yang berbeda. Di satu sisi, CPP dengan segala keunggulannya harus mengalami penurunan jumlah kursi yang signifikan, terutama di wilayah urban. Di sisi lain, CNRP dengan segala keterbatasan yang dimiliki berhasil memperoleh sebanyak 55 kursi, sehingga berhasil memenangkan jumlah kursi terbanyak di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013.

Terkait dengan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa isu dan strategi yang digunakan oleh CNRP pada pemilu tahun 2013 berdampak kepada keberhasilan mereka dalam meraih kursi terbanyak di wilayah urban. *Pertama*, isu kampanye yang digunakan oleh CNRP, yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan Kamboja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kamboja. Menurut Kheang Un, isu yang diangkat tersebut tentunya sangat efektif dalam meraih simpati masyarakat pemilih, khususnya mereka yang menginginkan adanya perubahan di Kamboja. Ketepatan pengambilan isu tersebut didukung oleh kesalahan CPP dalam menentukan isu kampanye partai. Dalam hal ini, CPP tidak merubah isu kampanye yang diangkat pada pemilu tahun 2008, yaitu isu Khmer Rouge. Meskipun penting, namun Kheang Un berpendapat bahwa peristiwa tersebut sudah terlalu lama untuk dijadikan sebagai isu utama kampanye, sehingga pada akhirnya mereka gagal untuk mengambil sebagian besar simpati masyarakat, khususnya generasi muda Kamboja yang berada di wilayah urban.¹³⁷ Kesalahan tersebut-pun diakui oleh salah satu anggota CPP, Thol Dina:

Compared to CNRP, the campaign issues that we (CPP) brought are not as interesting for the community. However, the promises we provide here

¹³⁷ Kheang Un, *Op. Cit.*, hlm. 103-116.

*(economics, infrastructure, and security) can be realized, compared to the CNRP's considering their lack of experience.*¹³⁸

Jika dibandingkan dengan CNRP, memang isu kampanye yang dibawa kami (CPP) tidak terlalu menarik bagi masyarakat. Namun, janji yang kami berikan di sini (ekonomi, infrastruktur, dan keamanan) dapat secara realistis di jalankan, dibandingkan dengan janji CNRP mengingat tidak adanya pengalaman.

Meskipun menganggap janji yang diberikan CNRP tidak realistis, namun Thol Dina tidak menampik bahwa isu kampanye yang dibawa CPP tersebut kurang efektif dalam memobilisasi masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak kepada pilihan masyarakat, khususnya di wilayah urban, yang mayoritas beralih memilih CNRP pada pemilu tahun 2013.

Selain isu kampanye, keberhasilan CNRP tersebut juga dilatarbelakangi oleh kecermatan mereka dalam menentukan strategi kampanye pemilu. Strategi pertama dapat dilihat adalah penentuan media kampanye utama CNRP. Meskipun mayoritas media di Kamboja dikontrol oleh CPP, namun CNRP berhasil memanfaatkan dengan baik penggunaan media baru yang tidak dimonopoli oleh CPP, yaitu media internet. Penggunaan media internet tersebut bertujuan untuk menjangkau pemilih di wilayah urban, khususnya kalangan muda. Strategi kedua dapat dilihat dari keputusan CNRP yang hanya memfokuskan kampanye dan mobilisasi masyarakat di wilayah urban saja, mengingat besarnya kekuatan yang dimiliki oleh CPP di wilayah rural. Meskipun kedua strategi tersebut membuat CNRP harus mengalami kekalahan di wilayah rural, namun kedua strategi ini terbukti berhasil merangkul masyarakat urban, khususnya mereka yang berasal dari kalangan muda. Penelitian yang dilakukan oleh Virak Thun membuktikan bahwa CNRP telah berhasil memanfaatkan perubahan demografis Kamboja yang kini didominasi kelompok masyarakat muda (20,5%), dimana 55,2% dari mereka mengaku merupakan pendukung CNRP, sedangkan hanya 6,67% lainnya yang mendukung CPP — sehingga pada akhirnya CNRP berhasil memenangkan sebagian besar jumlah kursi di wilayah urban.¹³⁹

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Thol Dina (Anggota partai CPP/Anggota Kementrian), tanggal 23 September 2016, di Kantor *Ministry of Land Management Urban Planning and Construction*, Phnom Penh.

¹³⁹ Masyarakat muda dikarakteristikan sebagai masyarakat yang berumur 15-24 tahun. Perubahan demografis tersebut juga diikuti dengan perubahan lainnya, seperti peningkatan pendapatan (ekonomi) dan pengetahuan politik (pendidikan). Lebih lanjut lihat Virak Thun, "Youth Political

Strategi yang digunakan CNRP tersebut juga membuat strategi *vote buying* dan pemanfaatan sumber daya negara yang telah digunakan oleh CPP sejak pemilu tahun 1998, tidak berjalan efektif dalam menjaring pemilih di wilayah urban pada pemilu tahun 2013. Dengan banyaknya permasalahan di Kamboja, masyarakat urban cenderung tidak menginginkan uang dan pemberian bantuan dari CPP, yang bersifat jangka pendek. Dalam hal ini, masyarakat urban lebih condong percaya kepada CNRP, yang berani berjanji untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masa pemerintahan Hun Sen dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kamboja.

3.2.3 Penurunan Praktik Intimidasi Politik oleh Militer

Kondisi terakhir yang dibahas dalam subbab ini adalah penurunan jumlah intimidasi politik oleh militer, sebagai dampak kehadiran pengawas pemilu internasional dalam menjaga penyelenggaraan pemilu di wilayah urban Kamboja. Tidak seperti dua kondisi sebelumnya, dalam membahas kondisi ini penulis menggunakan konsep yang diungkapkan oleh Carothers. Berangkat dari konsep tersebut, penulis berpendapat bahwa pihak internasional dalam bentuk pengawas pemilu internasional, memiliki peran penting dalam menurunkan kecurangan dalam pemilu di Kamboja, khususnya terkait praktik intimidasi politik di wilayah urban, sehingga pada akhirnya masyarakat urban dapat dengan bebas memilih dalam pemilu tanpa adanya tekanan berlebih dari pihak tertentu, khususnya militer.

Secara keseluruhan, jumlah pengawas pemilu di Kamboja berjumlah sangat banyak. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh COMFREL, terdapat sebanyak 40.142 pengawas pemilu yang terdiri dari 145 organisasi (termasuk partai) yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu tahun 2013.¹⁴⁰ Namun, mengingat kurangnya netralitas yang dimiliki pengawas tersebut —karena memiliki afiliasi dengan partai di Kamboja— penulis hanya membahas pengawas pemilu yang berasal dari pihak netral (internasional).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh COMFREL, terdapat total sebanyak 292 pengawas internasional yang terdiri dari 35 organisasi/institusi yang

Participation in Cambodia: Role of Information and Communication Technologies (ICTs)", Master Degree Thesis, Northern Illinois, 2014.

¹⁴⁰ COMFREL, 2013, *Op. Cit.*, hlm. 97-98.

mengobservasi dan mengawasi jalannya pemilu tahun 2013 di Kamboja.¹⁴¹ Jumlah tersebut cenderung meningkat jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Meskipun tidak semua dari pengawas internasional tersebut dapat mengawasi pemilu Kamboja secara menyeluruh, COMFREL menyebutkan bahwa terdapat dua organisasi/instansi pengawas pemilu internasional yang memiliki peran besar dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu di Kamboja, yaitu *International Conference for Asian Political Party (ICAPP)* dan *Centrist Asia Pacific Democrats International (CAPDI)*. Kedua organisasi tersebut masing-masing menyumbang 20 dan 17 pengawas pada pemilu tahun 2013. Dalam mengawasi jalannya pemilu, kedua organisasi tersebut, beserta organisasi internasional lainnya berjaga di sebagian besar tempat pemilihan suara (TPS) di wilayah urban, untuk mencatat, mengawasi, dan mencegah terjadinya kecurangan sepanjang pemilu (hingga perhitungan suara di TPS selesai). Kehadiran pengawas pemilu tersebut juga diikuti oleh beberapa media internasional yang meliput jalannya penyelenggaraan pemilu di Kamboja, khususnya di wilayah urban.¹⁴² Menurut Kim Eng, kehadiran pengawas dan media internasional tersebut berdampak kepada turunya jumlah intimidasi politik dan kecurangan di wilayah urban. Menurutnya, pihak CPP enggan melakukan intimidasi dan kecurangan manipulasi skala besar di wilayah urban karena kehadiran pengawas dan media internasional. Dalam hal ini, CPP dan Hun Sen takut kecurangan tersebut dapat memicu pihak internasional mengintervensi secara langsung penyelenggaraan pemilu di Kamboja seperti pada tahun 1993, sehingga pada akhirnya dapat membahayakan dominasi CPP di pemerintahan Kamboja. Kondisi tersebut membuat CPP untuk fokus melakukan praktik intimidasi dan kecurangan pemilu di wilayah rural, yang tidak memiliki pengawasan khusus dari pengawas dan media internasional.¹⁴³

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 100-101.

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 98-99.

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Yong Kim Eng (Dewan Direksi COMFREL), tanggal 24 September 2016, di Ochidee Restaurant, Phnom Penh.

Grafik 3.2 Jumlah Kasus Pembunuhan Politik pada Pemilu Tahun 1993-2013



Sumber: COMFREL, 2013, “National Assembly Election, Final Assessment and Report”, *Report*, hlm. 15.

Meskipun kehadiran pengawas internasional terbatas hanya di wilayah urban, kehadiran mereka tersebut secara umum memiliki dampak positif. Secara garis besar, COMFREL menilai bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2013 —khususnya di wilayah urban— mengalami peningkatan kualitas jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, sehingga dapat dikategorikan menjadi pemilu yang ‘*free and fair*’. Meskipun pada pemilu tersebut masih ditemukan berbagai praktik kecurangan dalam pemilu, namun kehadiran pengawas internasional nyatanya memiliki dampak positif terhadap keamanan yang dimiliki masyarakat selama pemilu berlangsung di wilayah urban.¹⁴⁴ Dampak positif tersebut dapat dilihat dari data **Grafik 3.2**, dimana COMFREL mencatat bahwa jumlah pembunuhan politik pada pemilu tahun 2013 mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan pemilu tahun 2008. Jika pada tahun 2008 pembunuhan politik di Kamboja berjumlah sebanyak 23 kasus, maka pada tahun 2013, COMFREL tidak menemukan sama sekali kasus pembunuhan yang menyangkut permasalahan politik selama pemilu berlangsung. Dampak positif juga dapat dilihat dari penurunan jumlah kekerasan dan intimidasi politik yang terjadi selama masa kampanye hingga hari H

¹⁴⁴ Simon Henderson, *International Election Observers Proclaim Election ‘Free and Fair’*, diakses melalui <https://www.cambodiadaily.com/elections/international-election-observers-proclaim-election-free-fair-37395/> pada tanggal 17 April 2017 pukul 10.41 WIB.

pencoblosan — meskipun jumlah tersebut meningkat setelah hasil pemilu tahun 2013 resmi diumumkan.¹⁴⁵ Selain itu, kecurangan manipulasi suara juga tidak terlalu signifikan dilakukan oleh CPP di wilayah tersebut, mengingat kehadiran pengawas dan media internasional, sehingga CPP tidak dapat membendung perolehan suara CNRP untuk memenangkan pemilu di wilayah urban pada pemilu tahun 2013.

Dampak positif kehadiran pengawas internasional pada pemilu tahun 2013 juga dirasakan oleh Rithy dan Dam Sophat sebagai pemilih di wilayah urban. Menurut keduanya, penyelenggaraan pemilu tahun 2013, khususnya di wilayah urban, berlangsung dengan kondisi dan iklim yang lebih aman jika dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Meskipun keduanya tidak memungkiri bahwa masih terjadi beberapa praktik intimidasi politik oleh militer di wilayah urban, namun menurut mereka hal tersebut seakan tidak memiliki dampak berarti mengingat semangat perubahan yang dimiliki oleh masyarakat urban sangat kuat pada saat itu. Kondisi tersebut membuat strategi intimidasi politik yang dilakukan oleh CPP di wilayah urban pada pemilu tahun 2013 menjadi kurang efektif, tidak seperti penyelenggaraan pemilu sebelumnya.¹⁴⁶

Meskipun dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa kehadiran pengawas internasional di wilayah urban berdampak positif terhadap keamanan masyarakat, manfaat tersebut nyatanya tidak terasa hingga wilayah rural Kamboja. Secara garis besar, kondisi tersebut dijelaskan oleh Kim Eng sebagai pihak yang mengetahui perbedaan karakteristik penyelenggaraan pemilu di wilayah urban maupun wilayah rural.

*Electoral conditions in urban areas and rural areas are very different. In urban areas, the presence of international observers who oversee the election make the election run safely, although there are still some frauds and intimidation on a smaller scale. However, it is different in rural areas. Because there are not any of the international observers added with an already strong structure (to commit fraud) makes rural communities tend to vote for CPP.*¹⁴⁷

¹⁴⁵ COMFREL, 2013, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Rithy (Masyarakat/Aktivis Serikat Pekerja), tanggal 22 September 2016, di Sunway Hotel, Phnom Penh dan Hasil wawancara dengan Dam Sophat (Masyarakat urban), tanggal 23 September 2016, di Sunway Hotel, Phnom Penh.

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Yong Kim Eng (Dewan Direksi COMFREL), tanggal 24 September 2016, di Ochidee Restaurant, Phnom Penh.

Kondisi pemilu di wilayah urban dan di wilayah rural sangat berbeda. Di wilayah urban, kehadiran pengawas internasional yang menyoroti dan mengawasi penyelenggaraan pemilu membuat kondisi pemilu cenderung berjalan aman, meskipun terdapat kecurangan dan intimidasi dalam skala yang lebih kecil. Namun, di wilayah rural berbeda. Tidak adanya pengawas internasional ditambah dengan struktur yang sudah kuat (untuk melakukan kecurangan) memaksa masyarakat rural cenderung memilih CPP.

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehadiran pengawas internasional dalam pemilu di Kamboja memiliki dampak yang signifikan. Dalam hal ini, ketidakhadiran mereka di sebagian besar wilayah rural membuat intimidasi politik di wilayah tersebut cenderung masih banyak dilakukan oleh CPP, sehingga membuat mayoritas masyarakat rural terpaksa untuk memilih CPP, meskipun masyarakat rural mengalami kondisi yang lebih buruk jika dibandingkan dengan apa yang dialami oleh masyarakat urban.

Jika dihubungkan dengan hasil pemilu, ketidakhadiran pengawas pemilu internasional di sebagian besar wilayah rural pada akhirnya membuat CNRP hanya dapat memenangkan beberapa kursi saja di wilayah rural. Meskipun pada dasarnya masyarakat rural menginginkan adanya perubahan di Kamboja seperti halnya masyarakat urban, ketidakhadiran pengawas internasional dan kuatnya struktur militer di wilayah rural membuat masyarakat rural tidak dapat menyalurkan kekecewaan mereka dan terpaksa untuk memilih CPP pada pemilu tahun 2013. Lemahnya pengawasan pemilu di wilayah rural juga membuat CPP dapat dengan mudah melakukan manipulasi suara, tanpa adanya pengawasan yang berarti dari pihak internasional. Kondisi tersebut pada akhirnya membuat CPP tetap mempertahankan kekuasaan mereka di wilayah rural dan memenangkan pemilu tahun 2013, walaupun mengalami kekalahan besar atas CNRP di wilayah urban.

Tabel 3.6 Kondisi-Kondisi yang Melatarbelakangi Kekalahan CPP di Wilayah Urban pada Pemilu Tahun 2013

Kondisi	Penjelasan
Penurunan kinerja dan permasalahan dalam pemerintah Hun Sen	Kondisi ini berkaitan dengan penurunan kinerja dan permasalahan yang muncul pada masa pemerintahan Hun Sen, khususnya periode 2008-2013. Penurunan kinerja dan permasalahan tersebut dapat dilihat dari tiga hal, yaitu: (1) tingginya tingkat korupsi; (2) tingginya tingkat pelanggaran HAM; dan (3) kebijakan ekonomi yang merugikan kesejahteraan masyarakat Kamboja
Perbedaan isu dan strategi kampanye yang digunakan CPP dan CNRP	Kondisi ini berkaitan dengan keberhasilan CNRP dalam menggunakan isu dan strategi kampanye pada pemilu tahun 2013. Dalam hal ini, CNRP menggunakan isu penyelesaian permasalahan Kamboja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Isu tersebut dianggap lebih menarik bagi masyarakat, dibandingkan dengan isu Khmer Rouge yang dibawa CPP. Selain itu, strategi pemfokusan kampanye di wilayah urban dan penggunaan media internet sebagai media kampanye utama CNRP juga dianggap tepat, khususnya jika dilihat dari pemilih CNRP yang mayoritas berasal dari wilayah urban dan tergolong kelompok muda
Penurunan praktik intimidasi politik oleh militer	Kondisi ini berkaitan dengan pengaruh positif yang dihasilkan pengawas pemilu internasional terhadap penurunan jumlah intimidasi politik, sehingga terbentuknya kondisi yang aman bagi pemilih di wilayah urban. Kondisi tersebut pada akhirnya membuat pemilih di wilayah urban dapat memilih tanpa adanya tekanan dari pihak militer

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Berdasarkan penjabaran bab ini, penulis menyimpulkan bahwa teori *Dominant Party Authoritarian Regimes* dari Greene dan *International Election Observation* dari Carothers yang digunakan dalam tulisan ini dapat menganalisis fenomena kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013. Dari analisis tersebut, dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa terdapat tiga peristiwa dan kondisi yang melatarbelakangi kekalahan CPP di wilayah urban pada pemilu tahun 2013.

Pertama, penurunan kinerja dan permasalahan dalam pemerintah Hun Sen, khususnya pada periode 2008-2013, seperti tingkat korupsi, pelanggaran HAM, dan kebijakan ekonomi yang merugikan masyarakat. *Kedua*, perbedaan isu dan strategi kampanye yang digunakan CPP dan CNRP, yang berkaitan dengan keberhasilan dan efektivitas CNRP dalam menggunakan isu dan strategi kampanye pada pemilu tahun 2013. *Ketiga*, penurunan praktik intimidasi politik oleh militer, yang berkaitan dengan pengaruh positif yang dihasilkan pengawas pemilu internasional dalam menurunkan jumlah kecurangan dan intimidasi politik, sehingga terbentuknya kondisi yang lebih aman bagi pemilih di wilayah urban pada pemilu tahun 2013. Ketiga kondisi tersebut membuat strategi kecurangan —strategi *vote buying*, strategi intimidasi politik, penyalahgunaan sumber daya negara, dan kecurangan administratif pemilu— yang dilakukan oleh CPP sejak pemilu tahun 1998 tidak berjalan efektif. Pada tahapan berikutnya —setelah ketiga kondisi tersebut terjadi di wilayah urban— CPP harus mengalami kekalahan perdana atas CNRP di empat wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013.

BAB 4

KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemilu tahun 2013 di Kamboja berhasil memberikan hasil yang tidak terduga bagi semua pihak, khususnya CPP. Meskipun sukses meraih jumlah kursi parlemen terbanyak sejak tahun 1998, pada pemilu tahun 2013 perolehan kursi CPP harus mengalami penurunan sebanyak 22 kursi di parlemen sehingga mereka harus mengalami kekalahan di wilayah urban Kamboja. Dominasi CPP tersebut berhasil diruntuhkan oleh CNRP, yang notabenenya merupakan partai oposisi baru. Dengan segala keterbatasan dan permasalahan yang dialami dalam mempersiapkan pemilu, CNRP berhasil mengumpulkan sebanyak 55 kursi, dimana 29 diantaranya berasal dari wilayah urban, sehingga mereka berhasil memenangkan pemilu perdana mereka di wilayah urban.

Kekalahan yang dialami oleh CPP tersebut merupakan kegagalan perdana mereka dalam mempertahankan jumlah kursi terbanyak di wilayah urban, khususnya sejak berhasil memenangkan pemilu tahun 1998. Pada periode 1998-2008, CPP dapat dengan mudah mengalahkan para partai oposisi yang ikut berkompetisi pada pemilu di Kamboja. Puncaknya ketika CPP berhasil meraih 90 kursi di parlemen pada pemilu tahun 2008, sehingga CPP dapat membentuk pemerintahan mereka sendiri di Kamboja tanpa harus melakukan koalisi. Berdasarkan konsep *Competitive Authoritarianism* dari Levitsky dan Way, keberhasilan CPP tersebut dilatarbelakangi oleh empat strategi yang digunakan oleh CPP dalam memanfaatkan rezim otoriter kompetitif di Kamboja, yaitu: (1) strategi *vote buying*; (2) strategi intimidasi politik; (3) penyalahgunaan sumber daya negara; dan (4) kecurangan administratif pemilu. Meskipun berhasil, keempat strategi tersebut gagal membantu CPP dalam mempertahankan perolehan kursi mereka pada pemilu tahun 2013, khususnya yang berada di wilayah urban.

Secara garis besar, tulisan ini ingin menjawab pertanyaan penelitian yang sebelumnya telah dipaparkan, yaitu mengapa CPP mengalami kekalahan di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013? Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga peristiwa dan kondisi

penting yang terjadi di wilayah urban, sehingga membuat CPP mengalami kekalahan di wilayah tersebut pada pemilu tahun 2013.

Pertama, penurunan kinerja dan permasalahan dalam pemerintahan Hun Sen. kondisi ini berkaitan dengan penurunan kinerja dan permasalahan yang muncul pada masa pemerintahan Hun Sen, khususnya pada periode 2008-2013. Secara garis besar, permasalahan tersebut dapat dilihat dari tiga hal, yaitu tingginya tingkat korupsi, tingginya tingkat pelanggaran HAM, dan kebijakan ekonomi yang merugikan kesejahteraan masyarakat. Ketiga permasalahan tersebut pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kapabilitas pemerintahan Kamboja, yang dipimpin oleh Hun Sen.

Kedua, perbedaan isu dan strategi kampanye yang digunakan oleh CPP dan CNRP. kondisi ini berkaitan dengan keberhasilan CNRP dalam mengungguli CPP terkait pemilihan isu dan strategi kampanye pada pemilu tahun 2013. Dalam hal ini, CNRP menggunakan isu penyelesaian permasalahan Kamboja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Isu tersebut dianggap lebih menarik bagi masyarakat, dibandingkan dengan isu Khmer Rouge yang dibawa CPP. Selain itu, CNRP juga hanya fokus untuk melakukan kampanye di wilayah urban saja, dimana keterbatasan yang dimiliki CNRP membuat mereka hanya memanfaatkan media internet sebagai media kampanye utama dalam pemilu. Isu dan strategi kampanye yang digunakan oleh CNRP dinilai efektif dalam memobilisasi masyarakat bercahaya pada para pemilih CNRP, yang mayoritas berasal dari wilayah urban dan tergolong kelompok muda.

Ketiga, penurunan praktik intimidasi politik oleh militer. Kondisi ini berkaitan dengan pengaruh positif yang dihasilkan oleh pengawas pemilu internasional terhadap penurunan jumlah kecurangan dan praktik intimidasi politik oleh militer. Meskipun mayoritas pengawas internasional hanya berada di wilayah urban, namun kehadiran mereka tersebut berhasil membentuk kondisi yang aman bagi pemilih di wilayah urban. Kondisi tersebut membuat pemilih di wilayah urban yang mayoritas menginginkan adanya perubahan dalam pemerintahan dapat memilih dengan bebas tanpa adanya tekanan dari pihak militer.

Pada tahapan berikutnya, setelah ketiga kondisi tersebut terjadi, fenomena kekalahan perdana CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013 terjadi,

sehingga meruntuhkan dominasi mereka sejak tahun 1998. Meskipun CPP dapat melakukan berbagai strategi kecurangan dalam memanfaatkan kekuasaan negara yang mereka miliki dari hasil terbentuknya rezim otoriter kompetitif di Kamboja, namun strategi tersebut pada akhirnya tidak lagi berjalan efektif seperti pada penyelenggaraan pemilu terdahulu. Kondisi tersebut pada akhirnya membuat CPP selaku partai pemerintah mengalami penurunan jumlah kursi yang signifikan, sehingga membuat mereka mengalami kekalahan di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013.

Dengan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teori *Dominant Party Authoritarian Regimes* dari Kenneth Greene dapat menganalisis fenomena kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pemilu tahun 2013. Namun, teori yang digunakan oleh Greene dalam menganalisis kekalahan PRI pada pemilu Meksiko tahun 2000 tersebut tidak dapat berkerja sendiri dalam menganalisis fenomena kekalahan CPP. Berkaca pada asumsi penulis yang melihat bahwa terdapat peran yang dimiliki oleh pengawas pemilu internasional dalam mengurangi kecurangan dan intimidasi politik di wilayah urban, maka penulis menyempurnakan teori tersebut dengan konsep *International Election Observation* dari Carothers. Gabungan keduanya pada akhirnya mampu menganalisis dan menjelaskan fenomena kekalahan CPP di wilayah urban pada pemilu tahun 2013.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ADHOC. 2014. *Land Situation in Cambodia 2013*. Phnom Penh: ADHOC.
- Asian Human Rights Commission. 2010. *Cambodia: Judicial Independence is the Key to Reducing Defamation Lawsuits Against Critics and Upholding Freedom Expression*. Dalam Cambodian Center for Human Rights. *Cambodia Gagged: Democracy at Risk?*. Phnom Penh: CCHR
- Cambodian Center for Human Rights. 2010. *Cambodia Gagged: Democracy at Risk?*. Phnom Penh: CCHR.
- Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing among five tradition* London: Sage Publication.
- Croissant, Aurel. 2002 *Electoral Politics in Southeast and East Asia: Comparative Perspective*. Singapore: Friedrich Ebert.
- Croissant, Aurel. 2016. *Electoral Politics in Cambodia: Historical Trajectories, Current Challenges, and Comparative Perspective*. Germany: Konrad Adenauer Stiftung.
- Everett, Silas. 2014. "Democracy in Cambodia 2014: A Survey of the Cambodian Electorate". Phnom Penh: The Asia Foundation Research.
- Findlay, Trevor. 1995. *Cambodia: The Legacy and Lesson of UNTAC*. (New York: Oxford University Press.
- Frost, Frank. 1991. *The Cambodia Conflict*. (Australia: Departement of the Parliamentary Library.
- Gallup, Jeffrey. 2002. *Cambodia's Electoral System: A Window of Opportunity for Reform*. Dalam Aurel Croissant. *Electoral Politics in Southeast and East Asia: Comparative Perspective*. Singapore: Friedrich Ebert.
- Greene, Kenneth. 2007. *Why Dominant Parties Lose: Mexico's Democratization Comparative Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hughes, Caroline dan Garry Rodan. 2014 *The Politics of Accountability in Southeast Asia: The Dominance of Moral Ideologies*. Oxford: Oxford University Press.
- Huntington, Samuel dan Joan Nelson. 1994 *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (terj.). Jakarta: Rineka Cipta.
- ILO. 2013. *Thirtieth Synthesis Report on Working Condition in Cambodia's Garment Sector*. Geneva: ILO.

- Transparency International. 2014 *Corruption Perception Index 2013*. Berlin: Transparency International. 2014
- Johnson, Elizabeth. 2014. *Corruption and Cambodia's Governance System: The Need for Reform*. Phnom Penh: Transparency International.
- Levitsky, Steven dan Lucan Way. 2010 *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War*. New York: Cambridge University Press.
- LICADHO. 2014 *Human Rights 2013: The Year in Review*. (Phnom Penh: LICADHO. 2014.
- McKinley, Catherine dan Kate Noble. 2012. *Country Case Study: Cambodia*. London: BBC.
- Miles, Matthew dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif penerjemah Tjejep Rohendi*. Jakarta: UI Press.
- Morgenbesser, Lee. 2016. "States, Neopatrimonialism, and Elections: Democratization in Southeast Asia". Griffith University.
- Osborne, Milton. 1994. *Sihanouk Prince of Light, Prince of Darkness*. United States: University of Hawaii Press.
- Sachsenroder, Wolfgang. 2012. *The Contemporary Politics in Cambodia* dalam Pou Sothirnak dkk. *Cambodia: Progress and Challenges Since 1991*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Schedler, Andreas. 2006. *Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition*. Boulder CO: Lynne Rienner.
- Straus dan Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- The Asia Foundation. 2013 *Democracy in Cambodia: 2013*. Phnom Penh: Asia Foundation.
- UNDP. 2014. *Media Habits and Information Sources of Youth in Cambodia*. Phnom Penh: UNDP.
- Un, Kheang. 2015. *The Cambodian People Have Spoken: Has the Cambodian People's Party Heard?* Dalam Daljit Singh. *Southeast Asian Affairs 2015*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.

Jurnal

- Carothers, Thomas. 1997. "Observers Observed". *Journal of Democracy*. Vol. 8. No. 3.

- Downie, Sue. 2000. "Cambodia's 1998 Election: Understanding Why it Was Not a 'Miracle on the Mekong'". *Australian Journal of International Affairs*. Vol. 54. No. 1.
- Evans, Gareth. 1994. "Peacekeeping in Cambodia: Lesson Learned" *NATO Review*. Vol 42. No.2
- Hughes, Caroline. 2006. "The Politics of Gifts: Tradition and Regimentation in Contemporary Cambodia". *Journal of Southeast Asian Studies*. Vol. 37. No. 3.
- 2014. "Understanding the Elections in Cambodia 2013". *Journal of Area Based Global Studies*. Vol. 1. No. 1.
- Manikas, Peter. 1998. "Cambodia's 1998 Elections: The Failure of Democratic Consolidation". *New England Journal of Public Policy*. Vol. 14. No. 11.
- McCargo, Duncan. 2005 "Cambodia: Getting Away with Authoritarianism?". *Journal of Democracy*. Vol. 16. No. 4.
- 2014 "Cambodia in 2013: (No) Country for Old Men?". *Asian Surveys*. Vol. 54. No. 1.
- Nilsson, Noren. 2016. "Election and Emerging Citizenship in Cambodia". *Citizenship and Democratization in Southeast Asia*. Vol. 115. No. 1.
- Roberts, David. 1998. "The Cambodian Elections of 1993". *Electoral Studies*. Vol. 13. No. 2.
- Un, Kheang. 2011 "Cambodia: Moving Away from Democracy?". *Sage Journals*. Vol. 32. No. 5.
- Un, Kheang dan Sokbunthoeun So. 2009 "Politics of Natural Resource Use in Cambodia". *Asian Affairs*. Vol. 36. No. 3.
- Tulisan dan Laporan Ilmiah**
- Cambodia's Family Trees: Illegal Logging and the Stripping of Public Assets by Cambodia's Elite*. Global Witness Report. Juni 2007.
- Canvasopedia. 2015. "Analysis of the Situation in Cambodia". *Report*.
- Collins, William. 2000. "Impact Survey of Voter Knowledge and Awareness". *Working Paper*.
- COMFREL. 2008. "2008 National Assembly Election". *Report*.
- COMFREL. 2012. "Final Assessment and Report on 2012 Commune Council Elections". *Report*.
- COMFREL. 2013. "National Assembly Election, Final Assessment and Report". *Report*.

Reporters Without Borders. 2013. "World Press Freedom Index 2013". *Report*.

USAID. *Property Rights and Resource Governance: Cambodia*. Laporan USAID Country Profile.

Women's Media Centre of Cambodia. 2012. "Cambodian Commune Council Election". *Report*.

Women's Media Centre of Cambodia. 2013. "Electoral Analysis Report". *Report*.

Vickery, Michael dan Ramses Amer. 1996 "Democracy and Human Rights in Cambodia". *Report*.

Natsuda, Kaoru. 2009. "Challenges to the Cambodian Garment Industry in the Global Garment Value Chain". *Working Paper*.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Thun, Virak. 2014. "Youth Political Participation in Cambodia: Role of Information and Communication Technologies (ICTs)". Master Degree Thesis. Northern Illinois.

Artikel dan Sumber Internet

ABC News. *Cambodian Leaders Meet After Violent Protest*. Diakses melalui <http://www.abc.net.au/news/2013-09-16/an3a-cambodia27s-leaders-meet-amidst-violent-protests/4960620> Pada tanggal 10 April 2017 pukul 19.58 WIB.

BBC. *Exiled Cambodian Opposition Leader Given Jail Term*. Diakses melalui <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11395570> Pada tanggal 6 April 2017 pukul 16.27 WIB.

Cambodia Daily. *CPP Wins, But Suffers Loss in Parliamentary Majority*. Diakses melalui <https://www.cambodiadaily.com/elections/cpp-wins-but-suffers-loss-in-parliamentary-majority-37210/> Pada tanggal 9 April 2017 pukul 19.15 WIB.

Chan Thul. *Sam Rainsy Returns Home, Joins Poll Campaign*. Diakses melalui <http://www.reuters.com/article/us-cambodia-election-rainsy-idUSBRE96I0C620130719> Pada tanggal 6 April 2016 pukul 16.29 WIB.

Charlie Campbell. *In Cambodia, China Fuels Deadly Illegal Logging Trade*. Diakses melalui <http://world.time.com/2013/05/14/in-cambodia-illegal-logging-unabated-on-anniversary-of-leading-activists-death/> Pada tanggal 5 April 2017 pukul 1.21 WIB.

Chea Vannak. *Agriculture Ministry to End ELC* Diakses melalui <https://web.archive.org/web/20151008052240/http://www.akp.gov.kh/?p=69494> Pada tanggal 4 April 2017 pukul 18.14 WIB

Colum Graham. *New Mandala: Cambodia's Inverted Mandala*. Diakses melalui <http://www.newmandala.org/cambodias-inverted-mandala/> Pada tanggal 6 Agustus 2016 pukul 20.47 WIB.

Council for the Development of Cambodia. *Sub-Decree 146 Economic Land Concessions*. Diakses melalui http://www.cambodiainvestment.gov.kh/sub-decree-146-on-economic-land-concessions_051227.html Pada tanggal 4 April 2017 pukul 17.15 WIB.

FIDH. *Cambodia: 60.000 new victims of government land grabbing policy since January 2014*. Diakses melalui <https://www.fidh.org/en/region/asia/cambodia/cambodia-60-000-new-victims-of-government-land-grabbing-policy-since> Pada tanggal 4 April 2017 pukul 17.48 WIB.

Freedom House. *Cambodia*. Diakses melalui <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/cambodia> Pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 2.39 WIB.

HRW. *Cambodia: July 1997: Shock and Aftermath*. Diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2007/07/27/cambodia-july-1997-shock-and-aftermath> Pada tanggal 21 Maret 2017 pukul 12.17 WIB.

Human Rights Watch. 2003. "Don't Bite the Hand that Feeds You: Coercion, Threats, and Vote-Buying in Cambodia's National Election". *Briefing Paper*. Diakses melalui <https://www.hrw.org/legacy/backgrounders/asia/cambodia/elections.htm>

Human Right Watch. 2013. *Cambodia 2013 Human Rights Reports*. Diunduh melalui <https://www.state.gov/documents/organization/220395.pdf>

LICADHO. *Year 2013 in Review: Cambodian Election*. Diakses melalui <http://www.licadho-cambodia.org/articles/20140318/139/index.html> Pada tanggal 10 April 2017 pukul 19.56 WIB

Meas Sokchea. *CNRP to End Boycott*. Diakses melalui <http://www.phnompenhpost.com/national/cnrp-end-boycott-return-national-assembly> Pada tanggal 10 April 2017 pukul 20.05 WIB

Prak Chan Thul. *Cambodia to Revise Oil Contract, Paving Way For First Oil*. Diakses melalui <http://www.reuters.com/article/us-cambodia-oil-idUSKBN16R0FT> Pada tanggal 5 April 2017 pukul 13.55 WIB.

Simon Henderson. *International Election Observers Proclaim Election 'Free and Fair'.* Diakses melalui <https://www.cambodiadaily.com/elections/international-election-observers-proclaim-election-free-fair-37395/> Pada tanggal 17 April 2017 pukul 10.41 WIB

The Constitution of the Kingdom of Cambodia. Diakses melalui <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kh/kh009en.pdf>

The World Bank. *World Bank Country and Lending Groups: Country Classification*. Diakses melalui <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups> Pada tanggal 12 April 2017 pukul 18.48 WIB.

Transparency International. *World Corruption Perception Index Result Year 2013*. Diakses melalui https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2007/0/#results Pada tanggal 11 April 2017 pukul 16.12 WIB.

United States Institute of Peace. *Peace Agreements Digital Collection*. Diunduh melalui file:///C:/Users/user/Downloads/KH_911023_Comprehensive%20Peace%20Agreement.pdf

Vannarith Chheang. *After Thirty Years of Hun Sen, Where is Cambodia Now?*. Diakses melalui <http://www.eastasiaforum.org/2015/03/18/after-thirty-years-of-hun-sen-where-is-cambodia-now/> Pada tanggal 12 Agustus 2017 pukul 18.50 WIB.

Veronique Salze-Lozach. *Cambodia's Garment Sector and the Global Economic Crisis*. Diakses melalui <http://asiafoundation.org/2009/07/08/cambodias-garment-sector-and-the-global-economic-crisis/> Pada tanggal 12 April 2017 pukul 18.56 WIB.

Vong Sokheng. *CPP Campaigns in its Achievements*. Diakses melalui <http://www.phnompenhpost.com/national/cpp-campaigns-its-achievements> Pada tanggal 16 April 2017 pukul 16.26 WIB.

World Bank. *Overview Cambodia*. Diakses melalui <http://www.worldbank.org/en/country/cambodia/overview> Pada tanggal 11 April 2017 pukul 15.42 WIB.

Xin Hua. *Cambodian Opposition Agrees to End Boycott*. Diakses melalui http://usa.chinadaily.com.cn/world/2014-07/22/content_17898972.htm Pada tanggal 10 April 2017 pukul 20.44 WIB.

Zsombor Peter. *Unprotected Areas*. Diakses melalui <https://www.cambodiadaily.com/unprotectedareas/> Pada tanggal 5 April 2017 pukul 1.34 WIB.

Wawancara

Dam Sophat (Masyarakat urban), tanggal 23 September 2016, di Sunway Hotel, Phnom Penh.

Hasil wawancara dengan Meas Nee (Pengamat politik Kamboja), tanggal 24 September 2016, di Sunway Hotel, Phnom Penh.

Hasil wawancara dengan Pich Sovann (Anggota partai CNRP), tanggal 24 September 2016, di Sunway Hotel, Phnom Penh.

Hasil wawancara dengan Rithy (Masyarakat/Aktivis Serikat Pekerja), tanggal 22 September 2016, di Sunway Hotel, Phnom Penh

Hasil wawancara dengan Thol Dina (Anggota partai CPP/Anggota Kementrian), tanggal 23 September 2016, di Kantor *Ministry of Land Management Urban Planning and Construction*, Phnom Penh.

Hasil wawancara dengan Yong Kim Eng (Dewan Direksi COMFREL), tanggal 24 September 2016, di Ochidee Restaurant, Phnom Penh.

LAMPIRAN

Tabel Daftar Pengawas Pemilu Internasional Tahun 2013

No	Nama	Jumlah
1	International Foundation For Election Systems (IFES)	4
2	National Democratic Institute For International Affairs (NDI)	15
3	Embassy of the Republic of Indonesia	2
4	World Renew	2
5	People Forum on Cambodia, Japan (PEFOCJ)	10
6	Center for Khmer Studies (CKS)	1
7	Embassy of Brunei Darussalam	12
8	Delegation of Brunei Darussalam	7
9	New Zealand Embassy	2
10	European Union Election Expert Mission (EU-EEM)	3
11	Vietnam Embassy in Cambodia	4
12	Singapore Embassy	1
13	Embassy of the Republic of the Union Myanmar	6
14	Timor-Leste	5
15	French Embassy	6
16	Hope of Cambodia	5
17	Embassy of the Russian Federation	2
18	Japan International Cooperation Agency (JICA)	4
19	Embassy of Japan	9
20	Mission France-Khmer	1
21	Australia Embassy	18
22	Embassy of Republic of Korea	3
23	European Union	12
24	Organisation Internationale de la Francophonie	11
25	Embassy of India	3
26	Embassy of Malaysia	9
27	Embassy of Sweden	6
28	British Embassy	10
29	Embassy of United States of America	56
30	Centrist Asia Pacific Democrats International (CAPDI)	17
31	International Conference for Asian Political Party (ICAPP)	20
32	National Assembly of Democratic Party of Republic (KOREA)	11
33	New Azerbaijan Party	13
34	Embassy of Lao	1
35	Embassy of the Republic of Serbia	1
Total		292

Sumber: COMFREL, 2013, "National Assembly Election, Final Assessment and Report", *Report*, hlm. 15.

Pedoman Wawancara

Variabel	Pertanyaan Kunci
Gambaran umum kekalahan CPP di wilayah urban tahun 2013	Bagaimana pandangan narasumber terkait penurunan signifikan jumlah kursi CPP, sehingga mengalami kekalahan di wilayah urban pada pemilu tahun 2013?
Kinerja dan Permasalahan yang terjadi pada pemerintahan Hun Sen	Bagaimana kinerja pemerintahan Hun Sen pada periode 2008-2013? Apakah pada saat itu Kamboja mengalami banyak permasalahan?

Isu dan Strategi kampanye CPP dan CNRP	Bagaimana perbedaan isu dan strategi yang digunakan oleh CPP dan CNRP pada pemilu tahun 2013, sehingga pada akhirnya CNRP berhasil meraih banyak suara?
Penurunan praktik intimidasi politik oleh militer	Bagaimana kondisi pemilu tahun 2013 di wilayah urban? Apakah terjadi banyak intimidasi dan kecurangan? Apakah pengawas internasional memiliki peran signifikan?

Hasil Wawancara Narasumber

Nama	Pekerjaan	Tempat Wawancara	Waktu Wawancara
Rithy	Trade union activist and consulter (masyarakat urban)	Sunway Hotel, Phnom Penh	22 September 2016 Pukul 18.00-20.00

Gambaran umum kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja

Hasil pemilu tahun 2013 berhasil mengejutkan seluruh pihak, khususnya saya. Disatu sisi, perolehan kursi CPP mengalami penurunan drastis, sedangkan partai oposisi (CNRP) yang sama sekali tidak diunggulkan justru berhasil mendapatkan banyak kursi di keikutsertaan perdana. Meskipun begitu, CPP tetap menjadi pemenang pemilu karena berhasil meraih kursi terbanyak secara keseluruhan, khususnya di wilayah rural. Meskipun menang di wilayah urban, partai oposisi (CNRP) tidak mendapatkan banyak dukungan dari wilayah rural, karena akses yang dibatasi oleh CPP. Kondisi tersebut diperparah dengan rendahnya kesadaran politik masyarakat rural, tidak seperti disini (wilayah urban) yang sudah tinggi. Hal tersebut membuat CPP dengan mudah menguasai wilayah rural, dengan strategi vote buying yang digunakan.

Meskipun mengalami kekalahan, saya yakin CPP akan tetap sulit dijatuhkan pada pemilu berikutnya tahun 2018. CPP tetap memiliki kekuatan yang kuat, sehingga kudeta dapat terjadi jika CPP memenangkan pemilu. Meskipun memiliki banyak permasalahan, saya yakin bahwa CPP masih dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kamboja, karena memiliki kapabilitas dan pengalaman yang lebih dibandingkan dengan partai oposisi (CNRP).

Kinerja dan permasalahan pada pemerintahan Hun Sen

Banyak permasalahan yang terjadi menjelang pemilu tahun 2013 berlangsung. Namun, terdapat tiga permasalahan yang menurut saya paling signifikan: land grabbing, korupsi, dan pelanggaran HAM. Dalam permasalahan land grabbing, masyarakat kecewa terhadap keputusan pemerintah (Hun Sen) yang secara paksa mengambil tanah yang mereka miliki untuk kepentingan investor (yang mayoritas berasal dari China). Selain itu, korupsi sudah menjadi rahasia umum di Kamboja. Permasalahan ini sudah terjadi sejak lama, namun tidak kunjung terselesaikan. Uang yang dikorupsi oleh Hun Sen berasal dari investasi China (money laundring) di Kamboja. Uang yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan malah dimanfaatkan untuk kepentingan Hun Sen dan CPP. Kondisi tersebut membuat Kamboja memiliki hutang besar ke China dan ADB. Meskipun sudah jelas terlihat, namun pengawas korupsi di Kamboja tidak melakukan penanganan berarti untuk memberantas Kamboja, karena memiliki relasi dengan pemerintah. Terakhir, permasalahan terbesar di Kamboja adalah pelanggaran HAM. Salah satu contohnya adalah demonstrasi pekerja Garmen di Phnom Penh tahun 2013 yang dilakukan kepada pemerintah akibat eksploitasi yang dilakukan, sehingga menyebabkan korban jiwa dan luka.

Permasalahan lainnya juga dapat dilihat dari kasus imigran ilegal dari Vietnam yang kemudian menjadi warga negara Kamboja sebanyak 2 juta jiwa, sehingga dapat memilih Hun Sen pada pemilu tahun 2013. Selain itu, birokrasi dalam pemerintahan Hun Sen bersifat sangat lambat. Namun, birokrasi tersebut dapat berjalan lancar jika mendapat sogokan.

Perbedaan Isu dan strategi kampanye CPP dan CNRP

Secara garis besar, CNRP memiliki strategi kampanye yang lebih baik dari CPP. Dalam hal ini, CNRP menggunakan isu permasalahan yang dialami oleh Hun Sen sebagai isu kampanye mereka pada pemilu tahun 2013. CNRP juga menggunakan sarana Facebook dalam menyebarkan isu kampanye, sehingga pemilih muda cenderung memilih CNRP dibandingkan CPP. Selain media kampanye, CNRP menggunakan media internet sebagai alat untuk menyebarkan berita sebenarnya, tanpa adanya propaganda dari CPP, seperti berita di televisi, radio, surat kabar.

Sementara itu, CPP masih menggunakan cara lama untuk mendapatkan suara dari masyarakat, yaitu strategi vote buying. Strategi utamanya dilakukan di wilayah rural, yang tidak memiliki pengawasan ketat seperti di wilayah urban.

Intimidasi politik dan peran pengawas internasional di wilayah urban

Menurut saya, pemilu disini (wilayah urban) lebih bersifat aman, jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Meskipun masih terdapat beberapa intimidasi yang dilakukan oleh CPP, namun iklim pemilu saat itu lebih baik dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Saya melihat beberapa pengawas internasional saat pemilu (Phnom Penh), dan dampak dari mereka tersebut signifikan untuk mengurangi intimidasi militer oleh CPP.

Nama	Pekerjaan	Tempat Wawancara	Waktu Wawancara
Dr Thol Dina	Deputy Director of the Cadastral Department; Deputy Director of LASSP (anggota CPP)	Ministry of Land Management Urban Planning and Construction, Phnom Penh	23 September 2016 Pukul 10.30-11.30

Gambaran umum kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja

Hasil pemilu tahun 2013 merupakan pukulan besar bagi kami (CPP). Meskipun pemimpin partai oposisi ditidakperbolehkan masuk ke Kamboja menjelang berlangsungnya pemilu. Namun, surat dari Raja, akhirnya memperbolehkan Sam Rainsy untuk kembali ke Kamboja satu minggu menjelang pemilu berlangsung. Saya merasa tidak yakin jika partai oposisi dapat memerintah Kamboja, karena tidak memiliki pengalaman seperti CPP. Kamboja membutuhkan pemimpin yang kuat seperti Hun Sen, bukan Sam Rainsy yang belum memiliki pengalaman.

Kinerja dan permasalahan pada pemerintahan Hun Sen

Kinerja pemerintahan Hun Sen tidak terlalu buruk seperti yang diberitakan. Hal tersebut dapat dilihat dari pengurangan intimidasi politik, kebebasan berpendapat lebih tinggi dilihat dari banyaknya demo yang bisa dilakukan, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, tetap ada permasalahan dalam pemerintahan Hun Sen, seperti permasalahan Land Grabbing untuk kepentingan ekonomi negara, meskipun merugikan masyarakat.

Perbedaan Isu dan strategi kampanye CPP dan CNRP

CNRP melakukan strategi yang baik ketika menggunakan media internet dalam memobilisasi pemilih. Slogan yang digunakan oleh CNRP untuk menarik simpati masyarakat adalah "short, clean, involve with cambodian". CNRP menjanjikan banyak hal, seperti memberikan uang US\$10 kepada pensiunan, menurunkan harga pokok, dan menaikkan kesejahteraan pekerja garmen dengan menaikkan gaji hingga US\$200. Janji yang ditawarkan CPP juga terkait penyelesaian masalah yang timbul selama pemerintahan Hun Sen, seperti permasalahan land grabbing. Namun, saya memandang CNRP terlalu banyak mengkritik pemerintah, terutama melalui media sosial.

Disisi lain, tidak seperti CNRP, CPP tidak mengumbar janji kepada masyarakat karena sudah mengetahui kondisi yang terjadi di pemerintahan sulit untuk merealisasikan janji yang diberikan CNRP. Dalam hal ini, CNRP memberikan janji tersebut karena tidak memiliki pengalaman pemerintahan, sehingga mereka mereka tidak tahu betapa sulitnya untuk merealisasikan janji tersebut. Dengan CPP, Hun Sen menawarkan kestabilan yang ada dalam Kamboja. Hal ini tidak dapat ditawarkan oleh CNRP jika terpilih sebagai pemimpin.

Intimidasi politik dan peran pengawas internasional di wilayah urban

Pengawas pemilu internasional bersama dengan NEC berhasil membuat pemilu tahun 2013 di Kamboja berjalan lebih aman dengan berkurangnya intimidasi politik, sehingga dapat dikategorikan sebagai pemilu yang free dan fair.

Nama	Pekerjaan	Tempat Wawancara	Waktu Wawancara
Dam Sophat	Food and Beverage Executive (Masyarakat Urban)	Sunway Hotel, Phnom Penh	23 September 2016 Pukul 17.00-18.30

Gambaran umum kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja

Penurunan jumlah kursi yang dialami oleh CPP merupakan hasil dari suara rakyat yang menginginkan adanya perubahan dalam pemerintahan, dan satu-satunya pilihan mereka untuk melakukan perubahan tersebut adalah dengan memilih CNRP. Meskipun CNRP masih kalah, namun perolehan kursi CNRP tersebut sangat diluar dugaan. Bahkan ada beberapa sumber dari internet yang menyebutkan bahwa sebenarnya CNRP berhak memenangkan pemilu tahun 2013. Namun, karena terdapat kecurangan tersistematis yang dilakukan oleh CPP dan NEC, maka pada akhirnya CPP dan Hun Sen tetap menjadi pemimpin Kamboja hingga tahun 2018.

Kinerja dan permasalahan pada pemerintahan Hun Sen

Pada umumnya, permasalahan yang terjadi pada masa pemerintahan Hun Sen terdiri dari pelanggaran HAM, ELC, dan tingginya tingkat kemiskinan akibat kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Permasalahan lainnya yang terjadi di Kamboja dapat dilihat dari pengaruh besar yang dimiliki oleh China terhadap pemerintahan Kamboja terutama dalam bidang perekonomian. Peningkatan ekonomi yang dialami oleh Kamboja mayoritas disebabkan oleh investasi besar yang diberikan oleh China kepada Kamboja, yang sebagian besar di korupsi. Selain itu, terdapat permasalahan imigran ilegal yang berasal dari Vietnam. 20% penduduk Kamboja saat ini merupakan orang Vietnam. Permasalahan tersebut menjadi signifikan mengingat mayoritas dari orang Vietnam disini memiliki hak untuk memilih dalam pemilu. Pengaruh orang China dan Vietnam juga dapat dilihat dari pengaruh yang besar terhadap parlemen dan militer di Kamboja. Dilihat dari jumlah militer bintang 4 di Kamboja, 4 diantaranya merupakan orang Vietnam, 4 lainnya merupakan orang China, sedangkan hanya 2 orang yang berasal dari Kamboja.

Perbedaan Isu dan strategi kampanye CPP dan CNRP

CPP menggunakan strategi politik uang diakui sudah tidak efektif untuk mempengaruhi pemilih di urban, karena mereka menginginkan perubahan secara keseluruhan. Strategi ini masih efektif digunakan di wilayah rural, karena kesadaran politik disana masih rendah, sehingga wilayah rural masih dikuasai oleh CPP. Disisi lain, CNRP menggunakan media sosial yang memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan berita sebenarnya, sehingga masyarakat urban mengetahui kebenaran. Namun, media ini masih sangat jarang digunakan di wilayah rural. Isu yang digunakan terkait kenaikan upah, karena upah minimum di Kamboja sangat rendah. Kondisi tersebut pun membuat masyarakat urban cenderung memilih CNRP di wilayah urban, khususnya masyarakat muda.

Intimidasi politik dan peran pengawas internasional di wilayah urban

Pemilu tahun 2013 di Phnom Penh cenderung lebih aman dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Kecurangan dan intimidasi politik mengalami pengurangan, meskipun konflik militer-masyarakat bertambah parah setelah hasil pemilu diumumkan. Kehadiran pengawas pemilu sangat membantu untuk membuat iklim yang lebih aman bagi pemilih di wilayah urban, namun saya tidak tahu apakah hal tersebut berlaku di wilayah rural.

Nama	Pekerjaan	Tempat Wawancara	Waktu Wawancara
Meas Nee	Pengamat dan Analis politik Kamboja	Sunway Hotel, Phnom Penh	24 September 2016 Pukul 07.45-09.30

Gambaran umum kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja

Hasil pemilu tahun 2013 sangat baik jika dilihat dari sisi demokratisasi di Kamboja. Partai oposisi di Kamboja memiliki kekuatan yang lebih baik dari pemilu sebelumnya, karena perolehan suara yang didapat. Bahkan dari data yang tersebar di media sosial, CNRP seharusnya memenangkan pemilu tahun 2013 dengan perolehan suara mencapai 66%. Namun, karena intervensi yang dilakukan oleh militer dan NEC maka pada akhirnya CPP merupakan pemenang pemilu tahun 2013. Kondisi tersebut membuat masyarakat disini (Phnom Penh) melakukan demonstrasi besar-besaran kepada pemerintah, khususnya pekerja garmen yang menginginkan perubahan, sehingga menghasilkan korban jiwa.

Kemungkinan besar CNRP dapat memenangkan pemilu tahun 2018 jika terus mendapat dukungan besar dari masyarakat, meskipun kualitas CNRP dalam menangani pemerintahan Kamboja masih dipertanyakan karena belum memiliki pengalaman yang banyak seperti CPP dan Hun Sen. Akibat tekanan dari masyarakat dan CNRP, pada akhirnya pasca pemilu CPP berbenah banyak untuk menyelesaikan permasalahan di Kamboja. Salah satunya adalah meningkatkan netralitas NEC, sehingga kini NEC diisi oleh 4 orang dari CPP, 4 orang dari CNRP, serta 1 orang dari pihak netral.

Kinerja dan permasalahan pada pemerintahan Hun Sen

Banyak permasalahan yang terjadi di Kamboja. Namun permasalahan tersebut bertambah parah pada periode terakhir kepemimpinan Hun Sen (2008-2013). Terdapat tiga permasalahan besar yang muncul saat itu: korupsi, pelanggaran HAM, dan kebijakan ekonomi yang merugikan kesejahteraan masyarakat. Ketiga permasalahan tersebut pada akhirnya membuat banyak masyarakat yang berpaling ke partai oposisi pada pemilu tahun 2013.

masyarakat di wilayah urban dan wilayah rural sama-sama tidak puas dengan permasalahan yang ditimbulkan Hun Sen, namun berkaca pada tingginya kesadaran politik yang dimiliki oleh masyarakat urban, maka ketidakpuasan dan protes terhadap pemerintah lebih banyak diutarakan oleh masyarakat di wilayah urban. Kesadaran politik tersebut dilatarbelakangi oleh informasi yang didapat dari media. Masyarakat di wilayah rural hanya mengandalkan informasi dari televisi dan radio, yang banyak dipengaruhi oleh propaganda pemerintah. Sementara itu, masyarakat urban tidak hanya mengandalkan informasi yang diperoleh dari televisi dan radio, karena memiliki sumber informasi dari media internet yang lebih netral dibandingkan dengan media lainnya, sehingga masyarakat urban mengetahui banyaknya permasalahan pemerintahan Hun Sen dari informasi di media internet.

Perbedaan Isu dan strategi kampanye CPP dan CNRP

CPP masih menggunakan strategi vote buying pada pemilu tahun 2013. Namun cara tersebut hanya efektif digunakan di wilayah rural saja. Masyarakat kini tidak membutuhkan sekedar uang saja, tetapi juga membutuhkan keamanan dan kesejahteraan. Selain strategi vote buying, CPP disini memanfaatkan kekuatan militer yang dimiliki sejak kudeta (militer) tahun 1997 untuk

mengintimidasi masyarakat agar memilih CPP pada penyelenggaraan pemilu. Intimidasi yang dilakukan oleh militer disini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, namun juga kepada pihak oposisi dan NEC, terutama pada masa pencoblosan dan perhitungan suara. Namun, strategi ini sudah berkurang jika dibandingkan tahun lalu, khususnya di wilayah urban.

Sementara itu, CNRP menggunakan strategi yang lebih baik dibandingkan dengan CPP. CNRP menggunakan media sosial sebagai sarana utama kampanye. Banyak masyarakat yang mulai menggunakan media internet, karena sudah tidak percaya dengan media televisi, radio dan surat kabar yang berasal dari pemerintah. Pemilihan tersebut karena CNRP tidak mampu secara langsung berkampanye di wilayah rural, karena akses diblok langsung oleh CPP.

Intimidasi politik dan peran pengawas internasional di wilayah urban

Pemilu tahun 2013 dapat dikatakan lebih bebas dan adil dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, karena berkurangnya intimidasi politik. Namun, kecurangan masih banyak terjadi, dilihat dari perhitungan suara dan administrasi pemilu. Pengawas pemilu memiliki peran besar dalam mempengaruhi hal tersebut, karena perbedaan kondisi pemilu yang dialami di wilayah urban dan wilayah rural. Dalam hal ini, kondisi pemilu di wilayah urban jauh lebih aman dibandingkan dengan pemilu di wilayah rural, karena berkurangnya intimidasi politik.

Nama	Pekerjaan	Tempat Wawancara	Waktu Wawancara
Pich Sovann	Anggota CNRP	Sunway Hotel, Phnom Penh	24 September 2016 Pukul 09.30-10.30

Gambaran umum kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja

Hasil pemilu tahun 2013 merupakan hasil yang positif dilihat dari perspektif CNRP. Meskipun terjadi banyak kecurangan yang berpihak kepada CPP, hasil ini tentunya membuat kami (CNRP) yakin untuk dapat memenangkan pemilu tahun 2018. Dengan Sam Rainsy, kami (CNRP) yakin bahwa kondisi Kamboja dapat menjadi lebih baik dan menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan pada rezim Hun Sen.

Kinerja dan permasalahan pada pemerintahan Hun Sen

Kinerja pemerintahan Hun Sen sangat buruk diakhir periodenya (2008-2013). Banyak permasalahan yang merugikan masyarakat, khususnya permasalahan yang meliputi korupsi, pelanggaran HAM, dan land grabbing. Permasalahan tersebut membuat CNRP mendapatkan dukungan besar dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan di Kamboja.

Perbedaan Isu dan strategi kampanye CPP dan CNRP

Strategi pemilu yang diterapkan CNRP lebih unggul dibandingkan CPP yang masih menggunakan cara lama. Meskipun jika dibandingkan dengan CPP, kami (CNRP) jelas tidak memiliki kekuatan yang sepadan. Hampir seluruh media yang beroperasi di Kamboja dikontrol oleh pemerintah. Kondisi tersebut pada akhirnya membuat kami menggunakan media internet, khususnya Facebook, dan beberapa stasiun radio privat untuk berkampanye menyebarkan informasi CNRP. Hal tersebut membuat kami (CNRP) kesulitan berkompetisi di wilayah rural, sehingga pada akhirnya hanya berfokus untuk berkampanye di wilayah urban, khususnya memobilisasi masyarakat muda. Strategi tersebut dinilai efektif berkaca pada dukungan yang diperoleh dari kalangan muda, khususnya di wilayah urban.

Intimidasi politik dan peran pengawas internasional di wilayah urban

Kecurangan pemilu tahun 2013 di Kamboja masih terjadi sangat masif. Namun, sisi positif dari pemilu ini adalah berkurangnya intimidasi politik yang dilakukan CPP terhadap pemilih, sehingga

mereka dapat memilih kami (CNRP) yang menginginkan perubahan. Peran pengawas pemilu hanya terasa signifikan di wilayah urban saja. Di wilayah rural, dimana CPP memiliki kekuatan militer yang besar, pengawas pemilu tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga kecurangan banyak terjadi di wilayah tersebut. Hal tersebut berbeda dengan kondisi wilayah urban. Meskipun masih ada kecurangan, namun akibat kehadiran pihak internasional, penyelenggaraan pemilu di wilayah tersebut menjadi lebih aman.

Nama	Pekerjaan	Tempat Wawancara	Waktu Wawancara
Yong Kim Eng	Direktur COMFREL	Ochidee Restaurant, Phnom Penh	24 September 2016 Pukul 11.30- 13.30

Gambaran umum kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja

Hasil pemilu tahun 2013 berhasil meruntuhkan dominasi CPP dalam pemilu. Meskipun masih menang, hasil tersebut tentunya sangat positif. Keputusan peleburan SRP dan HRP menjadi CNRP dapat dikatakan berhasil, karena jumlah suara yang diperoleh dapat menyaingi perolehan suara CPP. Bahkan, dari report yang tersebar melalui media sosial (Facebook), pihak CNRP menyatakan bahwa seharusnya mereka dapat memenangkan pemilu dengan perolehan sebesar 66%. Kecurangan skala besar yang dilakukan oleh NEC (atas perintah CPP) pada akhirnya membuat kemenangan tersebut gagal diraih. Kemenangan yang diraih CPP tersebut pada akhirnya mengundang salah satu protes 'berdarah' terbesar di Kamboja. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong pemboikotan terhadap parlemen juga dilakukan oleh pihak CNRP, yang masih tidak terima dengan keputusan NEC.

Kinerja dan permasalahan pada pemerintahan Hun Sen

Banyak permasalahan yang terjadi di Kamboja, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja garmen dan land grabbing. Kondisi tersebut berdampak pada demonstrasi besar-besaran yang dilakukan di Kamboja. Masyarakat urban sudah tidak takut dengan intimidasi yang dilakukan oleh pemerintah karena mereka menginginkan adanya perubahan.

Perbedaan Isu dan strategi kampanye CPP dan CNRP

CPP tidak memiliki strategi kampanye yang bagus dalam mempersiapkan pemilu tahun 2013. Selain politik uang, CPP masih memanfaatkan strategi intimidasi politik yang banyak dilakukan di wilayah rural. Tapi, strategi tersebut sudah tidak terlalu ampuh karena masyarakat yang didominasi oleh kalangan muda menginginkan adanya perubahan dalam pemerintah. Selain itu, strategi yang digunakan CPP adalah memanfaatkan NEC, untuk melakukan kecurangan pemilu. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kecurangan yang dilakukan selama pemilu tahun 2013 berlangsung, seperti banyak nama pemilih yang palsu, banyak pemilih yang tidak terdaftar sehingga mereka tidak bisa memilih, tinta dalam pemilu bisa dihapus dengan mudah sehingga banyak pemilih yang dapat memilih dua kali, intervensi yang dilakukan oleh militer dalam perhitungan suara, sehingga menyebabkan perbedaan hasil suara di dalam dan di luar kotak suara

Disisi lain, CNRP juga tidak memiliki strategi yang sangat bagus dalam menjaring pemilih. CNRP hanya menggunakan media internet sebagai sarana kampanye mereka. Tetapi, strategi ini efektif dalam menjaring pemilih di wilayah urban, khususnya kalangan muda. Selain itu, CNRP memberikan berbagai janji yang intinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti memberikan US\$ 10 kepada lansia, memfokuskan untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kasus land grabbing, serta kebijakan pro-rakyat lainnya yang didukung oleh masyarakat yang menginginkan perubahan. CNRP juga memanfaatkan isu permasalahan pemerintah sebagai isu kampanye utama. Salah satu permasalahan yang diangkat adalah kasus imigran ilegal Vietnam

yang bisa memilih dalam pemilu. CNRP menuding pemerintah telah mengganti border Kamboja-Vietnam, sehingga Kamboja harus kehilangan banyak luas wilayah

Intimidasi politik dan peran pengawas internasional di wilayah urban

kehadiran pengawas dan media internasional di wilayah urban berdampak kepada turunnya jumlah intimidasi politik dan kecurangan di wilayah urban. Pihak CPP enggan melakukan intimidasi dan kecurangan skala besar di wilayah urban karena kehadiran pengawas dan media internasional. CPP dan Hun Sen takut kecurangan tersebut dapat membuat pihak internasional mengintervensi secara langsung penyelenggaraan pemilu di Kamboja seperti pada tahun 1993, sehingga pada akhirnya dapat membahayakan dominasi CPP di pemerintahan Kamboja. Kondisi tersebut membuat CPP untuk fokus melakukan praktik intimidasi dan kecurangan pemilu di wilayah rural, yang tidak memiliki pengawasan khusus dari pengawas dan media internasional.

Kondisi pemilu di wilayah urban dan di wilayah rural sangat berbeda. Di wilayah urban, kehadiran pengawas internasional yang menyoroti dan mengawasi penyelenggaraan pemilu membuat kondisi pemilu cenderung berjalan aman, meskipun terdapat kecurangan dan intimidasi dalam skala yang lebih kecil. Namun, di wilayah rural berbeda. Tidak adanya pengawas internasional ditambah dengan struktur yang sudah kuat (untuk melakukan kecurangan) memaksa masyarakat rural cenderung memilih CPP



Dokumentasi Foto



(Gambar 1. Foto bersama Rithy, Masyarakat Urban)



(Gambar 2. Foto bersama Thol Dina, anggota CPP)



(Gambar 3. Foto bersama Dam Sophat, Masyarakat Urban)



(Gambar 4. Foto bersama Meas Nee, Pengamat Politik Kamboja)



(Gambar 5. Foto bersama Yong Kim Eng, Pengawas Pemilu (COMFREL))